



Center for Economics and
Development Studies

LAPORAN AKHIR

KAJIAN INDEKS
PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA

DESEMBER 2022

Untuk :

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Penelitian/Kajian dengan judul:

“KAJIAN INDEKS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”

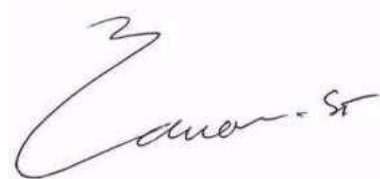
adalah hasil karya Tim Peneliti **Pusat Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran.**

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Penelitian/Kajian ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang diambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang kami akui seolah-olah sebagai tulisan kami sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang kami salin, tiru, atau yang kami ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila Tim Peneliti melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja atau tidak, dengan ini kami menyatakan siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bandung, 20 Desember 2022

Yang Memberi Pernyataan,
Ketua Tim



Prof. Dr. Maman Setiawan, S.E., M.T.
NIP. 197809202005021007

Anggota:

1. Rudi Kurniawan, S.E., M.Sc., Ph.D (Tim Peneliti)
2. Teguh Santoso, S.E., M.Sc (Tim Peneliti)
3. Ari Tjahjawardita, S.E., M.Si (Tim Peneliti)
4. Adhadian Akbar, S.E., MBA (Tim Peneliti)
5. Reza Galih Renaldi, S.E. (Asisten Peneliti)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini merupakan survei dan analisis tahunan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diperoleh dari pengukuran persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Pengukuran indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan survei persepsi terhadap pelaku usaha, pengambil kebijakan dan akademisi dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan lima indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi monopoli. Sementara, dimensi terakhir yakni dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

Penelitian ini melakukan survei terhadap 34 provinsi dengan responden yang mewakili institusi seperti Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan baik bobot sama maupun bobot dari *principal component analysis*. Proses penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan metode *Additive Aggregation Method* (AAM).

Hasil survei menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4,87 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,81. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemic Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha

yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2022 ini. Secara lebih detail, hampir semua skor dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha mengalami kenaikan, kecuali dimensi kinerja industri yang skor dimensinya mengalami penurunan. Penurunan kinerja industri di tahun 2022 ini dapat disebabkan karena inefisiensi teknis dan inefisiensi alokatif yang terjadi seperti kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun. Dimensi SCP tahun ini memiliki kontribusi sekitar 38 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2022 menunjukkan adanya perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 10 (sepuluh) daerah yang memiliki persaingan usaha tertinggi terdiri atas Provinsi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sedangkan, 10 (sepuluh) daerah dengan persaingan usaha terendah berada pada Provinsi Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.

Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah terdapat juga perubahan. Pada tahun 2022, berikut merupakan 10 (sepuluh) sektor yang memiliki persaingan usaha tertinggi, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan, 3 (tiga) sektor dengan persaingan usaha terendah berada pada sektor Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kajian.....	4
BAB II KAJIAN LITERATUR	5
2.1. Kompetisi dan Pengukurannya.....	5
2.1.1. Paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP).....	5
2.1.2. Pengukuran Kompetisi Terkini.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	8
3.1. Identifikasi indikator-indikator Utama Pengukuran Indeks Persaingan Usaha.....	8
3.2. Sumber Data dan Sampel	9
3.3. Metode Perhitungan.....	12
3.3.1 Sistem Pembobotan dan Skoring Daya Saing.....	12
3.3.2 Perhitungan Skor, Peringkat, dan Neraca Persaingan	13
3.3.3 Pemilihan Dimensi dan Indikator Untuk Indeks Persaingan Usaha Berbasis Data Primer	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Indeks Persaingan Usaha Secara Nasional.....	18
4.1.1 Bobot Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP dan Dimensi Keseluruhan	18
4.1.2 Hasil Indeks Persaingan Usaha Nasional Dimensi SCP dan Dimensi Nasional.....	20
4.2. Analisis Persaingan Usaha Per Provinsi.....	33
4.2.1. Provinsi Aceh.....	34
4.2.2. Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.2.3. Provinsi Sumatera Barat.....	49
4.2.4. Provinsi Riau.....	57
4.2.5. Provinsi Jambi.....	64

4.2.6.	Provinsi Sumatera Selatan.....	73
4.2.7.	Provinsi Bengkulu.....	81
4.2.8.	Provinsi Lampung.....	90
4.2.9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	97
4.2.10.	Provinsi Kepulauan Riau.....	105
4.2.11.	Provinsi DKI Jakarta.....	113
4.2.12.	Provinsi Jawa Barat.....	121
4.2.13.	Provinsi Jawa Tengah.....	129
4.2.14.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	137
4.2.15.	Provinsi Jawa Timur.....	145
4.2.16.	Provinsi Banten.....	153
4.2.17.	Provinsi Bali.....	161
4.2.18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	169
4.2.19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	177
4.2.20.	Provinsi Kalimantan Barat.....	185
4.2.21.	Provinsi Kalimantan Tengah.....	193
4.2.22.	Provinsi Kalimantan Selatan.....	201
4.2.23.	Provinsi Kalimantan Timur.....	209
4.2.24.	Provinsi Kalimantan Utara.....	217
4.2.25.	Provinsi Sulawesi Utara.....	225
4.2.26.	Provinsi Sulawesi Tengah.....	233
4.2.27.	Provinsi Sulawesi Selatan.....	240
4.2.28.	Provinsi Sulawesi Tenggara.....	248
4.2.29.	Provinsi Gorontalo.....	256
4.2.30.	Provinsi Sulawesi Barat.....	264
4.2.31.	Provinsi Maluku.....	272
4.2.32.	Provinsi Maluku Utara.....	280
4.2.33.	Provinsi Papua Barat.....	288
4.2.34.	Provinsi Papua.....	295

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	302
5.1 Kesimpulan.....	302
5.2 Implikasi Kebijakan.....	304
REFERENSI	306
LAMPIRAN	308

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

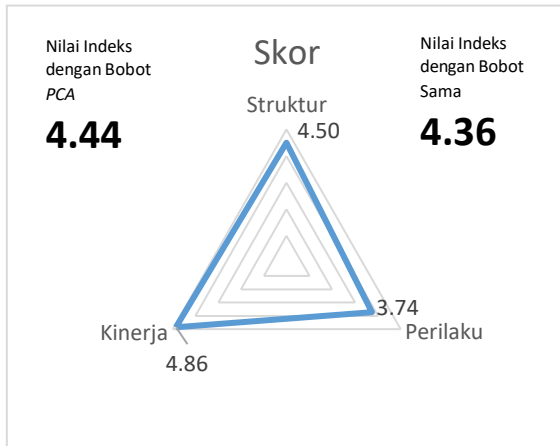
Sejak tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggunakan suatu ukuran persaingan usaha yang komprehensif untuk mengukur intensitas persaingan usaha di Indonesia. Ukuran persaingan usaha tersebut terus diperbaiki menggunakan konsep dan metode yang relevan hingga tahun 2022. Ukuran persaingan usaha tersebut merupakan indeks persaingan usaha nasional yang dapat diturunkan menjadi indeks persaingan usaha pada tingkat provinsi dan sektor ekonomi. Selain menjadi indikator kinerja KPPU dalam menjalankan tugasnya, pengukuran indeks persaingan tersebut cukup penting karena dapat memberikan indikasi apakah daya saing dan produktivitas serta efisiensi sektor ekonomi di Indonesia tersebut semakin baik atau tidak. Pemikiran dan hipotesis ini didasarkan pada berbagai teori ekonomi dan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menemukan lingkungan yang kompetitif di suatu negara akan mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi yang kemudian akan berdampak kepada daya saing suatu negara. Lebih jauh, daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa indikator daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura dan ketiga negara ASEAN tersebut memiliki intensitas kompetisi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Terkait dengan pentingnya indikator persaingan usaha tersebut, sejak sepuluh tahun terakhir KPPU terus mengembangkan ukuran persaingan usaha dalam bentuk ukuran parsial pengukuran persaingan usaha nasional untuk setiap sektor industri seperti industri manufaktur dan industri perbankan. Lima tahun sebelumnya, indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi juga

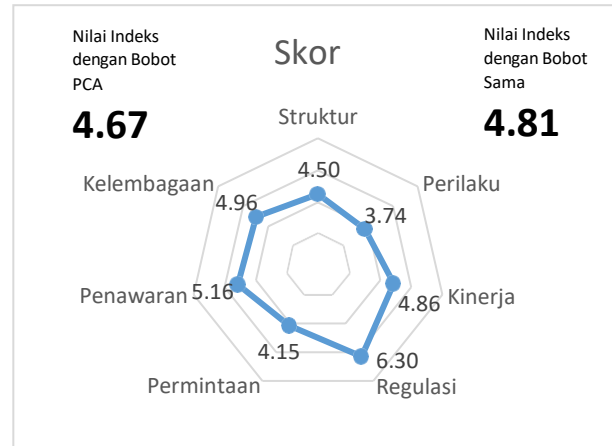
dikembangkan. Setelah pengembangan indeks persaingan usaha yang bersifat sektoral tersebut, indeks persaingan usaha yang lebih komprehensif dibuat untuk setiap daerah untuk melihat persaingan usaha di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang dimulai pada tahun 2016. Sebagai proyek awal, survei indeks persaingan usaha dimulai untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Indeks persaingan usaha KPPU di daerah Jawa Barat tersebut kemudian dijadikan pijakan untuk membangun indeks persaingan usaha secara nasional meliputi berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi penyusunan indeks persaingan usaha pada tahun 2019, KPPU kemudian melakukan survei untuk mendapatkan indeks persaingan usaha KPPU secara nasional pada tahun 2019.

Gambar 1.1 merupakan hasil Indeks Persaingan Usaha menggunakan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP (*Structure-Conduct-Performance*) pada tahun 2021. Dimensi keseluruhan terdiri dari dimensi Struktur (*Structure*), Kinerja (*Performance*), Perilaku (*Conduct*), Regulasi, Penawaran dan Permintaan. Berdasarkan hasil survei dan analisis menggunakan dimensi keseluruhan, skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama adalah masing-masing sebesar 4.67 dan 4.81. Berdasarkan survei dan analisis terhadap dimensi SCP saja, skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama ialah masing-masing sebesar 4.44 dan 4.36. Dari nilai skor Indeks Persaingan Usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih belum tinggi.

Skor Dimensi SCP



Skor Dimensi Keseluruhan



Gambar 1.1 Hasil Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Persepsi 2021

Hasil pengukuran indeks persaingan usaha di Indonesia sudah mulai dipublikasikan KPPU dan CEDS sejak tahun 2015. Dari hasil perhitungan tersebut didapat kesimpulan bahwa seluruh indeks persaingan di sektor manufaktur, perbankan, daerah, dan berdasarkan regulasi menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih stagnan dan belum relatif baik. Hasil ini sesuai dengan perhitungan indikator intensitas kompetisi yang umum di Indonesia menurut Global Competitiveness Index yang masih belum terlalu baik terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

Dalam perkembangan persaingan usaha di Indonesia termasuk adanya digitalisasi ekonomi, terdapat beberapa perubahan di dalam indikator agar benar-benar merefleksikan kinerja persaingan saat ini. Hasil pengukuran indeks persaingan usaha secara nasional yang diagregasi dari indeks persaingan usaha untuk setiap provinsi yang berubah-ubah juga memberikan catatan terhadap perankingan hasil indeks persaingan usaha yang terkait dengan provinsi yang diduga masih perlu didalami. Catatan tersebut terkait dengan beberapa daerah yang memiliki ranking yang dinamis setiap tahunnya dan ada beberapa daerah yang dianggap memiliki banyak kasus pelanggaran persaingan usaha tetapi masuk dalam salah satu provinsi dengan skor indeks

persaingan usaha paling tinggi.

Metode kajian dalam pengukuran indeks persaingan usaha ini mengalami perubahan bukan hanya pada beberapa indikator yang disesuaikan atau ditambahkan, tetapi mengalami perubahan metode survei pada masa pandemic Covid-19. Terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh tim selama masa pandemik tersebut untuk melaksanakan survei secara langsung. Untuk tetap mendapatkan data yang valid, tim menggunakan enumerator lokal dan tetap bersama-sama memantau jalannya proses wawancara yang dilakukan enumerator lokal melalui *platform* daring seperti *zoom meeting*. Untuk terus memperbaiki kualitas dari survei, dilakukan evaluasi dan pendalaman kembali terhadap beberapa pertanyaan dari survei-survei sebelumnya. Sejak tahun 2020, perkembangan dan dampak ekonomi digital terhadap persaingan usaha juga dibahas dalam penelitian ini agar seluruh faktor terakomodasi dalam indeks persaingan usaha. Selain itu, dampak pandemik Covid-19 juga dilihat untuk mengukur dampaknya terhadap persaingan usaha saat ini.

1.2. Tujuan Kajian

Sebagaimana sudah diuraikan pada latar belakang penelitian, penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengukur ukuran indeks persaingan usaha yang komprehensif di setiap sektor ekonomi dan setiap provinsi di Indonesia dengan tujuan penelitian secara spesifik, yaitu:

1. Memberikan identifikasi indikator-indikator apa saja yang valid untuk mengukur indeks persaingan usaha untuk sektor ekonomi di daerah provinsi di Indonesia.
2. Memberikan urutan/ranking indeks kompetisi di sektor ekonomi di daerah provinsi dilihat dari berbagai indikator yang ada.
3. Memberikan neraca persaingan atau kinerja persaingan sektor ekonomi di daerah provinsi dilihat dari berbagai indikator persaingan yang ada.
4. Memberikan indeks persaingan usaha secara nasional yang diturunkan dari indeks persaingan usaha daerah.

BAB II

KAJIAN LITERATUR¹

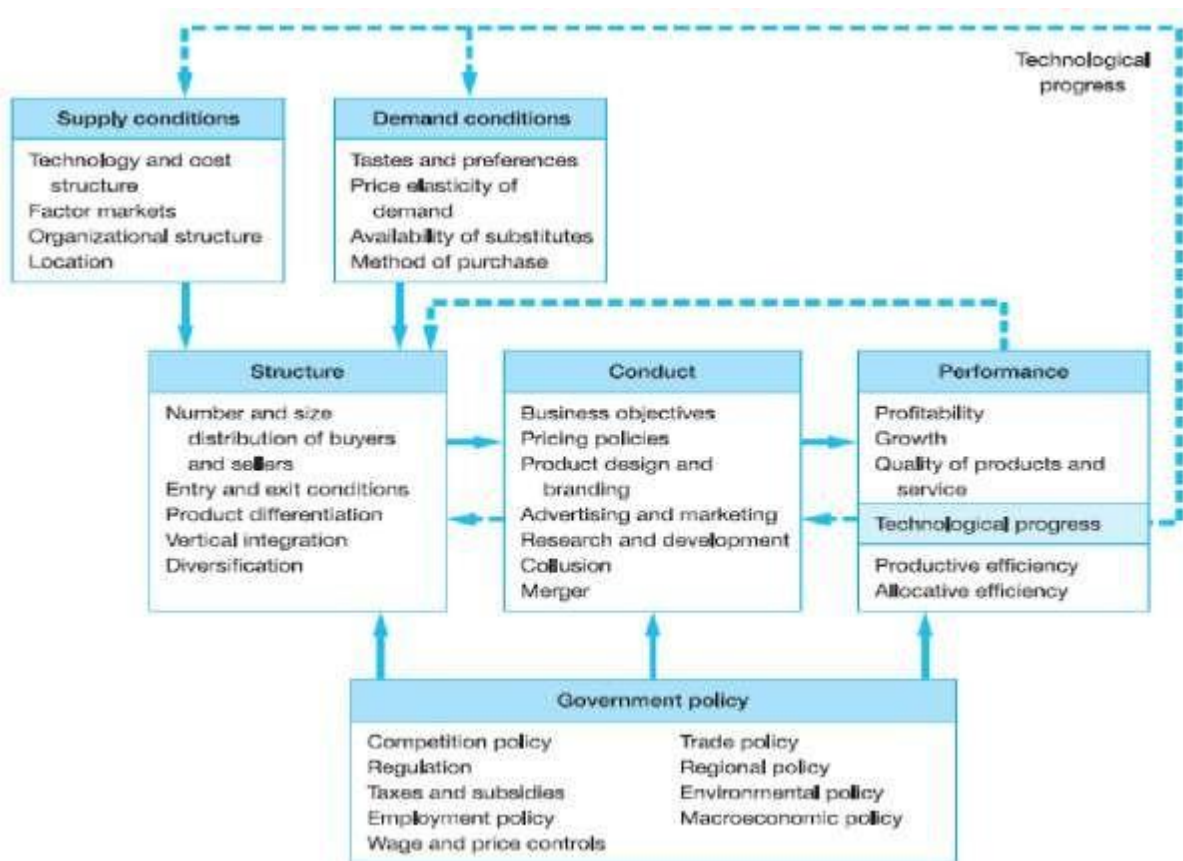
2.1. Kompetisi dan Pengukurannya

Konsep persaingan usaha sudah banyak dibahas dalam literatur ekonomi dasar dan secara lebih spesifik kemudian dibahas dalam konsep-konsep di ekonomi industri. Konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai dimensi dan indikator yang tepat baik untuk indeks persaingan usaha berbasis data sekunder atau indeks persaingan usaha berbasis data primer. Basis konsep berdasarkan paradigma Struktur-Perilaku-Kinerja dan berbagai pemikiran ekonomi industri terkini dapat digunakan sebagai referensi dasar membangun indeks persaingan usaha tersebut.

2.1.1. Paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP)

Pengukuran persaingan usaha terus berkembang dari mulai pengukuran yang bersifat tradisional hingga pengukuran yang dianggap lebih modern. Kerangka pengukuran kompetisi selalu dimulai dari paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP). Kerangka SCP tersebut ditulis pertama kali oleh Mason (1939) dan kemudian oleh Bain (1942). Paradigmanya telah melalui analisis yang signifikan sejak Bain menjalankan serangkaian riset empiris pada tahun 1956 untuk mengestimasi hubungan antara struktur pasar dan kinerja yang kemudian didokumentasikan dalam bukunya *Barriers to New Competition*. Buku tersebut kemudian menjadi pedoman terkait diskusi dan pengembangan fondasi teoritis dari analisis kompetisi dan kinerja pasar. Kerangka SCP tersebut telah diuji oleh beberapa peneliti secara dinamis (Lihat Clarke dan Davies, 1982; Lipszinky dan Wilson, 2000).

¹ Kajian Literatur ini menggunakan kajian literatur yang sama dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1 Paradigma *Structure-Conduct-Performance*

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana paradigma dari SCP yang diilustrasikan oleh Bain (1956) dan Lipszinky dan Wilson (2000) dapat menjelaskan konsep persaingan usaha. Berdasarkan Gambar 2.1, struktur pasar akan mempengaruhi perilaku yang kemudian mempengaruhi kinerja pasar. Umpan balik yang mungkin terjadi juga dijelaskan dalam kerangka ini. Dengan kata lain, di bawah struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi seperti oligopoli/monopoli, perilaku dari para oligopoli dan/ atau monopoli cenderung menjadi kolusif atau tanpa aturan melalui kekuatan pasar. Kemudian, perilaku ini akan memberikan rendahnya efisiensi, kurangnya produktivitas atau persaingan dan kinerja pasar yang buruk pada umumnya. Skema tersebut

menyatakan bahwa kondisi ini akan cukup berbeda jika struktur pasar yang kurang terkonsentrasi atau lebih kompetitif. Dengan cara lain, perusahaan dengan kinerja yang tinggi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dan secara berkelanjutan meningkatkan pangsa pasar mereka. Oleh karena itu, kinerja yang tinggi dari perusahaan dapat juga mengurangi kompetisi.

Dalam paradigma SCP, konsentrasi empat perusahaan terbesar (CR4), Herfindahl-Hirschman Index(HHI), *turnover*, dan *net entry* biasanya digunakan untuk merepresentasikan ukuran kompetisi yang mengindikasikan struktur pasar dari suatu industri. Struktur pasar yang kompetitif akan mendorong perilaku yang kompetitif sehingga akan menciptakan efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Sebaliknya struktur pasar yang terkonsentrasi akan mendorong perilaku kolusif sehingga menciptakan inefisiensi produksi dan alokatif.

2.1.2. Pengukuran Kompetisi Terkini

Pengukuran persaingan usaha saat ini berkembang tidak hanya pengukuran pada struktur pasar tetapi lebih jauh lagi kompetisi diukur dari dampak yang ditimbulkan oleh struktur pasar yang ada. Demsetz(1973) berargumen bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi belum tentu akan menciptakan kolusi tetapi perusahaan-perusahaan yang efisien yang menciptakan struktur pasar tersebut. Dari konsep yang dikemukakan Demsetz tersebut kemudian berkembang hipotesis *efficient-structure-hypothesis*. Kemudian konsep lain yang berkembang berasal dari Bresnahan (1982), Azzam (1997) dan Lopez at al. (2002) yang menggunakan ukuran perilaku dan *market power* untuk menaksir kompetisi di pasar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN²

3.1. Identifikasi indikator-indikator Utama Pengukuran Indeks Persaingan Usaha

Pada kajian indeks persaingan usaha tahun 2022, untuk identifikasi indikator-indikator utama yang mengukur tingkat kompetis, diambil dari literatur sebelumnya dan meminta pendapat ahli melalui berbagai cara seperti *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam kajian ini, berbagai indikator persaingan usaha diperoleh dengan mengadopsi beberapa pengukuran persaingan usaha dan konsep persaingan usaha dari literatur ekonomi industri. Dari hasil identifikasi tersebut, Tabel 3.1 menggambarkan indikator-indikator dari setiap dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dengan menggunakan data primer (indeks persaingan usaha nasional). Untuk lebih menguatkan, mencari serta menambahkan indikator-indikator tersebut, maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan ahli untuk mendapatkan indikator dan dimensi yang tepat. Tabel 3.1 menggambarkan berbagai dimensi dan indikator yang digunakan untuk membangun indeks persaingan usaha nasional berdasarkan persepsi yang diagregasi dari indeks persaingan usaha sektoral ekonomi dan provinsi.

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi dan Indikator persaingan usaha berbasis data persepsi

Variabel	Indikator	Konsep Persaingan yang Tinggi	Sumber data
Dimensi struktur industry			
1	Jumlah perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah perusahaan relatif banyak• Jumlah perusahaan dinamis atau semakin meningkat (entry)• Dampak Ekonomi Digital	Persepsi
2	Konsentrasi industry	<ul style="list-style-type: none">• Dominasi perusahaan di setiap daerah	Persepsi
3	Produk differensiasi	<ul style="list-style-type: none">• Variasi produk sejenis di setiap daerah	Persepsi

² Metode Penelitian ini tidak berbeda dengan Metode Penelitian Tahun sebelumnya.

4	Hambatan masuk	<ul style="list-style-type: none"> Hambatan modal rendah. Hambatan masuk seperti hambatan investasi dan peraturan tidak ada. 	Persepsi
Dimensi Perilaku Industri			
1	Kolusi/kartel	Koordinasi antar perusahaan di daerah	Persepsi
2	<i>Pricing</i>	Penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar	Persepsi
3	Iklan dan <i>branding</i>	Tingkat intensitas promosi, iklan di daerah	Persepsi
4	Penelitian dan Pengembangan (R&D)	Aktivitas R&D perusahaan-perusahaan di daerah	Persepsi
Dimensi Kinerja Industri			
1	Efisiensi perusahaan dan industri	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat efisiensi perusahaan dan industri semakin tinggi Dampak Ekonomi Digital terhadap efisiensi 	Persepsi
2	Mark-up	Profitabilitas perusahaan di daerah tidak berlebih	Persepsi
3	Produktivitas	Produktivitas perusahaan di daerah	Persepsi
4	Pertumbuhan output	Pertumbuhan output perusahaan terus meningkat	Persepsi
5	Progres penggunaan Teknologi	Adopsi teknologi terus meningkat di daerah	
Dimensi Regulasi			
1	Undang-undang persaingan usaha	UU No. 5 tahun 1999 mendorong persaingan usaha	Persepsi
2	Kebijakan persaingan Usaha	Kebijakan mendorong persaingan usaha	Persepsi
3	Kebijakan perdagangan dan Investasi	Kebijakan perdagangan dan investasi mendorong persaingan usaha.	Persepsi
4	Kontrol terhadap harga	Kebijakan pemerintah terkait dengan harga produk tidak membatasi persaingan usaha	Persepsi
5	Kebijakan ekonomi Makro	Kebijakan ekonomi makro tidak membatasi persaingan usaha	Persepsi
Dimensi Faktor Permintaan			
1	Elastisitas harga permintaan	Responsitas penjualan produk terhadap harga yang tinggi	Persepsi
2	Substitusi barang dan jasa	Tingkat substitusi antara produk cukup tinggi	Persepsi
3	Pertumbuhan pasar	Pertumbuhan penjualan total di pasar cukup besar	Persepsi
Dimensi Faktor Penawaran			
1	Teknologi	Penggunaan teknologi perusahaan cukup merata	Persepsi
2	Lokasi	Lokasi perusahaan/industri terjangkau	Persepsi
3	Akses dan harga input	Kemudahan mendapatkan akses input dengan harga terjangkau	Persepsi
Dimensi Kelembagaan			
1	UU No. 5 tahun 1999	Pengetahuan tentang UU No. 5 tahun 1999	Persepsi
2	KPPU	Pengetahuan tentang lembaga KPPU	Persepsi
3	Pengarusutamaan	Pengarusutamaan Prinsip Persaingan Usaha di daerah	Persepsi

Sumber: berbagai sumber

3.2. Sumber Data dan Sampel

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan ialah data primer. Data primer digunakan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional dan daerah dengan data berbasis persepsi. Dalam

penyusunan indeks persaingan usaha berbasis persepsi, survei dilakukan terhadap para stakeholder yang dinilai dapat memberikan persepsi berdasarkan pengetahuan dan penguasaan terhadap kondisi dan indikator persaingan usaha di Daerah. Adapun stakeholder yang akan menjadi responden survei antara lain:

1. Kepala Dinas Perindustrian/Perdagangan Provinsi, atau yang mewakili
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, atau yang mewakili
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang melingkupi seluruh 34 provinsi.
4. Akademisi Lokal

Survei akan dilakukan pada 4 stakeholder di atas untuk setiap Provinsi. Pemilihan 4 stakeholder tersebut dengan pertimbangan bahwa 4 stakeholder tersebut merepresentasikan elemen yang kompeten dalam menilai persaingan usaha di daerah, yakni elemen Akademisi, Pelaku Usaha, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah (Academic, Business and Government/ABG). *Kepala kantor wilayah KPPU akan jugadimintai keterangan terkait dengan hasil survei dari para responden untuk mengkonfirmasi terkait dengan validasi data di masing-masing daerah yang menjadi cakupan wilayahnya.* Responden akan diberi daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka mencakup pandangan dan persepsi responden terhadap kondisi persaingan usaha. Sedangkan pada pertanyaan tertutup, responden akan diminta untuk memberikan persepsi dengan melakukan scoring dari 1-7 untuk setiap sektor ekonomi sesuai sektor usaha dalam PDRB¹. *Dari 17 sektor ekonomi, hanya 15 sektor yang dimasukkan dalam perhitungan indeks persaingan usaha ini karena sektor administrasi pemerintah secara umum tidak masuk ke dalam sektor bisnis dan sektor lainnya dapat menimbulkan ketidakjelasannya dalam mempersepsikannya.* Skor 1 menunjukkan persaingan yang rendah, sementara skor 7 menunjukkan persaingan yang tinggi. (Daftar kuesioner terlampir)

Sementara itu, wilayah objek survei adalah Provinsi-Provinsi yang berada dalam cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU. Saat ini, KPPU memiliki 1 Kantor Pusat dan 7 Kantor Wilayah, yakni Kantor Wilayah Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Yogyakarta. Rincian wilayah sampel survei disajikan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sampel Penelitian

Kantor Wilayah	Wilayah Kerja	Sampel
Kanwil I Medan	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau	Semua Provinsi
Kanwil II Lampung	Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung	Semua Provinsi
Kanwil III Bandung	Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta	Semua Provinsi
Kanwil IV Surabaya	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	Semua Provinsi
Kanwil V Balikpapan	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Semua Provinsi
Kanwil VI Makassar	Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	Semua Provinsi
Kanwil VII Yogyakarta	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Semua Provinsi
Kantor Pusat	Semua wilayah yang tidak tercakup dalam wilayah kerja KPD	DKI Jakarta

Dari Tabel 3.2, seluruh Provinsi di wilayah kerja akan diambil sebagai sampel sedangkan untuk wilayah kerja kantor pusat, sampel yang diambil hanya DKI Jakarta. Sampel yang diambil dinilai dapat merepresentasikan keseluruhan populasi daerah di Indonesia. Tabel 3.3 menunjukkan provinsi-provinsi yang menjadi sampel survei dalam pengukuran indeks persaingan usaha, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sampel Survei Provinsi

No	Provinsi	No	Provinsi
1	Aceh	14	Kalimantan Selatan
2	Bali	15	Kalimantan Tengah
3	Bangka-Belitung	16	Kalimantan Timur
4	Banten	17	Kalimantan Utara
5	Bengkulu	18	Kepulauan Riau
6	DIY	19	Lampung
7	Gorontalo	20	Maluku
8	Jakarta	21	NTB
9	Jambi	22	NTT
10	Jawa Barat	23	Papua
11	Jawa Tengah	24	Riau
12	Jawa Timur	25	Sulawesi Selatan
13	Kalimantan Barat	26	Sulawesi Tenggara

No	Provinsi
27	Sulawesi Tengah
28	Sulawesi Utara
29	Sumatera Barat
30	Sumatera Selatan
31	Sumatera Utara
32	Sulawesi Barat
33	Maluku Utara
34	Papua Barat

3.3. Metode Perhitungan

3.3.1 Sistem Pembobotan dan Skoring Daya Saing

Hasil keluaran utama dari kajian ini adalah indeks kompetisi setiap tahun beserta ranking indeks kompetisi untuk setiap sektor usaha, daerah dan nasional. Terdapat dua pokok utama yang diperlukan untuk membuat peringkat kompetisi, yaitu variabel-variabel yang mampu menunjukkan dan mengindikasikan tingkat persaingan di industri dan suatu sistem pembobotan dan skoring yang dapat mentransformasi variabel-variabel atau indikator-indikator tersebut menjadi sistem pemeringkatan dan pengklasifikasian. Penentuan, penjaringan, serta penseleksian variabel-variabel kinerja industri dilakukan melalui penelusuran literatur dan diskusi dengan berbagai ahli. Pada bagian ini akan dijelaskan teknik pembobotan dan penilaian (skoring) persaingan usaha yang dipergunakan pada penelitian ini sebagaimana pernah digunakan oleh LP3E FEB UNPAD (2001).

Metode pembobotan yang digunakan ialah menggunakan *Principal Component Analysis (PCA)*. Metode pembobotan dengan PCA dapat dilakukan dalam perhitungan bobot yang sesuai untuk indikator-indikator yang mengukur elemen-elemen kinerja dan skor kinerja secara keseluruhan. Metode PCA ini merupakan metode untuk mereduksi berbagai indikator menjadi indikator yang lebih sedikit dengan tidak menghilangkan esensi keberadaan indikator-indikator tersebut.

Dalam kaitannya dengan mereduksi indikator-indikator menjadi satu atau beberapa elemen, teknik PCA yang digunakan ialah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Teknik CFA digunakan ketika peneliti sudah mengetahui secara teori tentang indikator-indikator yang membentuk suatu elemen. Oleh karena itu,

penentuan yang akurat terkait dengan indikator-indikator yang akan membentuk suatu elemen ialah salah satu syarat penting. Seluruh indikator-indikator dalam CFA ini nantinya dikhususkan untuk membuat suatu elemen. CFA tersebut memiliki persamaan dasar *Principal Component Analysis* (PCA) yang sama, sebagai berikut:

$$Z_1 = \pi_1 * F_1 + \dots + \pi_k * F_k + v_1 \quad (1)$$

⋮

$$Z_n = \pi_n * F_1 + \dots + \pi_n * F_n + v_n \quad (n)$$

Di mana n dan k menunjukkan masing-masing jumlah indikator dan jumlah faktor atau elemen yang terbentuk, π ialah factor loading, Z ialah indikator, dan F ialah faktor atau elemen.

Secara umum, teknik pembobotan dengan metode PCA dilakukan dengan tahapan-tahapan yang runtut, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi indikator-indikator untuk setiap elemen.
2. Melakukan analisis korelasi antara indikator untuk mengetahui apakah metode PCA ini *valid* untuk digunakan pembobotan.
3. Analisis PCA dengan menentukan validitas faktor yang terbentuk (CFA).
4. Melakukan pembobotan dengan jumlah faktor yang terbentuk berdasarkan *factor loading*. *Factor loading* yang terbentuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan bobot indikator dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Hitung *squared loading factor* dan kemudian nilai tersebut dinormalisasi sehingga penjumlahannya satu.
 - b. Hasil normalisasi dari *squared loading factor* akan membentuk bobot untuk masing-masing indikator di setiap elemen.

3.3.2 Perhitungan Skor, Peringkat, dan Neraca Persaingan

Dengan metode *Additive Aggregation Method* (AAM), Perhitungan skor kinerja persaingan usaha dalam satu tahun dilakukan dengan menghitung jumlah tertimbang (*weighted sum*) dari semua variabel/indikator. Jumlah tertimbang yang tinggi mengindikasikan tingkat kinerja persaingan yang lebih

tinggi pula. Pemingkatan kinerja persaingan usaha dilakukan dengan membandingkan skor jumlah tertimbang variabel yang telah dinormalisasi (*normalized variable*) ini untuk untuk seluruh industri yang diamati. Selain peringkat persaingan usaha, penelitian ini juga membahas indeks kompetisi untuk setiap indikator. Perhitungan skor pada level indikator dan sub indikator pada prinsipnya sama dengan perhitungan skor pada level industri hanya perbedaannya, perhitungan ini melibatkan jumlah variabel yang lebih sedikit. Dengan perkataan lain skor pada level indikator merupakan ‘*subset*’ skor pada level industri dan skor pada level sub indikator merupakan ‘*subset*’ skor pada level indikator.

Perhitungan skor untuk pemeringkatan kinerja industri dengan menggunakan metode AAM dilakukan dengan pendekatan penjumlahan (OECD, 2008), yaitu metode penjumlahan dengan bobot tertimbang. Metode ini menjumlah skor tiap indikator yang membentuk elemen dengan suatu bobot tertimbang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode penjumlahan tersebut dilakukan dengan formula:

$$RCI_q = \sum_{I=1}^{NW} I_i$$

Di mana RCI ialah indeks persaingan, q ialah elemen atau faktor kinerja yang akan dibentuk, w ialah bobot tertimbang, I ialah skor dari indikator, dan i menunjukkan indikator ke-1..., N. Ranking antara industri dilakukan dengan melihat skor masing-masing elemen dan kemudian dilihat secara keseluruhan dengan menjumlahkan skor elemen setiap industri untuk pemeringkatan industri berdasarkan kinerja persaingannya.

3.3.3 Pemilihan Dimensi dan Indikator Untuk Indeks Persaingan Usaha Berbasis Data Primer

Dalam laporan sementara ini akan dijelaskan bagaimana pemilihan kembali variabel-variabel untuk persaingan usaha berdasarkan hasil survei. Kemudian realisasi survei juga dipaparkan di dalam Bab IV ini. Table 3.5 menunjukkan dimensi struktur yang merupakan bagian dari *paradigm structure-conduct-performance* (SCP) yang digunakan untuk mengukur persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri dan diferensiasi produk. Masing-masing indikator diukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan.

Tabel 3.4. Dimensi struktur dan indikatornya

Dimensi	Indikator
Struktur	Jumlah Perusahaan
	Hambatan Keluar/Masuk Industri
	Konsentrasi Industri
	Differensiasi Produk

Tabel 3.5. menunjukkan dimensi perilaku dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi perilaku terdiri dari harga dan advertising. Setiap indikator dalam dimensi kemudian diukur dengan pertanyaan yang dijabarkan dalam kuesioner.

Tabel 3.5. Dimensi Perilaku dan Indikatornya

Dimensi	Indikator
Perilaku	Harga
	Advertising

Tabel 3.6. menunjukkan dimensi kinerja dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi kinerja terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan Produktivitas. Masing-masing indikator akan diturunkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner.

Tabel 3.6. Dimensi Kinerja dan Indikatornya

Dimensi	Indikator
Kinerja	Efisiensi produksi dan distribusi
	Pengembangan teknologi
	Profitabilitas
	Produktivitas

Tabel 3.7. menunjukkan dimensi permintaan dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi permintaan terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Masing-masing indikator akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.7. Dimensi permintaan dan Indikatornya

Dimensi	Indikator
Permintaan	Elastisitas harga permintaan
	Barang substitusi
	Pertumbuhan pasar

Tabel 3.8 menunjukkan dimensi penawaran dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi penawaran terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan, dan input. Masing-masing indikator akan

dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.8. Dimensi penawaran dan Indikatornya

Dimensi	Indikator
Permintaan	Jaminan ketersediaan pasokan
	Input

Tabel 3.9 menunjukkan dimensi regulasi dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi regulasi yang memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha. Indikator tersebut akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.9. Dimensi regulasi dan indikatornya

Dimensi	Indikator
Regulasi	Kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha
	- Terkait hambatan masuk
	- Memfasilitasi monopoli

Tabel 3.10 menunjukkan dimensi kelembagaan dan indikatornya untuk mengukur persaingan usaha. Indikator dari dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha. Indikator tersebut akan dijabarkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sebagai ukurannya.

Tabel 3.10. Dimensi Kelembagaan dan Indikatornya

Dimensi	Indikator
Kelembagaan	Pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha
	Kesadaran terhadap adanya KPPU
	Pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha

3.3.4 Pengelompokan Tingkat Persaingan Usaha Berdasarkan Skor Indeks Persaingan Usaha

Untuk mengelompokan tingkat persaingan usaha pada skala semantik yang digunakan untuk mengukur persaingan usaha, pengukuran indeks persaingan usaha ini menggunakan konsep yang digunakan oleh Heise (1970) yang membagi penilaian menjadi beberapa kelompok sehingga menjadi, sebagai berikut:

- Persaingan usaha sangat tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
- Persaingan usaha cukup tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
- Persaingan usaha sedikit tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)

- Persaingan usaha moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
- Persaingan usaha sedikit rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
- Persaingan usaha cukup rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
- Persaingan usaha sangat rendah (Skor Indeks 1.00-1.50)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep dan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bagian ini membahas hasil perhitungan indeks persaingan usaha per daerah dan per sektor dari 34 provinsi sampel penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan menyajikan bobot indeks persaingan usaha untuk seluruh dimensi dan hanya dimensi S-C-P. Tahap selanjutnya analisis dilakukan dengan menganalisis indeks persaingan usaha secara keseluruhan kemudian per provinsi dan per sektor.

4.1 Indeks Persaingan Usaha Secara Nasional

4.1.1 Bobot Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Dimensi SCP dan Dimensi Keseluruhan

Tabel 4.1 memberikan data terkait dengan skor bobot hanya dari dimensi SCP. Pembobotan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan yang sama dan pembobotan dengan metode *principal component analysis* (PCA). Hasil perhitungan bobot dari setiap dimensi akan digunakan untuk membentuk indeks persaingan usaha berdasarkan data rata-rata dimensi yang ada. Dari Tabel 4.1. tersebut diketahui bahwa dimensi yang memiliki bobot terbesar dari pembentukan indeks persaingan usaha dengan hanya menggunakan indeks S-C-P adalah dimensi kinerja diikuti oleh dimensi struktur dan dimensi perilaku industri. Dimensi kinerja pasar memiliki kontribusi yang terbesar dalam pembentukan indeks S-C-P dengan masing-masing bobot untuk SCP ialah sebesar 0.36, 0.22 dan 0.42. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja pasar memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan iklim persaingan usaha. Sementara dimensi perilaku memberikan andil yang paling kecil dalam indeks persaingan usaha yang hanya menggunakan tiga dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dimensi struktur industri tidak lagi dominan di dalam menjelaskan pembentukan persaingan usaha seperti diprediksi paradigma SCP. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, skor bobot persaingan usaha dimensi SCP ini mengalami perubahan pada bobot PCA. Dari skor bobot PCA terdapat peningkatan pada dimensi struktur dan dimensi kinerja. Sedangkan, untuk dimensi perilaku terdapat penurunan apabila dibandingkan tahun 2021.

Tabel 4.1 Skor Bobot Persaingan Usaha Dimensi S-C-P

Dimensi	Bobot PCA 2021	Bobot Sama 2021	Bobot PCA 2022	Bobot Sama 2022
Struktur	0.32	0.33	0.36	0.33
Perilaku	0.27	0.33	0.22	0.33
Kinerja	0.41	0.33	0.42	0.33

Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan bobot setiap dimensi keseluruhan. Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan metode PCA, dimensi yang memiliki bobot terbesar dari pembentukan indeks persaingan usaha untuk seluruh dimensi adalah dimensi perilaku yang diikuti oleh dimensi kelembagaan, dimensi regulasi, dimensi permintaan, dimensi penawaran, dimensi struktur dan dimensi kinerja. Dari hasil pembobotan ini diketahui bahwa dimensi S-C-P memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan indeks persaingan usaha dengan kontribusi sekitar 38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi struktur pasar, perilaku industri dan kinerja industri memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan iklim persaingan usaha. Dimensi regulasi, kelembagaan dan permintaan menjadi faktor lingkungan yang penting dalam mendorong persaingan usaha yang lebih tinggi. Hal ini dilihat dari hasil bobot dimensi-dimensi tersebut yang cukup besar. Dimensi kelembagaan dan regulasi memiliki peran cukup besar dalam penciptaan persaingan usaha yang tinggi, dalam hal ini pemahaman tentang UU No.5 Tahun 1999, pemahaman tentang keberadaan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pengambilan kebijakan yang mengarusutamakan persaingan usaha. Sementara itu skor bobot kinerja memiliki kontribusi sebesar 8.1% dan merupakan dimensi dengan bobot paling terkecil dibandingkan dengan seluruh dimensi lainnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kinerja pasar dianggap tidak banyak berubah dan sama di setiap provinsi di Indonesia sehingga tidak banyak memberikan kontribusi terhadap iklim persaingan usaha dilihat dari persepsi responden.

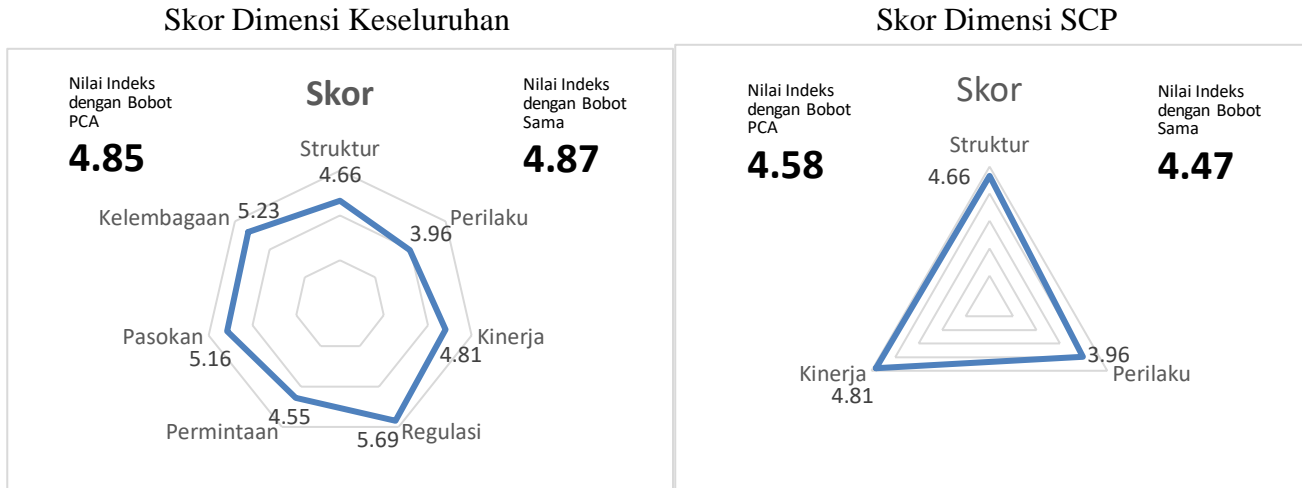
Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat perubahan pada bobot dimensi yang mana menunjukkan peningkatan atau penurunan pada tahun 2022. Dimensi perilaku, regulasi dan permintaan merupakan dimensi yang mengalami peningkatan bobot atau kontribusi terhadap variasi indeks persaingan usaha. Sedangkan dimensi struktur, kinerja, permintaan, penawaran dan kelembagaan mengalami penurunan bobot atau mengalami penurunan kontribusi dalam membentuk variasi indeks persaingan usaha.

Tabel 4.2 Skor Bobot Persaingan Usaha Semua Dimensi

Dimensi	Bobot PCA 2021	Bobot Sama 2021	Bobot PCA 2022	Bobot Sama 2022
Struktur	0.17	0.14	0.13	0.14
Perilaku	0.16	0.14	0.17	0.14
Kinerja	0.09	0.14	0.08	0.14
Regulasi	0.05	0.14	0.15	0.14
Permintaan	0.16	0.14	0.17	0.14
Penawaran	0.17	0.14	0.09	0.14
Kelembagaan	0.21	0.14	0.21	0.14

4.1.2 Hasil Indeks Persaingan Usaha Nasional Dimensi SCP dan Dimensi Nasional

Indeks persaingan usaha nasional berdasarkan rata-rata indeks persaingan usaha daerah dan seluruh sektor ekonomi ditunjukkan oleh Gambar 4.1. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa indeks persaingan usaha berada di rentang 4.47 - 4.87 berdasarkan dimensi SCP maupun dimensi keseluruhan baik menggunakan bobot PCA maupun bobot yang sama. Berdasarkan dimensi SCP, persaingan usaha dikategorikan ke dalam persaingan usaha moderat hingga sedikit tinggi. Persaingan usaha dikategorikan menjadi persaingan usaha sedikit tinggi ketika menggunakan dimensi secara keseluruhan. Kemudian aspek perilaku merupakan dimensi yang dipersepsikan memiliki skor paling kecil yaitu 3.96 atau kurang dari 4. Masalah perilaku industri menjadi faktor yang mendorong indeks persaingan usaha ke arah moderat. Beberapa indikasi perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kartel terjadi pada tahun 2022. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi KPPU dan pengambil kebijakan untuk mendorong agar tercipta perilaku industri yang lebih kompetitif baik di daerah maupun di nasional.



Gambar 4.1. Indeks Persaingan Usaha Nasional

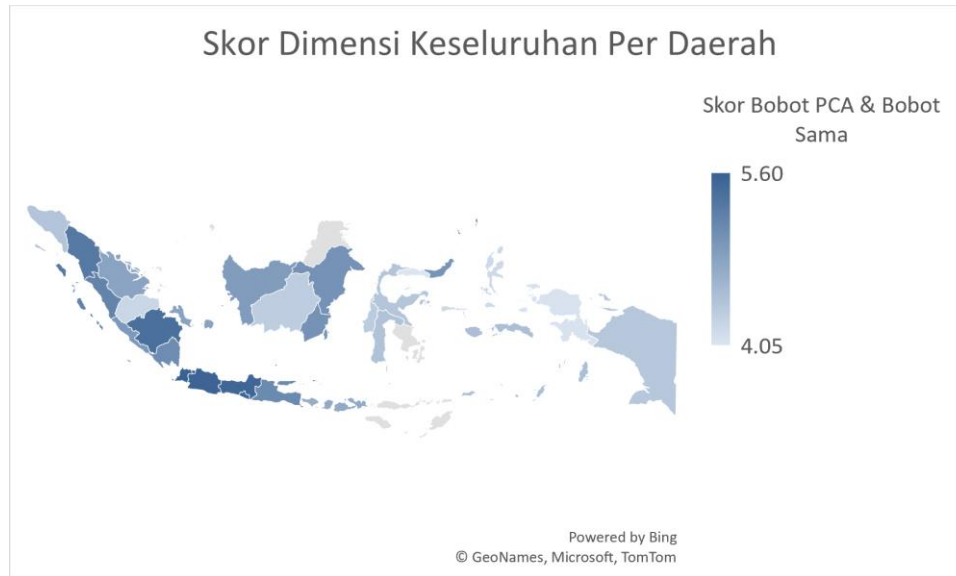
Tabel 4.3 menunjukkan perbandingan skor indeks persaingan usaha baik menggunakan dimensi keseluruhan maupun dimensi SCP. Dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.81 pada tahun 2021 menjadi 4.87 pada tahun 2022. Kemudian, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.36 pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.47 pada tahun 2022. Kemudian indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan dan bobot PCA mengalami kenaikan dari sebesar 4.67 pada tahun 2021 menjadi 4.85 pada tahun 2022. Selanjutnya, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.44 pada tahun 2021 menjadi 4.58 pada tahun 2022. Dari hasil tersebut terlihat bahwa secara umum indeks persaingan usaha mengalami kenaikan baik menggunakan indikator SCP maupun indikator keseluruhan.

Tabel 4.3. Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usah tahun 2021 dan Tahun 2022

Dimensi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP
Struktur	4.24	4.24	4.34	4.34	4.49	4.49	4.66	4.66
Perilaku	3.90	3.90	3.58	3.58	3.73	3.73	3.96	3.96
Kinerja	4.70	4.70	4.86	4.86	4.86	4.86	4.81	4.81
Regulasi	5.95		6.12		6.30		5.69	
<i>Demand</i>	4.35		4.06		4.15		4.55	
<i>Supply</i>	5.14		4.94		5.16		5.16	
Kelembagaan	4.74		4.61		4.96		5.23	
Skor Bobot Sama	4.72	4.23	4.65	4.26	4.81	4.36	4.87	4.47
Skor PCA	4.75	4.28	4.50	4.39	4.67	4.44	4.85	4.58

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan mengalami kenaikan pada hampir seluruh indikator dan dimensi menggunakan bobot sama maupun bobot PCA pada tahun 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah mulai kembali kepada normal kecuali pada aspek perilaku.

a. Indeks Pesaingan Usaha Daerah dan Sektoral Menggunakan Seluruh Dimensi
Skor Rata-Rata Dimensi Pesaingan Usaha Per Daerah



Gambar 4.2. Peta Pesaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

Gambar 4.2 dan Grafik 4.1 menunjukkan hasil indeks pesaingan usaha berdasarkan provinsi menurut persepsi para pemangku kepentingan (stakeholder) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat. Dari hasil skor indeks pesaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

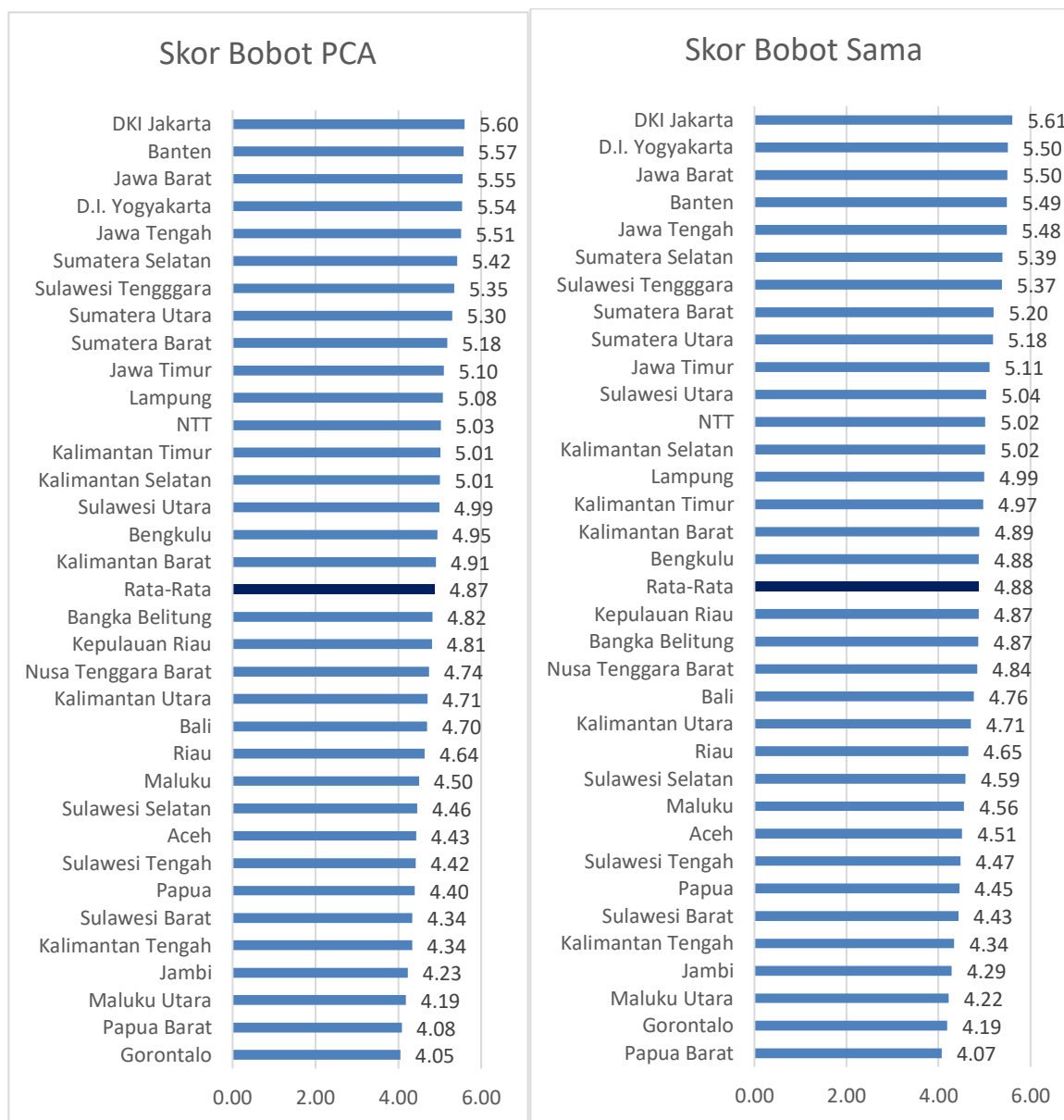
- Pesaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks pesaingan usaha yang terkategori dalam pesaingan sangat tinggi.
- Pesaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
Terdapat 3 provinsi dengan pesaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.
- Pesaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)
Terdapat 20 provinsi yang masuk dalam kategori pesaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan,

Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, dan Riau

- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
Terdapat sekitar 11 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.
- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah
- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memberikan kesimpulan yang sama meliputi Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat sebagai 3 provinsi dengan skor persaingan usaha tertinggi seluruh dimensi, baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama. Kemudian, dari Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA menghasilkan 17 provinsi yang berada diatas skor rata-rata dan 17 provinsi yang berada dibawah skor rata-rata.

Provinsi yang memiliki skor diatas rata-rata meliputi Provinsi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, NTT, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Bengkulu. Sedangkan, provinsi yang berada dibawah skor rata-rata meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.

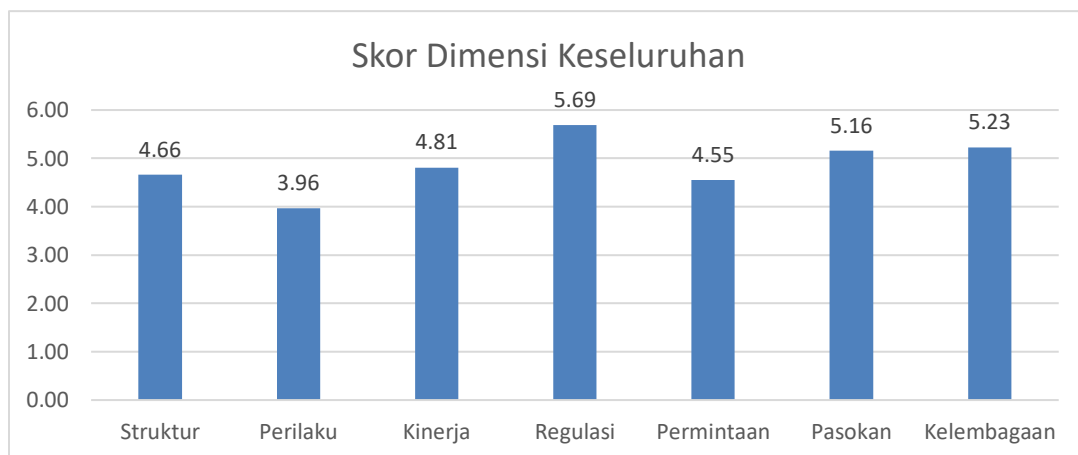


Grafik 4.1 Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot sama

Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Dimensi

Jika dilihat dari masing-masing dimensi (Grafik 4.2), dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi

persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.66, 3.96 dan 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat menguasai pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 5.69 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.

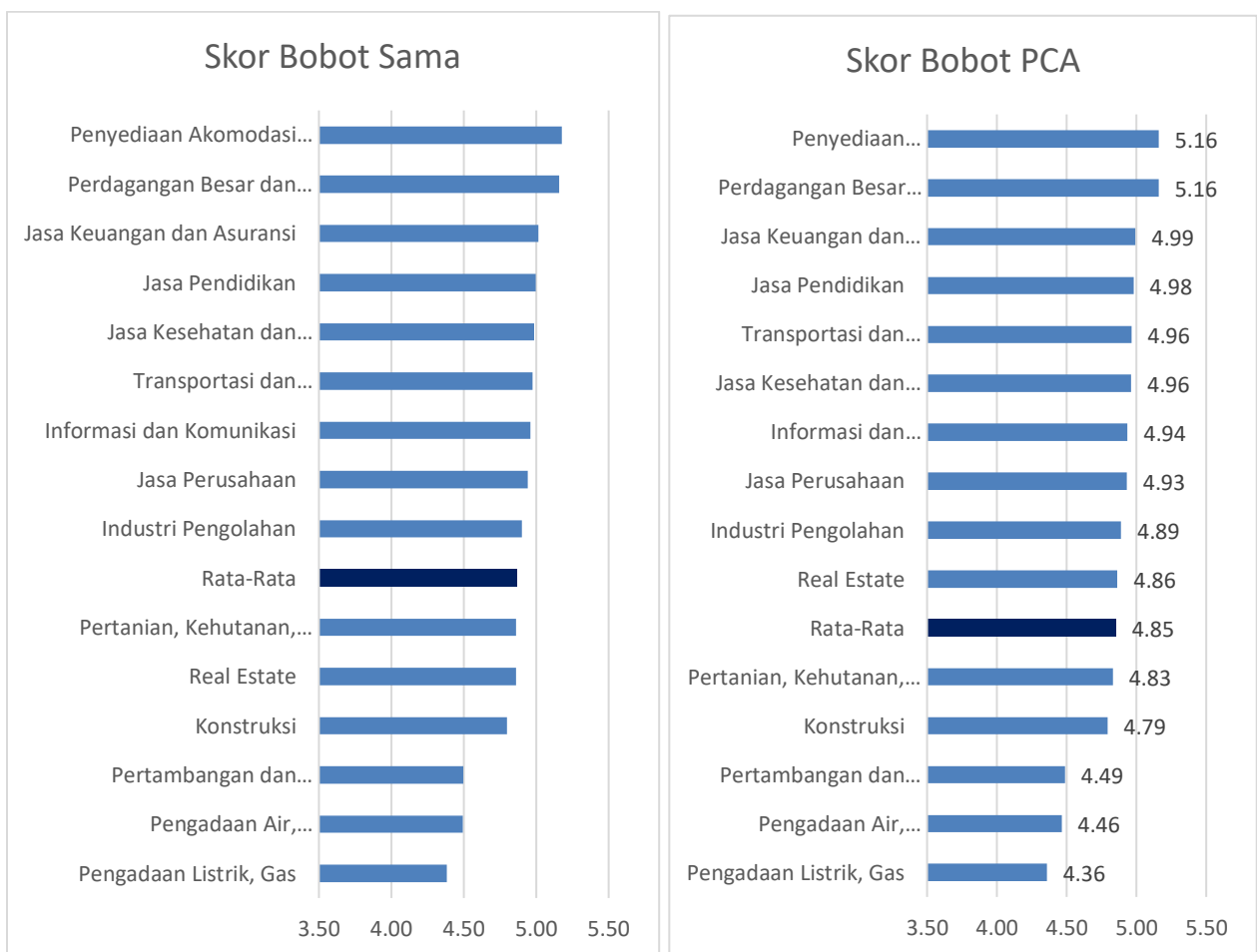


Grafik 4.2. Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

Hasil Indeks Persaingan Usaha Per Sektor

Berdasarkan Grafik 4.3 diketahui bahwa terdapat 10 sektor yang berada di atas rata-rata indeks dan 5 sektor yang berada dibawah rata-rata indeks. Berdasarkan kategori yang ada, indeks persaingan usaha sektoral hanya memiliki 2 kategori yakni berada dalam kategori sedikit tinggi dan moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang memiliki persaingan yang

sangat tinggi dan cukup tinggi, serta tidak terdapat juga sektor dengan persaingan yang sedikit rendah, cukup rendah dan sangat rendah. Sektor-sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha di atas rata-rata (menggunakan bobot sama dan PCA) di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi. Kemudian sektor-sektor yang berada konsisten di bawah nilai rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; real estate; konstruksi; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan; pengadaan listrik dan gas.



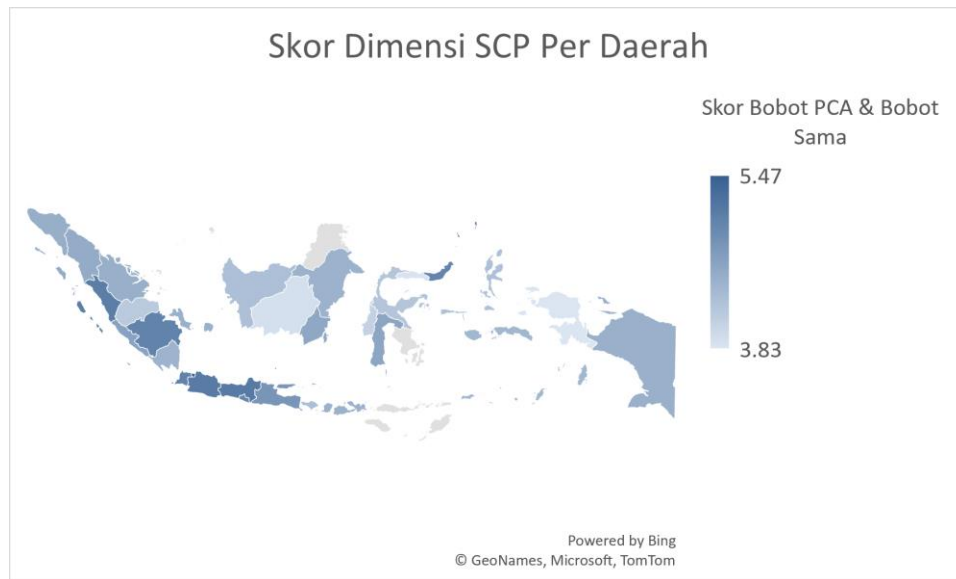
Grafik 4.3 Indeks Persaingan Usaha Sektoral

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 4.98 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan

jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektortersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 4.99. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

b. Analisis Indeks Persaingan Usaha berdasarkan Dimensi S-C-P

Indeks Persaingan Usaha Per Daerah



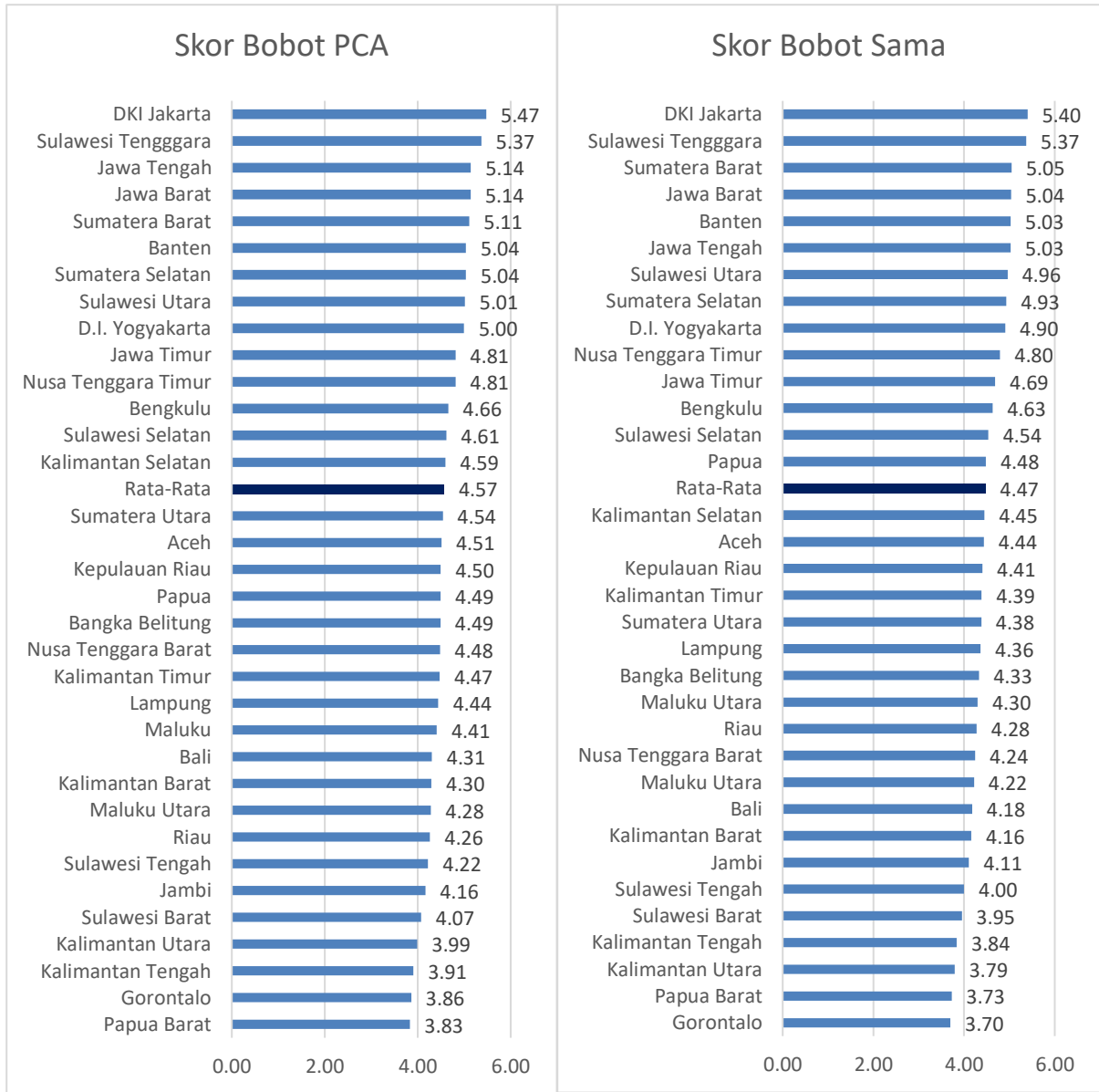
Gambar 4.3. Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia Berdasarkan S-C-P

Gambar 4.3 dan Grafik 4.4 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha hanya berdasarkan dimensi S-C-P untuk seluruh Provinsi yang menjadi objek studi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi S-C-P ialah sekitar 3.83-5.47 (bobot sama dan PCA) atau terkategori berada dalam kondisi persaingan yang moderat menuju persaingan cukup tinggi. Dari skor tersebut menunjukkan dari sisi struktur pasar, perilaku dan kinerja industri, secara umum persaingan usaha saat ini belum mengarah berada pada kondisi persaingan yang tinggi. Dari hasil skor indeks persaingan usaha dimensi SCP dengan bobot sama, diketahui kategori persaingan usaha untuk setiap Provinsi sebagai berikut:

- Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
Tidak ada provinsi dengan persaingan usaha cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama.
- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)
Terdapat 13 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan.
- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
Terdapat sekitar 21 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Papua, Kalimantan Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Maluku, Riau, NTB, Maluku Utara, Bali, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo.
- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah.
- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA memiliki beberapa kesimpulan yang sedikit berbeda dengan skor indeks persaingan usaha seluruh dimensi dan bobot sama. Sebagai contoh, jumlah provinsi yang termasuk ke dalam kelompok dengan persaingan usaha sedikit tinggi lebih banyak 4 provinsi menjadi 17 provinsi yaitu dengan penambahan Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan

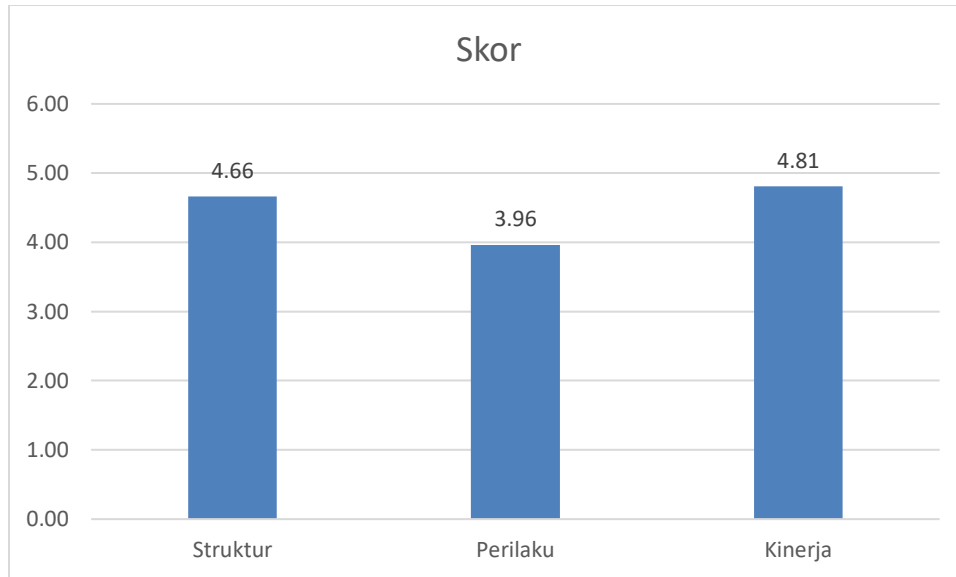
perbedaan bobot yang cukup besar antar dimensi SCP pada bobot menggunakan PCA.



Grafik 4.4 Skor Indeks Persaingan Usaha Per Provinsi Dimensi SCP Bobot PCA dan Bobot Sama

Indeks Persaingan Usaha Daerah per Dimensi

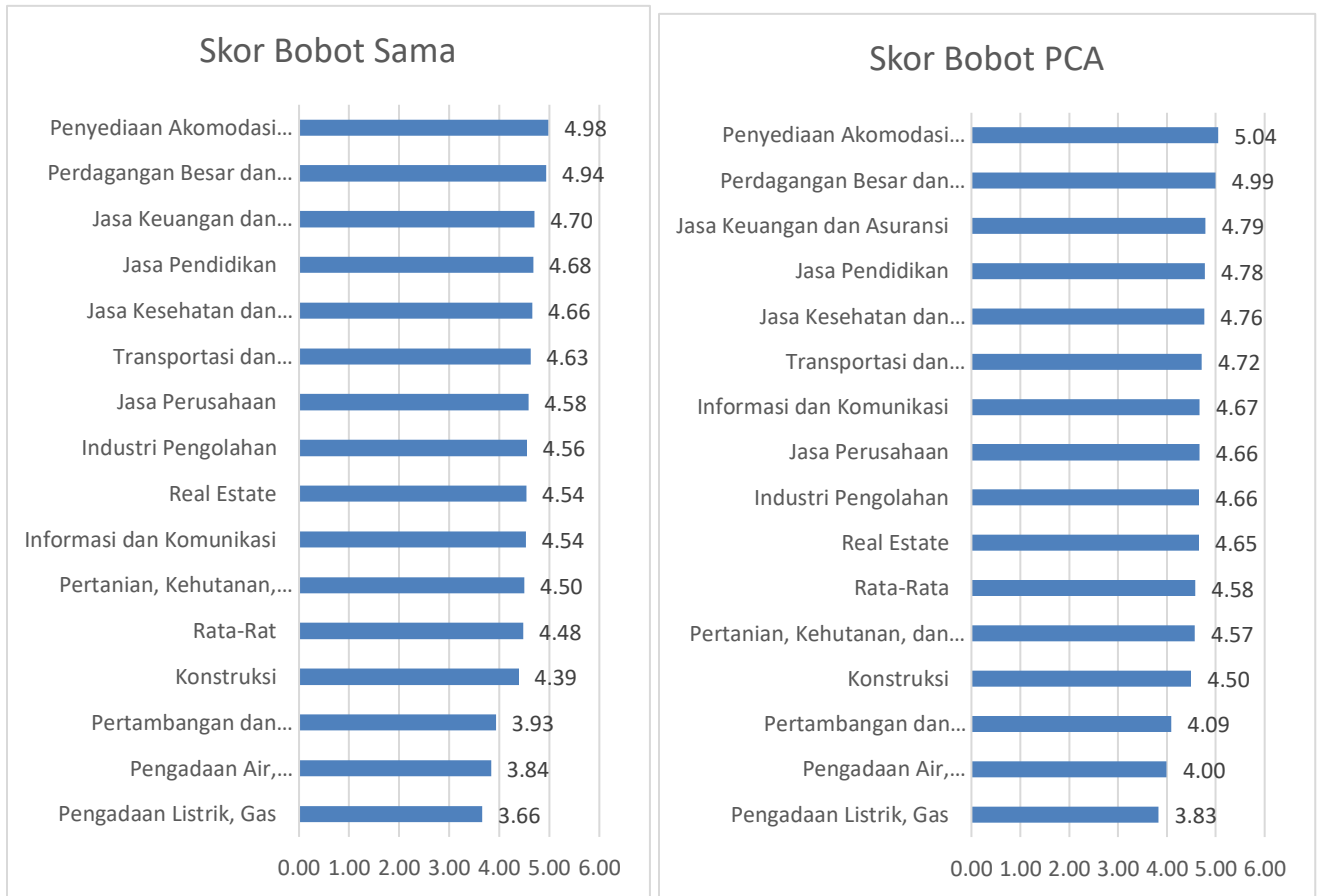
Dari sisi dimensi S-C-P, dimensi perilaku industri memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur pasar dan kinerja industri dengan masing-masing dimensi SCP memiliki skor sebesar 4.65, 3.96 dan 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.



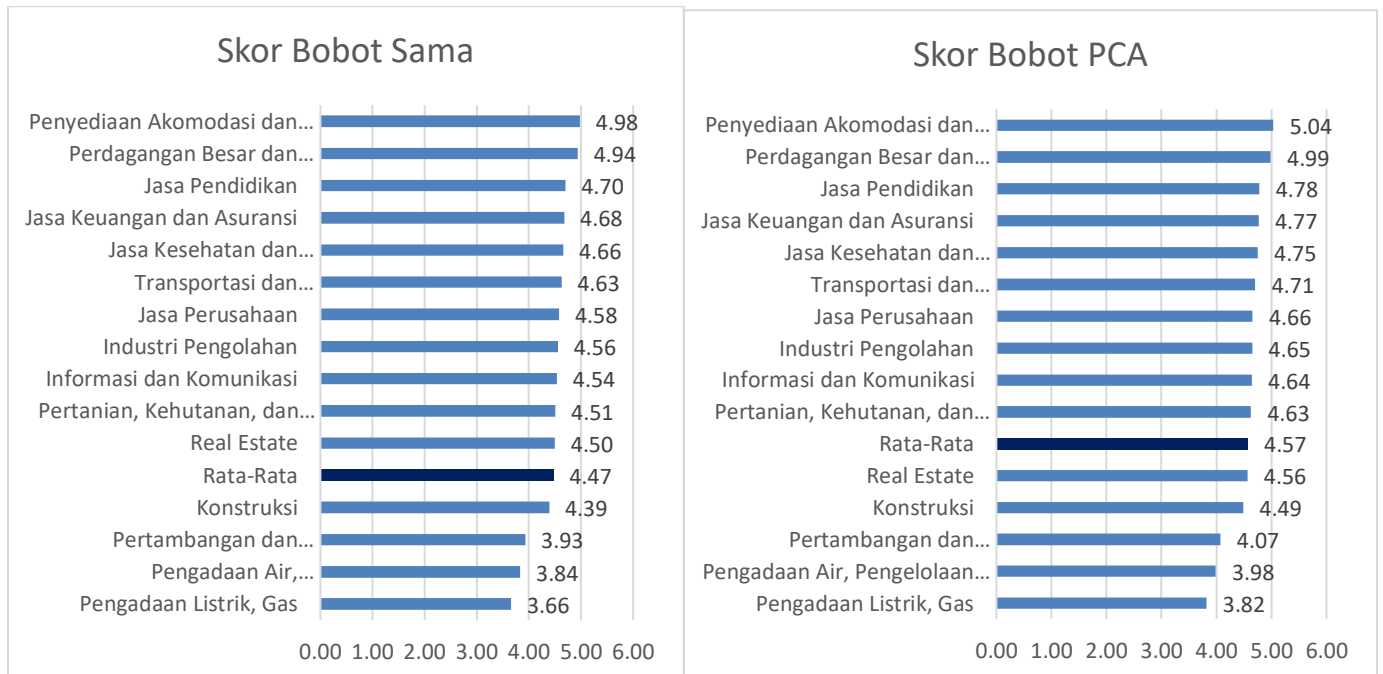
Grafik 4.5 Rata-rata dimensi persaingan usaha berdasarkan S-C-P

Berdasarkan Grafik 4.6, sektor yang memiliki persaingan tertinggi di atas rata-rata adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman (berdasarkan bobot PCA (5.04) dan bobot yang sama (4.98)). Meski memiliki skor terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi untuk masing-masing sektor tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha di sektor ini dan berkembangnya sektor lain seperti sektor pariwisata. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor dengan indeks tertinggi kedua tidak lepas dari perkembangan bisnis perdagangan yang meningkat dan jumlah pelaku usaha yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sama dengan tahun 2021 dan tahun 2020, Sektor yang pada umumnya dikuasi atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan skor indeks sekitar 3.83 (bobot PCA) dan 3.66 (bobot sama), serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah dengan skor 4.00 (bobot PCA) dan 3.84 (bobot sama). Sektor pertambangan dan penggalan juga memiliki skor yang relatif rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan masuk dalam industri pertambangan dan penggalan relatif tinggi, utamanya dari sisi regulasi, permodalan dan teknologi.

Indeks Persaingan Usaha Daerah per Sektor



Grafik 4.6 Indeks Persaingan Usaha Sektoral berdasarkan S-C-P



Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 4.98 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektortersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 4.99. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

4.2. Analisis Persaingan Usaha Per Provinsi

4.2.1. Provinsi Aceh

4.2.1.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.4 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Aceh berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Aceh terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi makan dan minum; 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan 3) Transportasi dan pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa pendidikan, 2) Jasa keuangan dan asuransi dan 3) Pengadaan air, pengeolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan listrik dan gas 3) Jasa perusahaan; 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan 10 sektor

dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, perhutanan, dan perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi makan minum; 7) Informasi dan komunikasi; 8) Jasa keuangan dan asuransi; 9) Real estate; dan 10) Jasa pendidikan.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Aceh. Sementara itu dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan seperti kesepakatan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Aceh relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya. Kemudian, seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Aceh.

Terkait kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender pada kegiatan umrah. Kemudian, seluruh responden turut menyatakan bahwa tidak ada aturan atau kebijakan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Aceh. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.4 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Aceh

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Aceh tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Transportasi dan pergudangan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jasa pendidikan 2) Jasa keuangan dan asuransi 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
10	Konsentrasi Rendah	

	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	50% responden menyatakan bahwa masih terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.	
Hambatan investasi	75% responden tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Aceh.	

Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada kasus permasalahan tender pada kegiatan umrah di Provinsi Aceh
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan dan kebijakan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Aceh.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.1.2. Indeks Persaingan Usaha

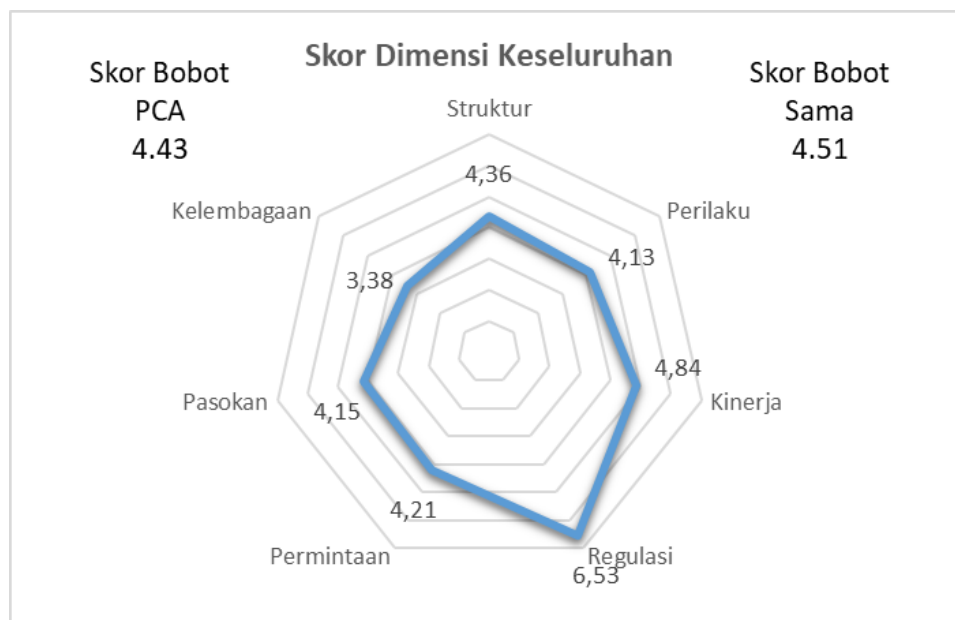
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,51 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,61. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kinerja, regulasi, penawaran, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.7 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Aceh tahun 2022 ini sebesar 4,43 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks

persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,51 dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.7 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,53. Sementara dimensi kelembagaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,38. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengarusutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah belum mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi di Provinsi Aceh.

Grafik 4.7. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Aceh Dimensi Keseluruhan



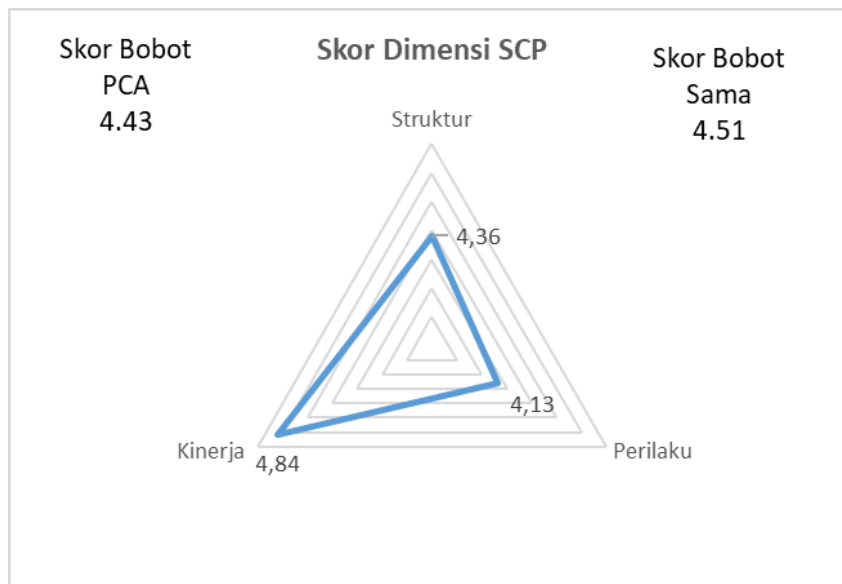
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.8 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Aceh hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Aceh

tahun 2022 ini sebesar 4,43 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,51 atau terkategori sedikit tinggi. Grafik 4.8 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,84. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,13. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Aceh ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Aceh masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.8. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Aceh Dimensi SCP



4.2.2. Provinsi Sumatera Utara

4.2.2.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.5 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara terkategori tinggi, yang didapatkan dari penyimpulan persepsi seluruh responden. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Jasa Pendidikan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) Transportasi dan pergudangan, dan 3) Pertambangan dan penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang memiliki jumlah pelaku usaha yang sedikit dan sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara atau daerah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, teknologi dan regulasi

Dilihat dari konsentrasi industri, tidak terdapat sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi. Kemudian terdapat 12 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6) Konstruksi; 7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 8) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 9) Informasi dan Komunikasi; 10) Jasa Keuangan dan Asuransi; 11) Jasa perusahaan; dan 12) Jasa pendidikan.. Sedangkan 3 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Transportasi dan Pergudangan ; 2) Real Estate; 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa menjawab sektor pertambangan dan penggalian untuk sektor yang memiliki keuntungan terbesar.

Sebagian besar responden juga menyatakan adanya hambatan investasi di Provinsi Sumatera Utara. Terkait kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender pada kegiatan umrah. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.5 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2. Penyediaan akomodasi dan makan minum 3. Jasa pendidikan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas 2. Transportasi dan pergudangan 3. Pertambangan dan penggalian 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Moderat

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menjawab sektor pertambangan dan penggalian untuk sektor yang memiliki keuntungan terbesar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena Sumatera Utara.
Hambatan investasi	75% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Sumatera Utara.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor kuliner.

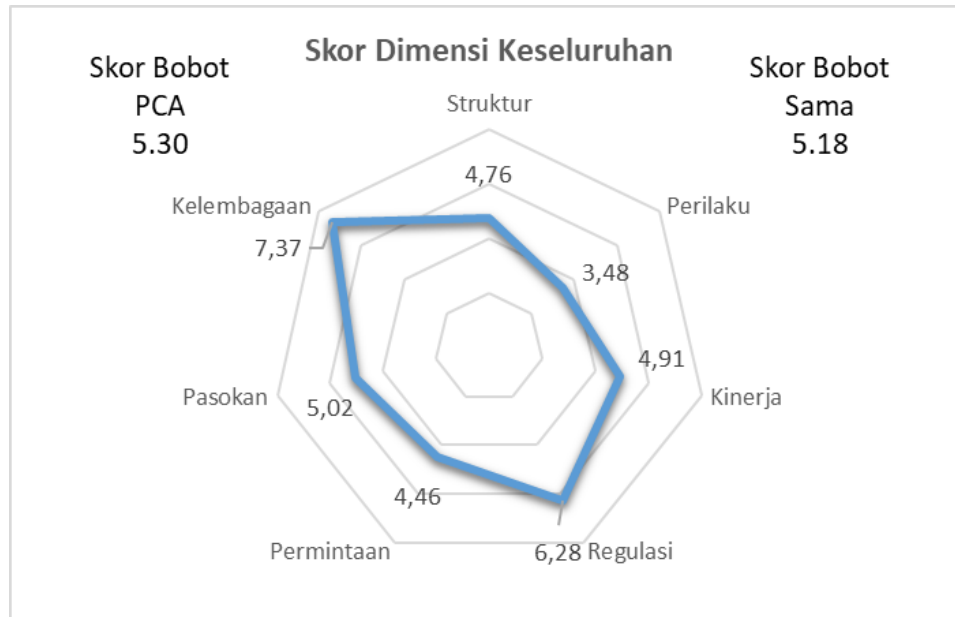
4.2.2. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,18 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,99. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi regulasi dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.9 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sumatera Utara tahun 2022 ini sebesar 5,30 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,18 dengan kategori yang sama. Grafik 4.9 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 7,37. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,48. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengarusutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi di Sumatera Utara.. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.9. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara Dimensi Keseluruhan



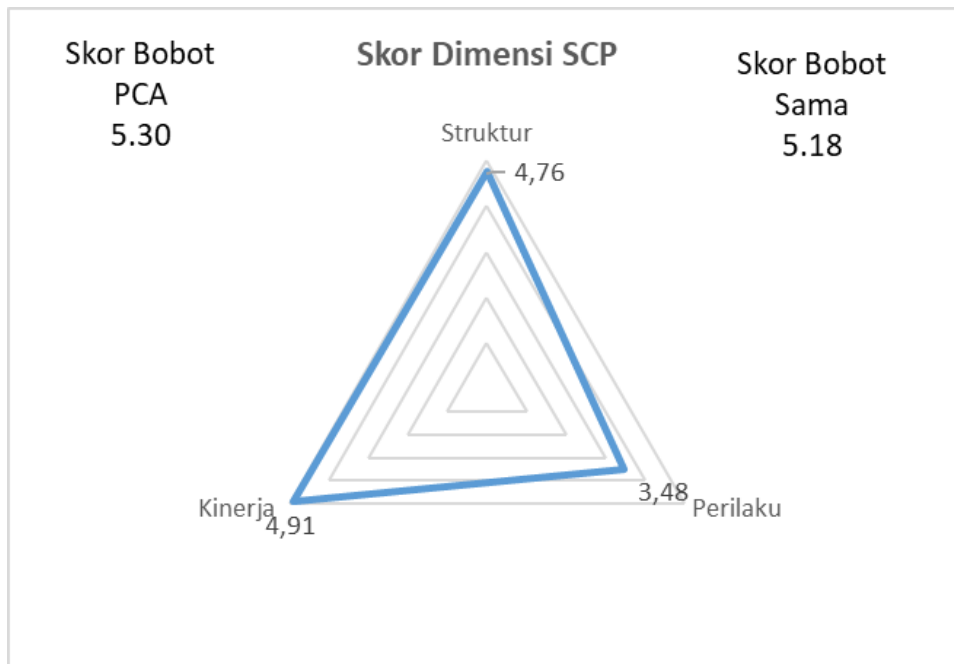
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.10 menunjukkan indeks persaingan usaha di Sumatera Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Utara tahun 2022 ini sebesar 5,30 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 5,18 dengan kategori yang sama. Grafik 4.10 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,91. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,48. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri yang ada di Sumatera Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Utara

masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.10. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara Dimensi SCP



4.2.3. Provinsi Sumatera Barat

4.2.3.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.6 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sumatera Barat terkategori tinggi, di mana sebagian responden menyatakan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik dan gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan 3) Real estate. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 12 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalan; 3) Industri pengolahan; 4) Pengadaan listrik, gas; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 8)

Informasi dan komunikasi; 9) Jasa keuangan dan asuransi; 10) Real estate; 11) Jasa pendidikan; 12) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 2) Konstruksi; dan 3) Jasa perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, seperti Perda yang tidak mengizinkan minimarket nasional beroperasi di Sumatera Barat. Sementara itu dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, dan transportasi dan pergudangan, merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, khususnya bahan pokok karena Sumatera Barat merupakan daerah pertanian. Sebagian besar responden juga menyatakan terdapat hambatan investasi di Sumatera Barat, dikarenakan adanya Tanah Ulayat yang menghambat perkembangan investasi. Untuk kasus persaingan usaha, 75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender walaupun layanan sudah berbasis elektronik.

Sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat Perda yang melarang didirikan Alfamart. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada *fashion*.

Tabel 4.6 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sumatera Barat tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3) Jasa Keuangan dan Asuransi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Real Estate 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat
5	Konsentrasi Rendah	

	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, seperti Perda Untuk Tidak diizinkan Alfamart dan Indomaret.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga.	

<p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p>	<p>Masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, dan transportasi dan pergudangan, merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p>
<p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p>	<p>100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, khususnya bahan pokok karena Sumatera Barat merupakan daerah pertanian.</p>
<p>Hambatan investasi</p>	<p>75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Sumatera Barat, dikarenakan adanya Tanah Ulayat yang menghambat perkembangan investasi.</p>
<p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p>	<p>75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender walaupun layanan sudah berbasis elektronik.</p>
<p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p>	<p>75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sumatera Barat. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat Perda yang melarang didirikan Alfamart.</p>

Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada <i>fashion</i> .
---	---

4.2.3. Indeks Persaingan Usaha

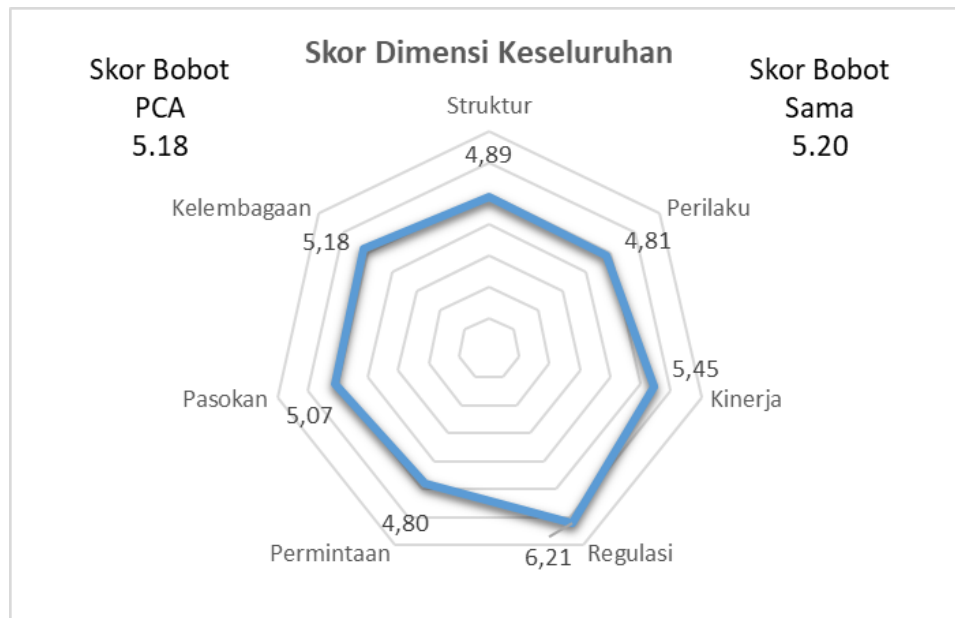
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,20 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,11. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, kinerja, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.11 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Barat tahun 2022 ini sebesar 5,18 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,20 dengan kategori yang sama. Grafik 4.11 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,21. Sementara dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,80. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa elastisitas permintaan dan pertumbuhan pasar relatif belum mampu berkontribusi besar

dalam penciptaan persaingan usaha yang tidak sehat. Dapat diartikan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi Sumatera Barat cenderung bersifat inelastis, dan relatif rendah sehingga menghasilkan permintaan yang relatif rendah.

Grafik 4.11. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat Dimensi Keseluruhan



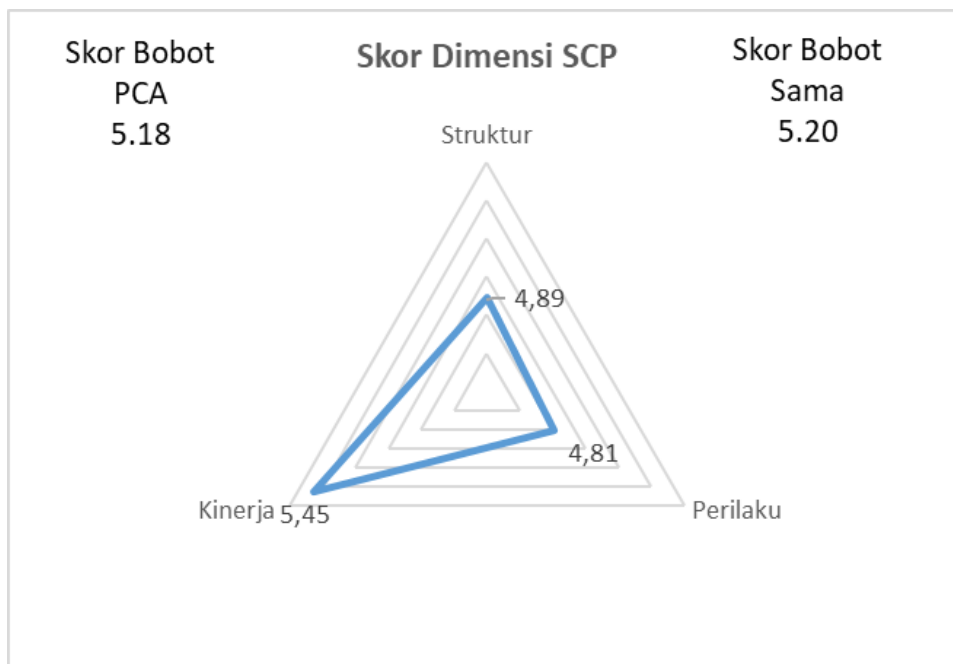
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.12 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Barat tahun 2022 ini sebesar 5,18 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,20 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.12 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,45. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,81. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sumatera Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa perusahaan-

perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.12. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Barat Dimensi SCP



4.2.4. Provinsi Riau

4.2.4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.7 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Riau berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Riau terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Jasa keuangan dan asuransi; 2) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3) Transportasi dan pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya variasi produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Industri pengolahan; 2) Pertambangan dan penggalian, dan 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Real estate; dan 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Transportasi dan Pergudangan; dan 4) Penyediaan akomodasi dan

makan minum; dan 5) Informasi dan komunikasi; 6) Jasa keuangan dan asuransi; dan 7) Jasa pendidikan. Sedangkan, 4 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Industri pengolahan; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3) Konstruksi; dan 4) Jasa perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Riau. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, Seluruh responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Riau relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Riau, dikarenakan adanya masalah perizinan. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Riau. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Riau. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden, khususnya di sektor kuliner dan *fashion*.

Tabel 4.7 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Riau

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Riau tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jasa Keuangan dan Asuransi 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3) Transportasi dan pergudangan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Pertambangan dan penggalian 3) Real estate 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Tinggi
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Rendah
6	Konsentrasi Rendah	

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Tinggi
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Tinggi
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Seluruh responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di Provinsi Riau, dikarenakan adanya masalah perizinan.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Riau.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di bidang kuliner dan <i>fashion</i> .

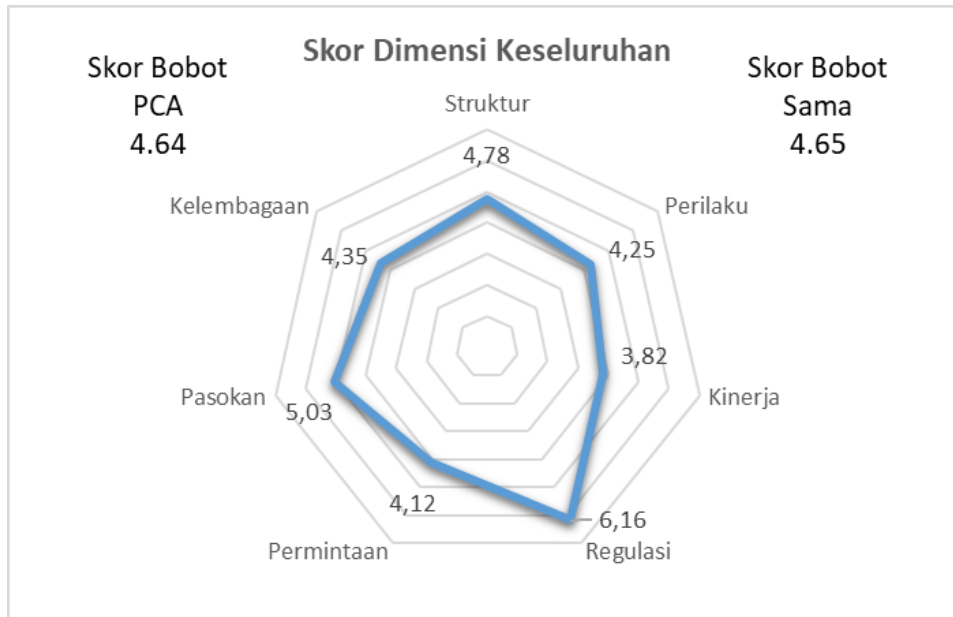
4.2.4. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Riau dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,65 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,56. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, regulasi, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.13 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Riau dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Provinsi Riau tahun 2022 ini sebesar 4,64 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,65 dengan kategori yang sama. Grafik 4.13 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,16. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,82. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kinerja menunjukkan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.13. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Riau Dimensi Keseluruhan



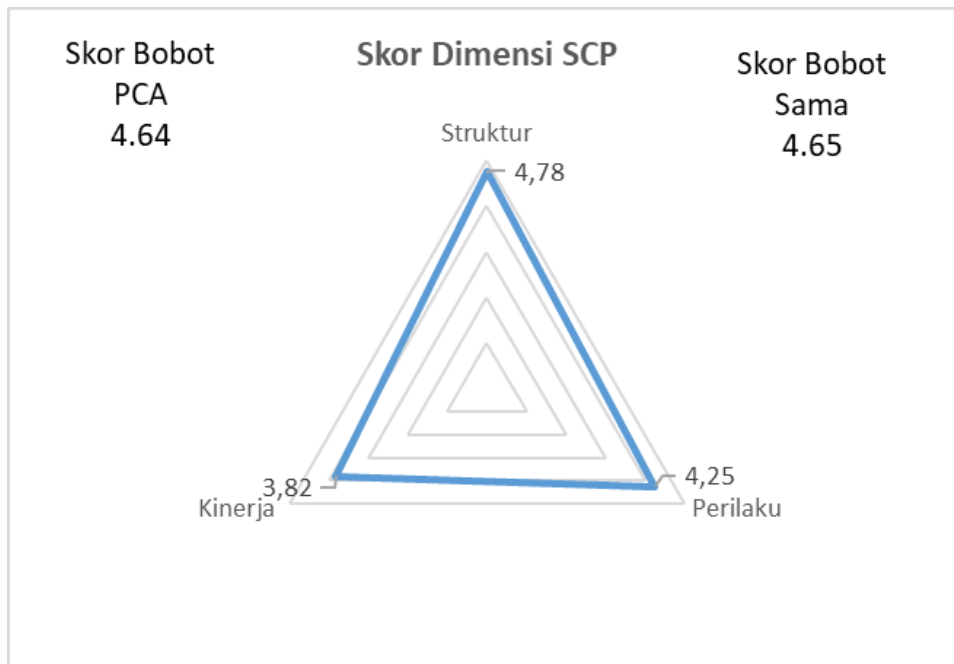
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.14 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Riau hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Riau tahun 2022 ini sebesar 4,64 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,65 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.14 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,78. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,82. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Riau ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, dimensi kinerja dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Riau masih relatif berperilaku

yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.14. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Riau Dimensi SCP



4.2.5. Provinsi Jambi

4.2.5.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.8 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Jambi berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jambi terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) Pertambangan dan Pengalihan, dan 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah dan terdapat hambatan yang tinggi bila memasuki sektor tersebut.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; dan 2) Pengadaan Air Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat

2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 2) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi Pergudangan; 7) Jasa keuangan dan asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; dan 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jambi. Sedangkan, sebagian kecil responden menyatakan terdapat hambatan yang disebabkan oleh resistensi masyarakat berupa kepemilikan lahan dan pembebasan lahan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Sisanya menyatakan bahwa masih adanya kesepakatan harga yang dilakukan asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, imbah dan daur ulang merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jambi relatif sama dibanding daerah sekitar. Kemudian, seluruh responden menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Jambi. Platform belanja digital (*marketplace*, *e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.8 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jambi

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Jambi tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi

Pertanyaan	Deskripsi	
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat	

Pertanyaan	Deskripsi
	dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama tidak lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar (relatif sama).
Hambatan investasi	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Jambi
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jambi.

Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.
---	---

4.2.5. Indeks Persaingan Usaha

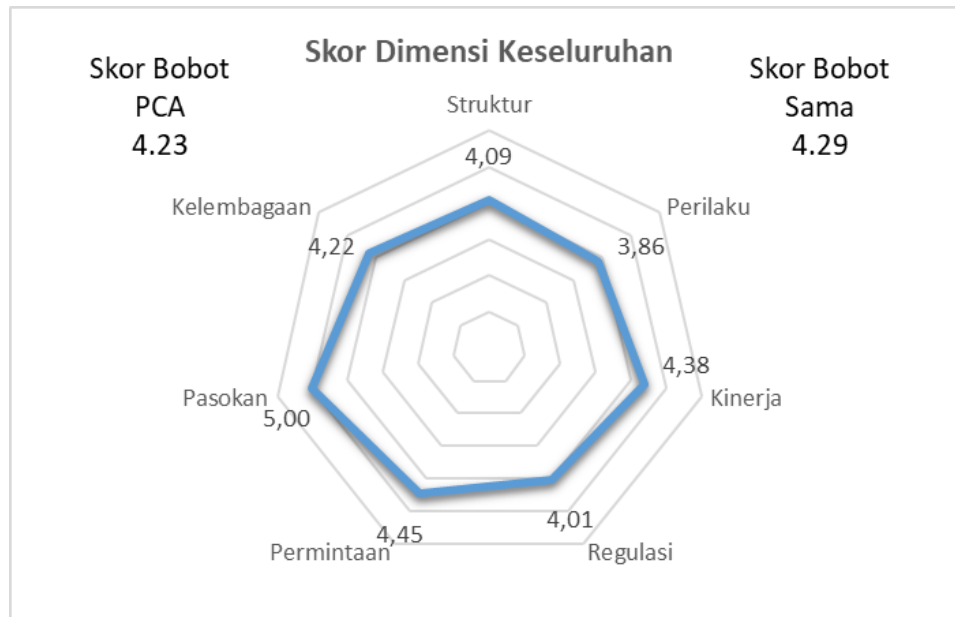
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,29 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,99. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kinerja, regulasi, penawaran, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.15 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jambi tahun 2022 ini sebesar 4,23 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,29 dengan kategori yang sama. Grafik 4.15 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,00. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,86. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dimensi pasokan industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.. Sementara itu, rendahnya dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan

harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.15. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jambi Dimensi Keseluruhan



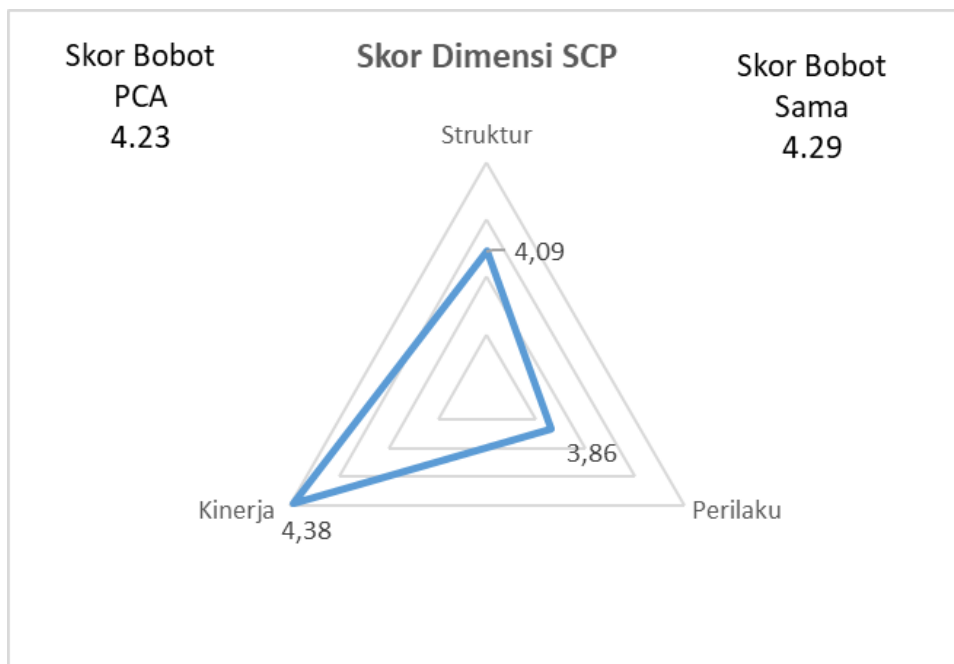
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.16 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jambi tahun 2022 ini sebesar 4,23 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,29 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.16 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besarnya kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,38. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,86. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Jambi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang

relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan keuntungan yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jambi masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.16. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jambi Dimensi SCP



4.2.6. Provinsi Sumatera Selatan

4.2.6.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.9 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum terdapat sebagian responden yang menyatakan bahwa persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan terkategori tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Akomodasi dan Makan Minum; 2) Informasi dan Komunikasi, dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pengadaan listrik, gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, seluruh sektor dipersepsikan terkonsentrasi rendah yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas; 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 6) Konstruksi; 7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 8) Transportasi

dan pergudangan; 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 10) Informasi dan Komunikasi; 11) Jasa keuangan dan asuransi; 12) Real estate; 13) Jasa perusahaan; 14) Jasa pendidikan; dan 15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, utamanya produk-produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah sekitarnya. Kemudian, seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.9 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan

Pertanyaan	Deskripsi
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan tinggi.

Pertanyaan	Deskripsi	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	1) Akomodasi dan Makan Minum 2) Informasi dan Komunikasi 3) Pertambangan dan Penggalian	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3) Pengadaan Listrik dan Gas	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Rendah
	5	Konsentrasi Rendah
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

<p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p>	<p>50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.</p>
<p>Hambatan investasi</p>	<p>100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.</p>
<p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p>	<p>75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.</p>
<p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p>	<p>100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan.</p>
<p>Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha</p>	<p>100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.</p>

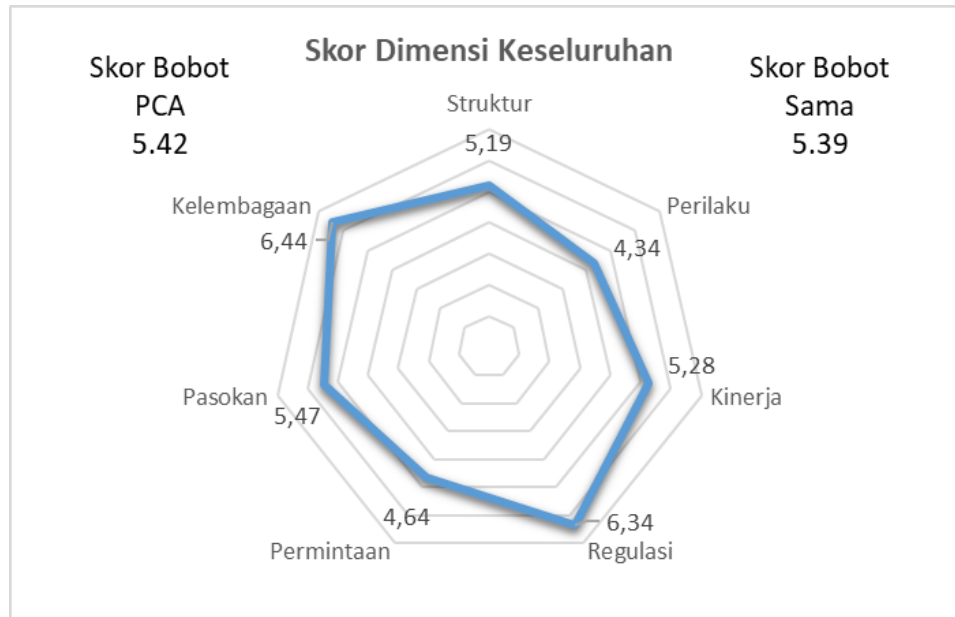
4.2.6. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,39 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,92. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.17 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sumatera Selatan tahun 2022 ini sebesar 5,42 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,39 dengan kategori yang sama. Grafik 4.17 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,44. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengaruh keutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.17. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Dimensi Keseluruhan



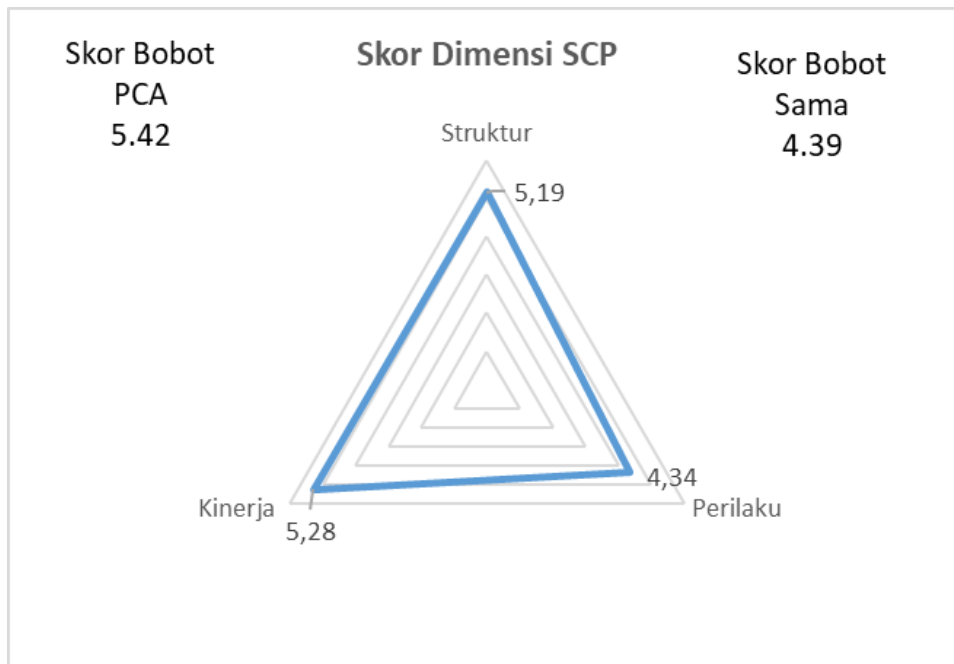
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.18 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sumatera Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sumatera Selatan tahun 2022 ini sebesar 5,42 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,39 atau dalam kategori moderat. Grafik 4.18 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,28. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,34. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi ini kurang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sumatera Selatan

masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.18. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Dimensi SCP



4.2.7. Provinsi Bengkulu

4.2.7.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.10 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bengkulu terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Jasa keuangan dan asuransi, dan 3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan 3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 11 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan 2) Pertambangan dan penggalan; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik, Gas; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Konstruksi; 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor; 8) Transportasi dan Pergudangan; 9) Informasi dan Komunikasi; 10) Real Estate; dan 11) Jasa Perusahaan. Kemudian, terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) Jasa keuangan dan asuransi; 3) Jasa pendidikan; dan 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, sebagian besar responden menyatakan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan pertambangan dan penggalian memiliki keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti beras, cabai, telur, bawang dan sayur serta bahan pokok lainnya. Satu responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Bengkulu, dikarenakan adanya peraturan daerah yang tidak tertulis, dan ketidakpastian pemerintah.

Seluruh responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Bengkulu. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bengkulu. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor kuliner.

Tabel 4.10 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisipersaingan usaha di Bengkulu tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 2) Jasa keuangan dan asuransi. 3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik, Gas. 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat

	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Moderat
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	75% responden menyatakan bahwa Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Sedangkan satu responden menyatakan pertambangan dan penggalian memiliki keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti beras, cabai, telur, bawang dan sayur serta bahan pokok lainnya
Hambatan investasi	25% responden terdapat hambatan investasi di Bengkulu, dikarenakan adanya peraturan daerah yang tidak tertulis, dan ketidakpastian pemerintah.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bengkulu.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner.

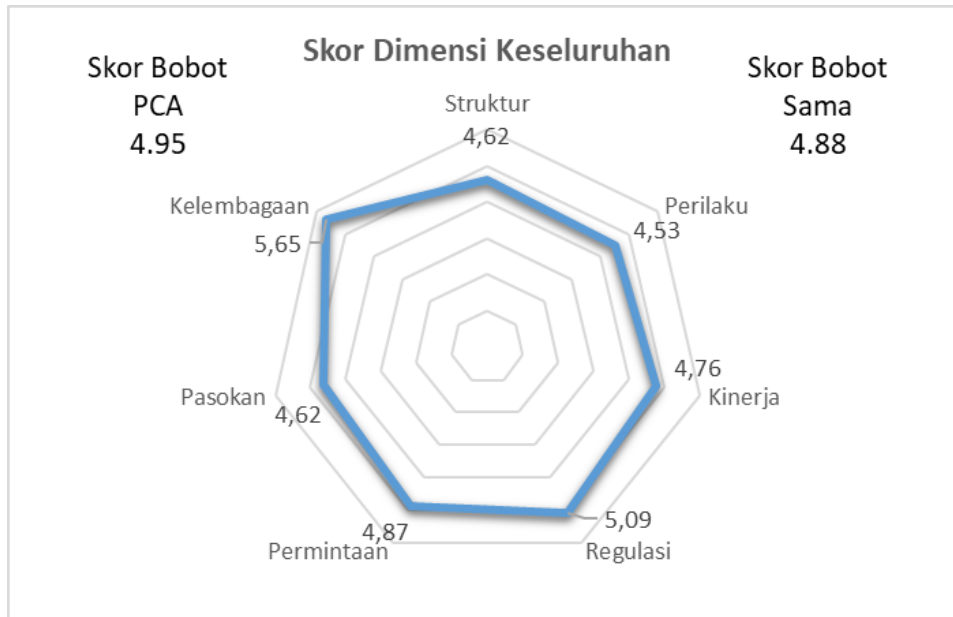
4.2.7. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,88 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,53. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.19 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bengkulu tahun 2022 ini sebesar 4,95 atau sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,88 atau dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.19 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,53. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengaruh keutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bengkulu masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.19. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu Dimensi Keseluruhan

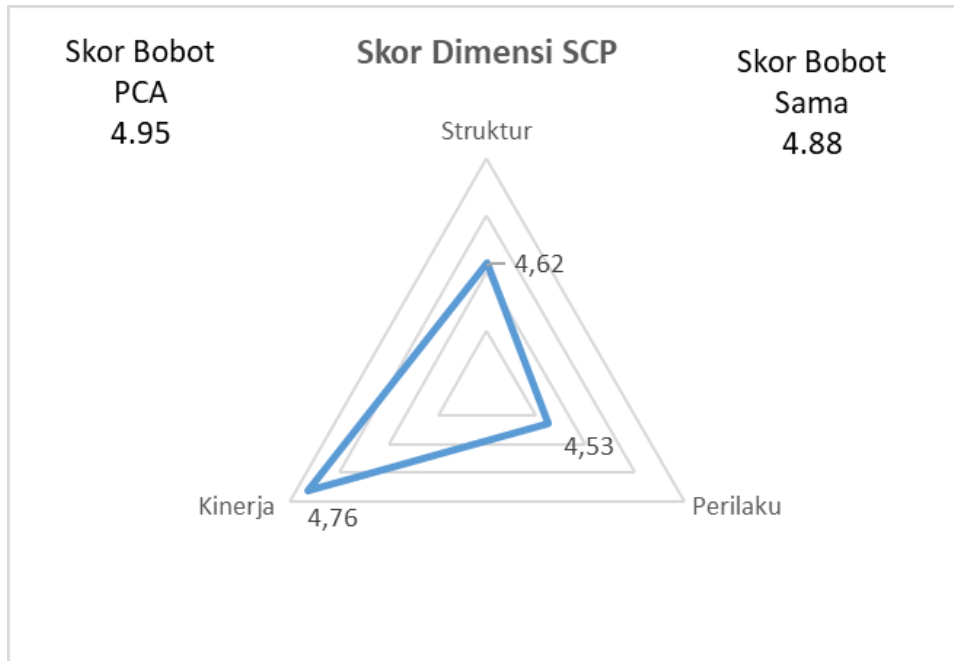


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.20 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bengkulu hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bengkulu tahun 2022 ini sebesar 4,95 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,88 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.20 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,76. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,53. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bengkulu ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bengkulu masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.20. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bengkulu Dimensi SCP



4.2.8. Provinsi Lampung

4.2.8.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.11 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Lampung berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Lampung terkategori tinggi, di mana seluruh responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan 3) Jasa pendidikan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga memersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Transportasi dan Pergudangan. Kemudian, terdapat 13 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; dan 4) Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5) Konstruksi; 6) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Informasi dan Komunikasi; 9) Jasa Keuangan dan Asuransi; 10) Real estate; 11) Jasa Perusahaan; 12) Jasa Pendidikan; dan 13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Lampung. Sedangkan, satu responden menyatakan bahwa terdapat hambatan berupa permodalan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa real estate merupakan sector dengan keuntungan terbesar, sisanya masing-masing responden menyatakan bahwa informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Lampung relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Lampung. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan berupa birokrasi. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.

Seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Lampung. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya pada *fashion*.

Tabel 4.11 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Lampung

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Lampung tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. 2) Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman. 3) Jasa Pendidikan. 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas. 2) Pertambangan dan Penggalian. 3) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Rendah
	6	Konsentrasi Rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, satu responden menyatakan bahwa terdapat hambatan berupa permodalan.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa real estate merupakan sector dengan keuntungan terbesar, sisanya masing-masing responden menyatakan bahwa informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Lampung. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan berupa birokrasi.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Lampung.

Pertanyaan	Deskripsi
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di bidang <i>fashion</i> .

4.2.8. Indeks Persaingan Usaha

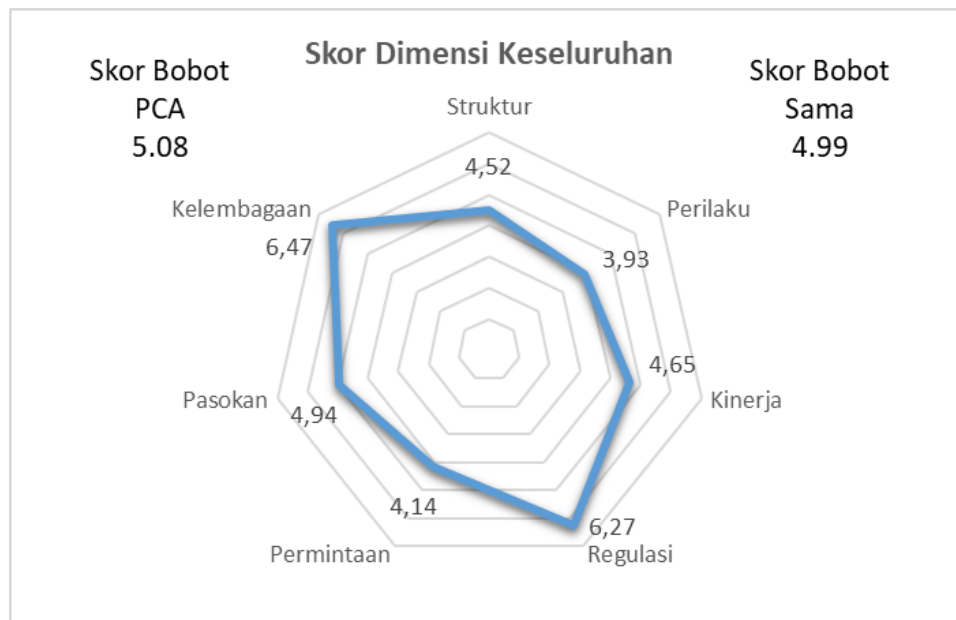
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,99 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,18. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, permintaan, dan penawaran.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.21 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Lampung tahun 2022 ini sebesar 5,08 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,99 dengan kategori yang sama. Grafik 4.21 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,47. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,93. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong

terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Lampung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.21. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Lampung Dimensi Keseluruhan



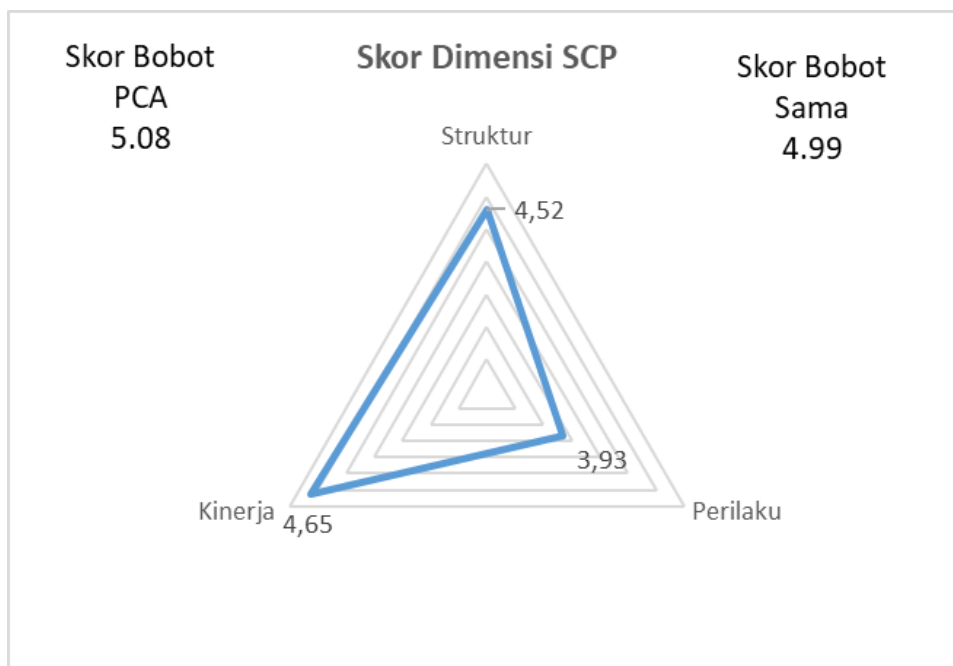
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.22 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Lampung hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Lampung tahun 2022 ini sebesar 5,08 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,99 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.22 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah

sebesar 3,93. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja industri yang ada di Provinsi ini mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Lampung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.22. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Lampung Dimensi SCP



4.2.9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.2.9.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.12 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Bangka Belitung berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bangka Belitung terkategori tinggi, di mana seluruh responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2) Industri pengolahan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Jasa perusahaan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pertambangan dan Pengalihan; dan 2) Pengadaan listrik, gas. Kemudian, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang; dan 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Untuk sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah ada 11, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6) Informasi dan komunikasi; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; dan 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan melalui asosiasi. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, seluruh responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Bangka Belitung relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, misalnya hasil laut. Seluruh responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Bangka Belitung, dikarenakan adanya resitensi masyarakat. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.

Seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bangka Belitung. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya UMKM.

Tabel 4.12 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Bangka Belitung tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Industri Pengolahan 3) Penyediaan Akomodasi dan makan minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3) Jasa Perusahaan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
5	Konsentrasi Moderat	

	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan melalui asosiasi.	

Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	100% responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalan merupakan sector dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, misalnya hasil laut.
Hambatan investasi	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Bangka Belitung, dikarenakan adanya resitensi masyarakat. Sedangkan, sisanya menyatakan bahwa tidak ada hambatan investasi di Provinsi ini.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bangka Belitung.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya UMKM.

4.2.9. Indeks Persaingan Usaha

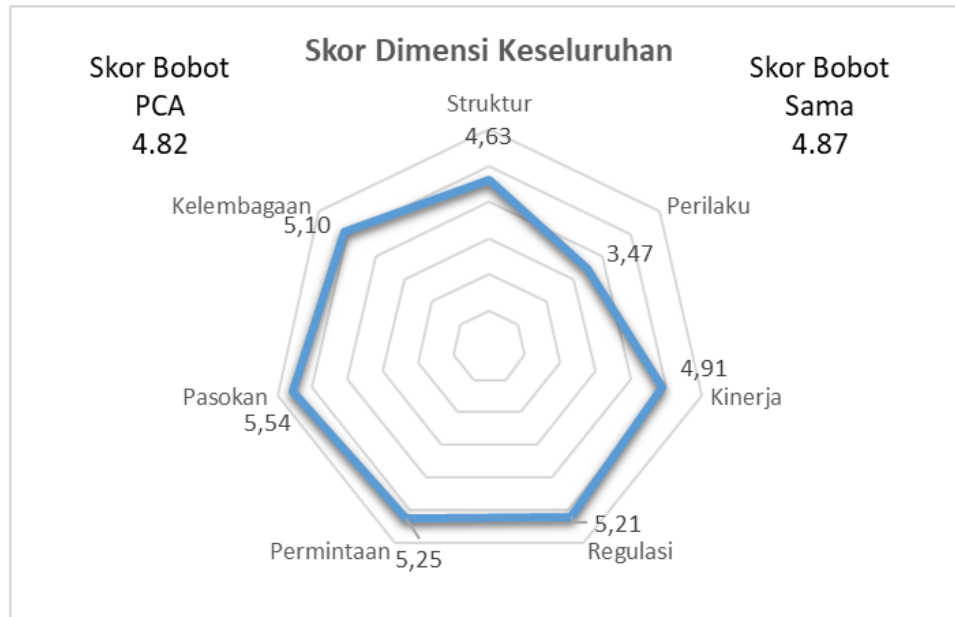
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,87 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,48. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kinerja, regulasi, penawaran, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.23 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bangka Belitung tahun 2022 ini sebesar 4,82 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,87 dengan kategori yang sama. Grafik 4.23 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,54. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,47. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasokan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bangka Belitung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.23. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bangka Belitung Dimensi Keseluruhan



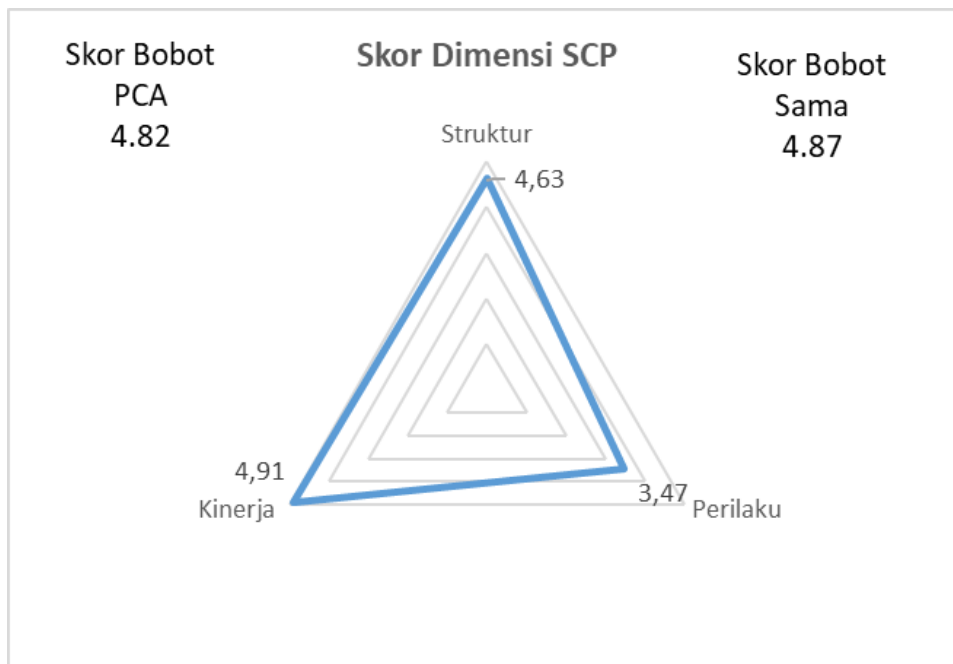
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.24 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bangka Belitung hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bangka Belitung tahun 2022 ini sebesar 4,82 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini sebesar 4,87 atau dengan kategori sama. Grafik 4.24 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,91. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,47. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bangka Belitung ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien,

memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bangka Belitung masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.24. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bangka Belitung Dimensi SCP



4.2.10. Provinsi Kepulauan Riau

4.2.10.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.13 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kepulauan Riau terkategori tinggi, di mana Sebagian besar responden merepresentasikan hal tersebut. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Informasi dan Komunikasi, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1)

Pertambangan dan Penggalian; dan 2) Industri Pengolahan; dan 3) Informasi dan komunikasi. Untuk sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah ada 10, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan; 9) Jasa Pendidikan; 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, Sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau lebih mahal dibanding daerah sekitar, dikarenakan produk yang disediakan dipasok dari daerah lain, seperti faktor geografis yang menyebabkan tambahan *cost* pengangkutan dan bukan sebagai daerah produksi. Mengenai hambatan investasi, Sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kep. Riau. Sedangkan, sisanya menyatakan ada konsistensi UU dan peraturan daerah yang berubah-ubah. Seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kepulauan Riau. Kemudian, seluruh responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner.

Tabel 4.13 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kep. Riau tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan 2) Informasi dan Komunikasi 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3) Informasi dan Komunikasi 	
	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi

Rata-rata Konsentrasi Industri*)	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

<p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p>	<p>Masing-masing responden menyatakan bahwa, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p>
<p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p>	<p>100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain, seperti faktor geografis yang menyebabkan tambahan <i>cost</i> pengangkutan dan bukan sebagai daerah produksi.</p>
<p>Hambatan investasi</p>	<p>75% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kep. Riau. Sedangkan, sisanya menyatakan ada konsistensi UU dan peraturan daerah yang berubah-ubah.</p>
<p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p>	<p>100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kepulauan Riau.</p>

Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya kuliner.
---	--

4.2.10. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,88 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,82. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi regulasi, penawaran, dan permintaan.

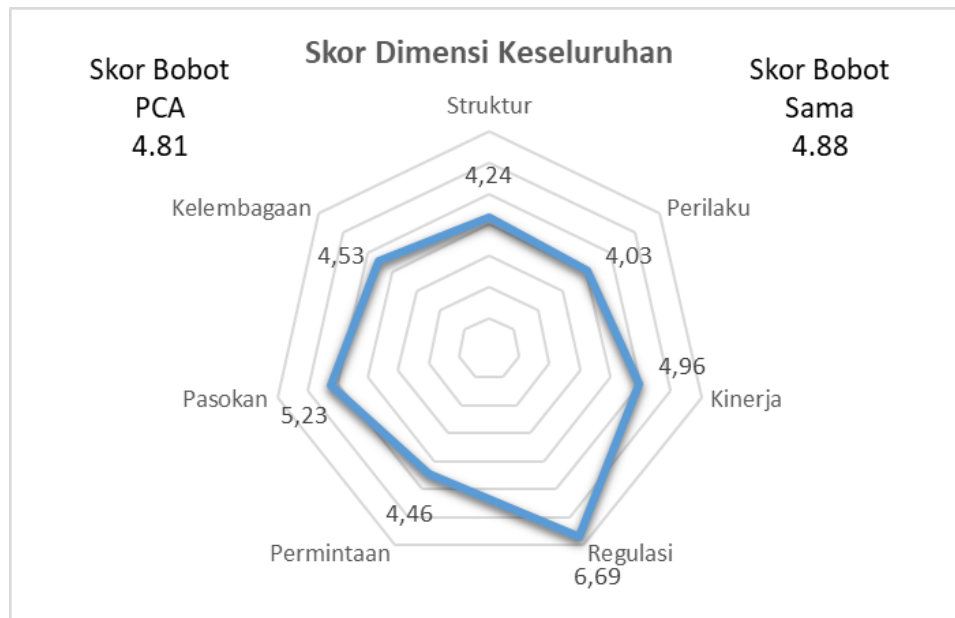
- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.25 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kepulauan Riau tahun 2022 ini sebesar 4,81 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,88 dengan kategori yang sama. Grafik 4.25 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,69. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kepulauan Riau masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti

pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.25. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Dimensi Keseluruhan



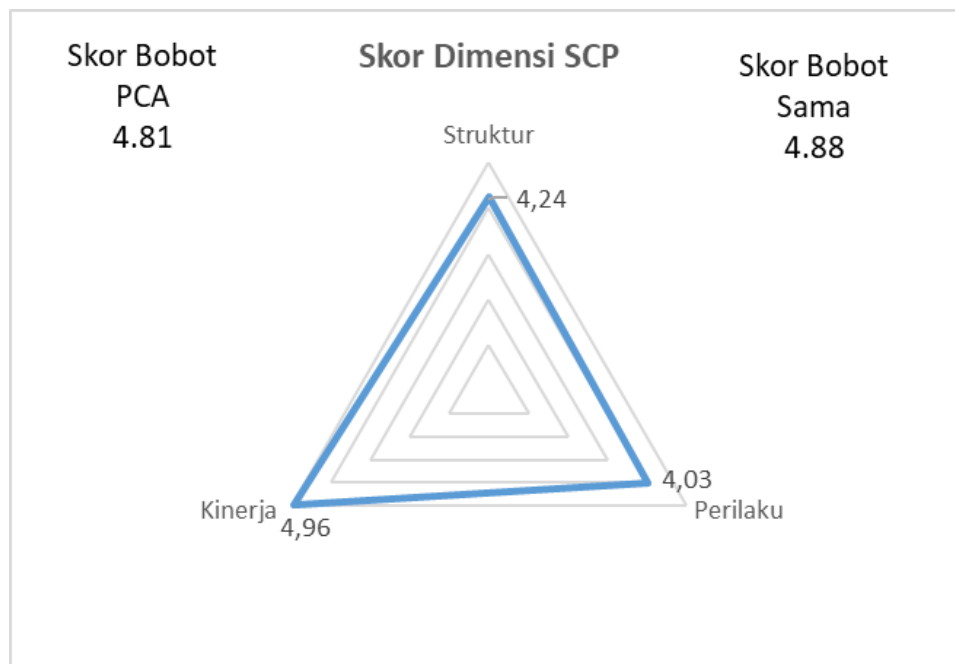
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.26 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kepulauan Riau tahun 2022 ini sebesar 4,81 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,88 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.26 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,96. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kepulauan Riau ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan

bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kepulauan Riau masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.26. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Dimensi SCP



4.2.11. Provinsi DKI Jakarta

4.2.11.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.14 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Informasi dan Komunikasi, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2) Pertambangan dan Penggalan, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti penyedia layanan kesehatan dan keuangan yang membutuhkan modal cukup besar. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Konstruksi. Kemudian terdapat 13 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 7) Transportasi dan Pergudangan; 8) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 9) Informasi dan Komunikasi; 10) Real Estate; 11) Jasa Perusahaan; 12) Jasa Pendidikan; 13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 1 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan di Provinsi DKI Jakarta masih sulit dalam mendapatkan izin dan pembiayaan serta penerimaan modal. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar asosiasi dan pemerintah.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Kemudian, sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi terdapat satu responden yang menyatakan bahwa perizinan yang sulit menjadi hambatan dalam berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu responden menyatakan bahwa industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor ini menyediakan kebutuhan sehari-hari sehingga dan merupakan sektor yang banyak masyarakat konsumsi selama pandemi Covid-19. Untuk kasus persaingan usaha, 2 responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha sementara 2 responden lainnya menyatakan terdapat

kasus permasalahan tender. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dan sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.14 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di DKI Jakarta tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2) Informasi dan Komunikasi 3) Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Jasa Keuangan dan Asuransi 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat

	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Tinggi
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar yaitu dalam mendapatkan izin dan pembiayaan serta penyediaan modal.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa masih terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar asosiasi dan pemerintah.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	75% responden menyatakan bahwa industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor ini menyediakan kebutuhan sehari-hari sehingga banyak masyarakat yang mengonsumsi.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	75% responden tidak terdapat hambatan investasi di DKI Jakarta.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha sedangkan 50% responden lainnya menjawab terdapat kasus permasalahan tender.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di DKI Jakarta.

Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.
---	--

4.2.12. Indeks Persaingan Usaha

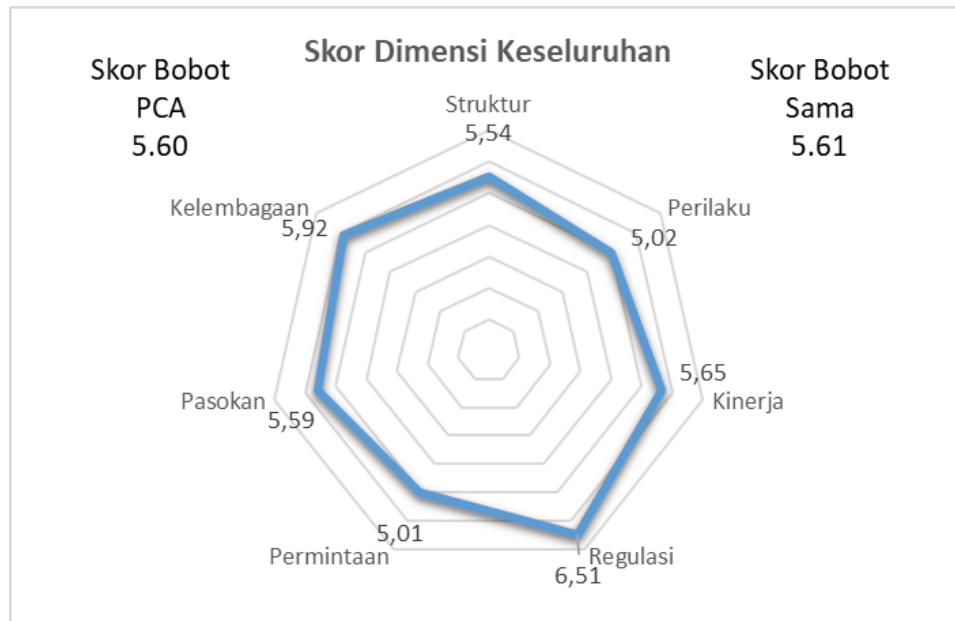
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,61 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,41. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kinerja, penawaran, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.7 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha DKI Jakarta tahun 2022 ini sebesar 5,60 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,61 dengan kategori yang sama. Grafik 4.7 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,51. Sementara dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,01. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi DKI Jakarta

cenderung bersifat inelastis, relatif kurang memiliki varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif rendah.

Grafik 4.7. Indeks Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta Dimensi Keseluruhan



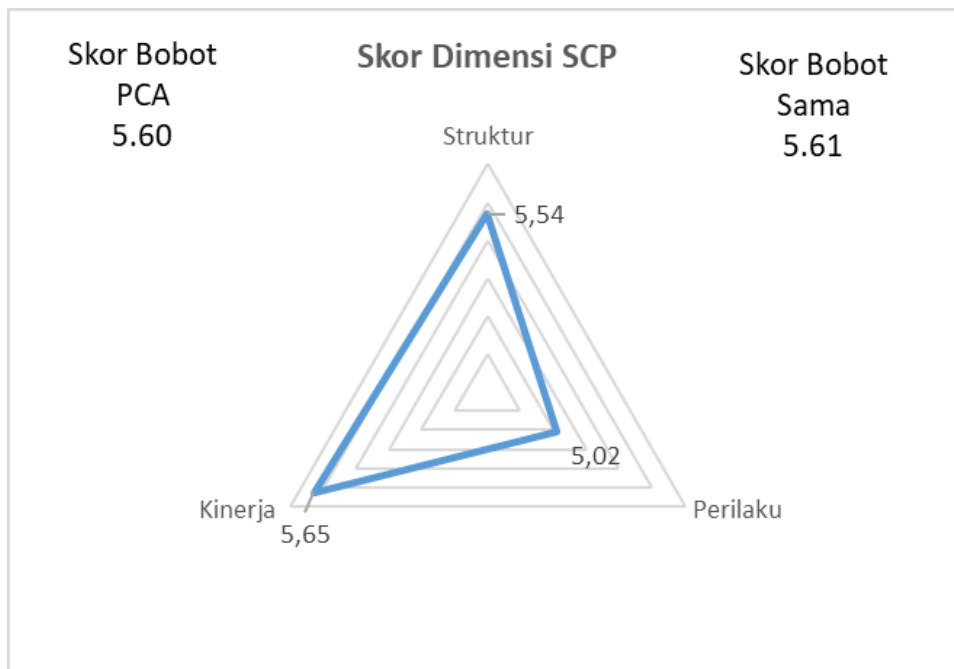
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.8 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi DKI Jakarta hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di DKI Jakarta tahun 2022 ini sebesar 5,60 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di provinsi ini mencapai 5.61 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.8 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,02 Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di DKI

Jakarta ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di DKI Jakarta masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.8. Indeks Persaingan Usaha Provinsi DKI Jakarta Dimensi SCP



4.2.12. Provinsi Jawa Barat

4.2.12. Analisis Deskriptif

Tabel 4.15 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Jawa Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Jawa Barat terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Pengadaan Listrik, Gas, dan 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; dan 2) Pertambangan dan Penggalian. Kemudian terdapat 1 sektor

yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sedangkan 12 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Informasi dan Komunikasi; 8) Jasa keuangan dan asuransi; 9) Real estate; 10) Jasa perusahaan; 11) Jasa pendidikan, dan 12) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komoditas-komoditas yang ditentukan oleh asosiasi antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, dalam arti lain terdapat indikasi penentuan harga jual yang ditentukan oleh sekelompok pihak.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, utamanya produk pokok dan pangan. Seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Barat.

Selain itu sebagian responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, responden lainnya menyebut sektor konstruksi, dan responden lainnya menyebut bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui. Untuk kasus persaingan usaha, salah satu responden menyatakan bahwa terdapat kasus persaingan usaha berupa kartel minyak goreng sementara 2

responden lainnya menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dan sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.15 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Barat tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3) Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan Penggalian 2) Pengadaan Listrik, Gas 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Rendah

	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat karena beberapa komoditas ditentukan oleh asosiasi.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 50% responden menyebut konstruksi, dan responden lainnya menyebut penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan bahan baku yang mudah untuk ditemui.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Barat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, 25% responden menjawab bahwa ada indikasi kartel minyak goreng.

Pertanyaan	Deskripsi
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Barat.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.13. Indeks Persaingan Usaha

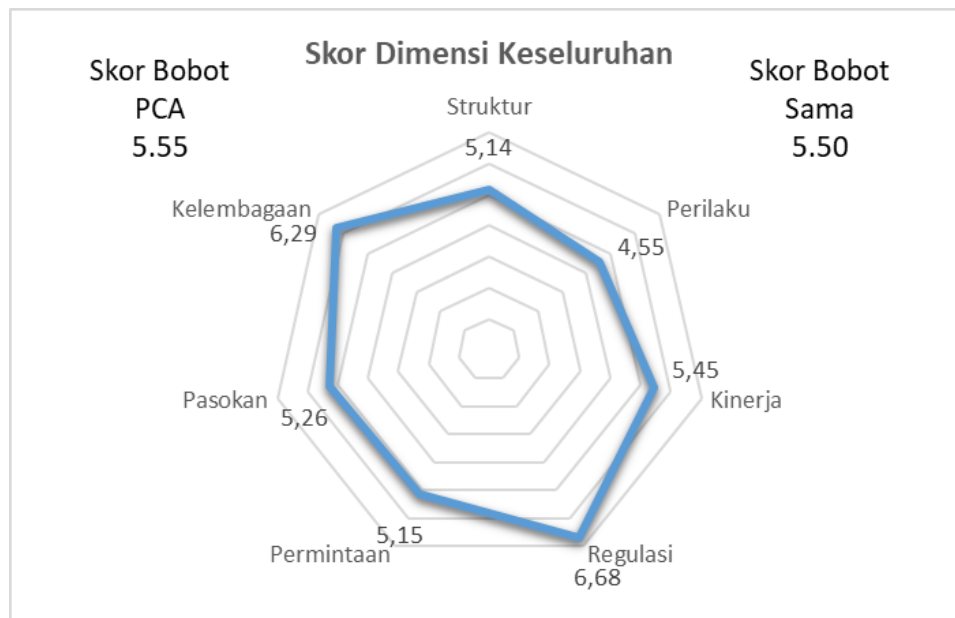
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,50 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,24. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku dan kinerja.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.29 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Barat tahun 2022 ini sebesar 5,55 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,50 atau dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.29 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusiterhadap indeks persaingan usaha

sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,68. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.29. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat Dimensi Keseluruhan



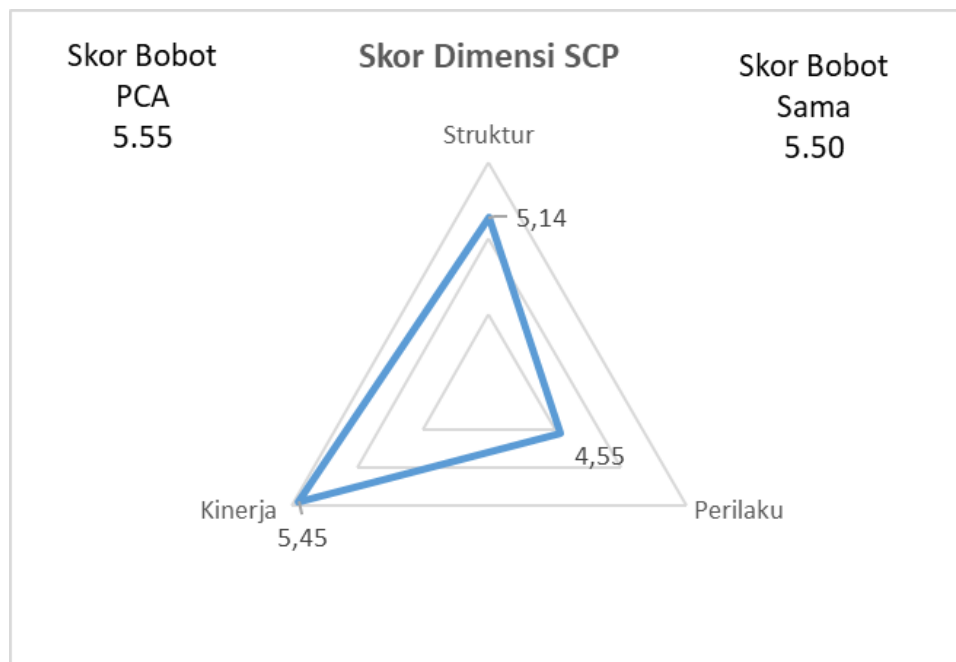
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.30 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 ini sebesar 5,55 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,50 atau dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.30 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar

skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,45. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Provinsi Jawa Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.30. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Barat Dimensi SCP



4.2.13. Provinsi Jawa Tengah

4.2.13.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.16 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkankinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Konstruksi; 2) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 3) Jasa Pengadaan Listrik, Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Informasi dan Komunikasi; dan 2) Jasa Keuangan dan Asuransi. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para

responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 9) Real estate; 10) Jasa perusahaan; dan 11) Jasa pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius dalam mengundang investor dan Pemda memiliki kinerja bagus. Selain itu prosedur OSS (*Online Single Submission*) dinilai sudah bagus meski masih terdapat beberapa kendala. Selain itu dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat karena harga-harga yang berlaku telah tercipta secara alamiah oleh mekanisme pasar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Akan tetapi sebagian responden menyatakan yang sebaliknya bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah relative lebih murah karena Provinsi Jawa Tengah merupakan sentranya. Seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Jawa Tengah karena regulasi yang diterapkan sudah baik.

Masing-masing responden menyatakan bahwa konstruksi, industri pengolahan, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodasi makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut meski biaya produksinya tinggi tetapi terdapat permintaan yang tinggi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Seluruh responden

juga menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Tengah. Selain itu sebagian responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.16 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Tengah tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konstruksi 2) Jasa Keuangan dan Asuransi 3) Pengadaan Listrik, Gas 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi

	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

<p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p>	<p>Masing-masing responden menyatakan bahwa konstruksi, industri pengolahan, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodasi makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p>
<p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p>	<p>50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.</p>
<p>Hambatan investasi</p>	<p>100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Tengah, dikarenakan adanya ketidakpastian dari pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan.</p>
<p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p>	<p>100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.</p>
<p>Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat</p>	<p>75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Tengah. Sedangkan, sisanya menyebutkan bahwa kebijakan yang menghambat hanya bersifat kondisional ditengah kondisi pandemi Covid-19.</p>

Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.
--	---

4.2.14. Indeks Persaingan Usaha

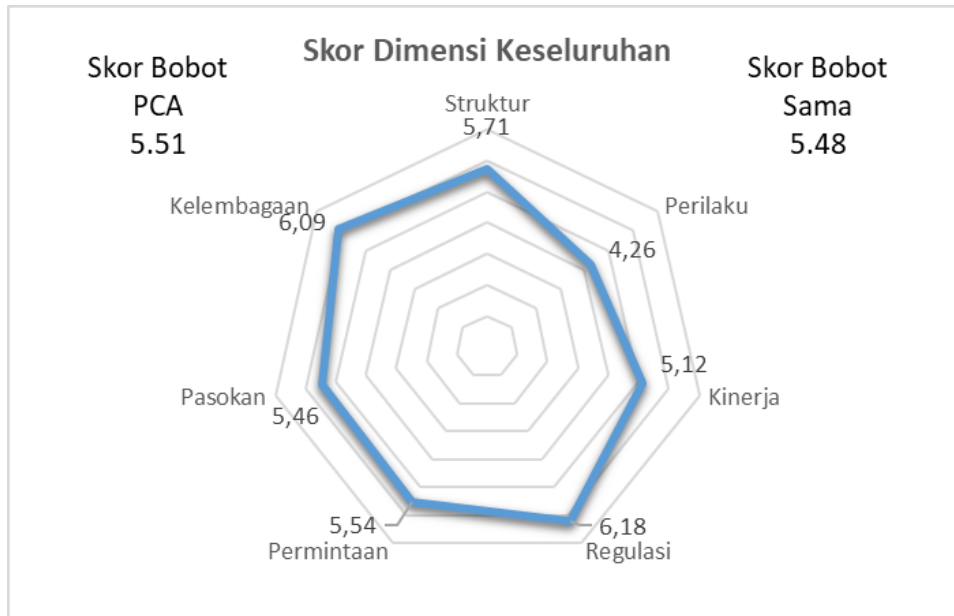
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,48 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,31. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.31 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Tengah tahun 2022 ini sebesar 5,51 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,48 atau dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.31 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,18. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,26. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga,

relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.31. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah Dimensi Keseluruhan



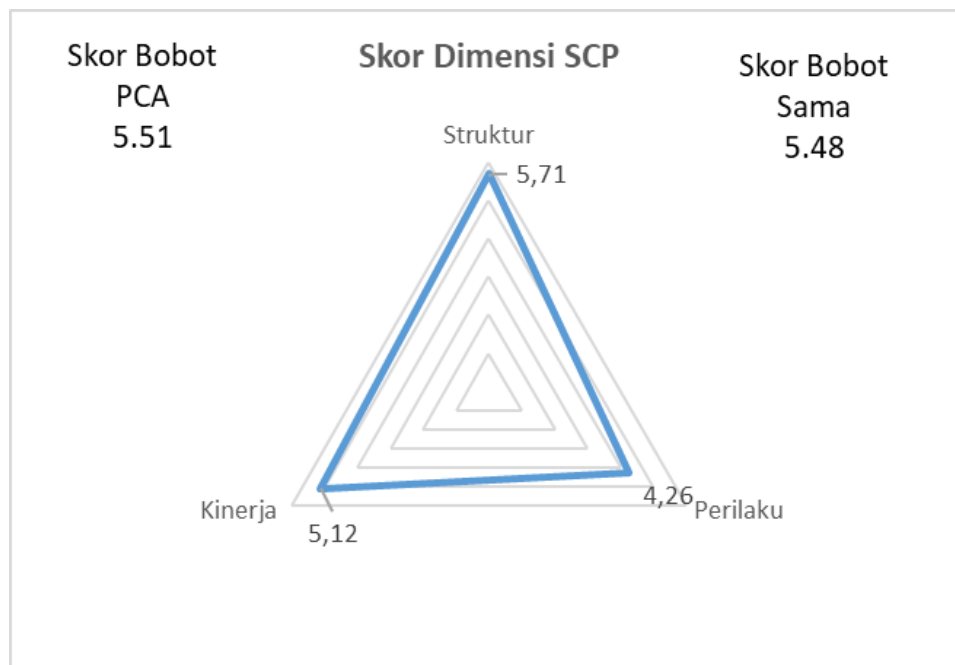
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.32 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jawa Tengah tahun 2022 ini sebesar 5,51 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,48 atau dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.32 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,71. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,26. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan

usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.32. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Tengah Dimensi SCP



4.2.14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.14.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.17 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkategori tinggi, yang didapatkan dari penyimpulan persepsi seluruh responden. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) Jasa Pendidikan; dan 3) Industri Pengolahan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik, gas, 2) 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang terkonsentrasi tinggi yaitu sektor 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan 13 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan pergudangan; 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 8) Informasi dan Komunikasi; 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10) Jasa Keuangan dan Asuransi; 11) Real estate; 12) Jasa perusahaan; dan 13) Jasa pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi terdapat sebagian responden yang menyatakan bahwa meski secara peraturan tidak ada hambatan, terdapat hambatan lain yang dilakukan oleh beberapa oknum di Pemkot Yogyakarta dalam melakukan pengurusan perizinan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena terdapat fenomena aglomerasi dengan daerah. Salah satu responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan masih adanya ketidakpastian dari pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan serta dikarenakan banyak lahan milik keraton yang tidak boleh dijual karena Daerah Istimewa.

Masing-masing responden menjawab sektor berbeda untuk sektor yang memiliki keuntungan besar, yaitu Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum karena melihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

daerah wisata, sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha dan juga tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu seluruh responden juga menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.17 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Jasa Pendidikan 3. Industri Pengolahan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Informasi dan Komunikasi 	
	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah

Rata-rata Konsentrasi Industri*)	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga.
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menjawab sektor berbeda untuk sektor yang memiliki keuntungan besar, yaitu Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan; dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena terdapat fenomena aglomerasi dengan daerah.
Hambatan investasi	25% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan banyak lahan milik keraton yang tidak boleh dijual karena Daerah Istimewa.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaan	Deskripsi
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, karena sangat membantu masyarakat khususnya UMKM dalam meningkatkan hasil penjualan.

4.2.15. Indeks Persaingan Usaha

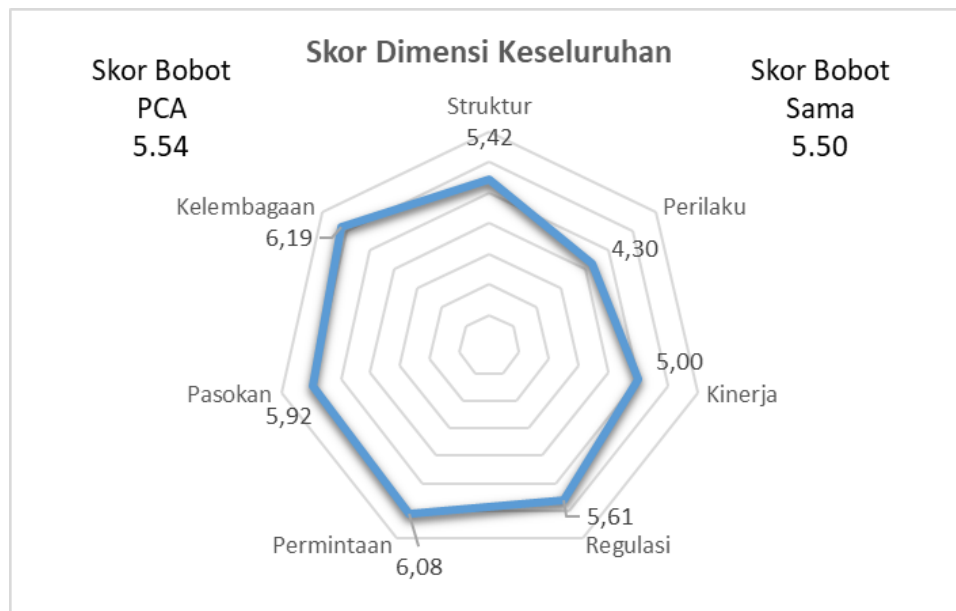
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,50 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,39. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi kinerja, penawaran, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.33 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 ini sebesar 5,54 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,50 dengan kategori yang sama. Grafik 4.33 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,19. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,30. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah

mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.33. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dimensi Keseluruhan

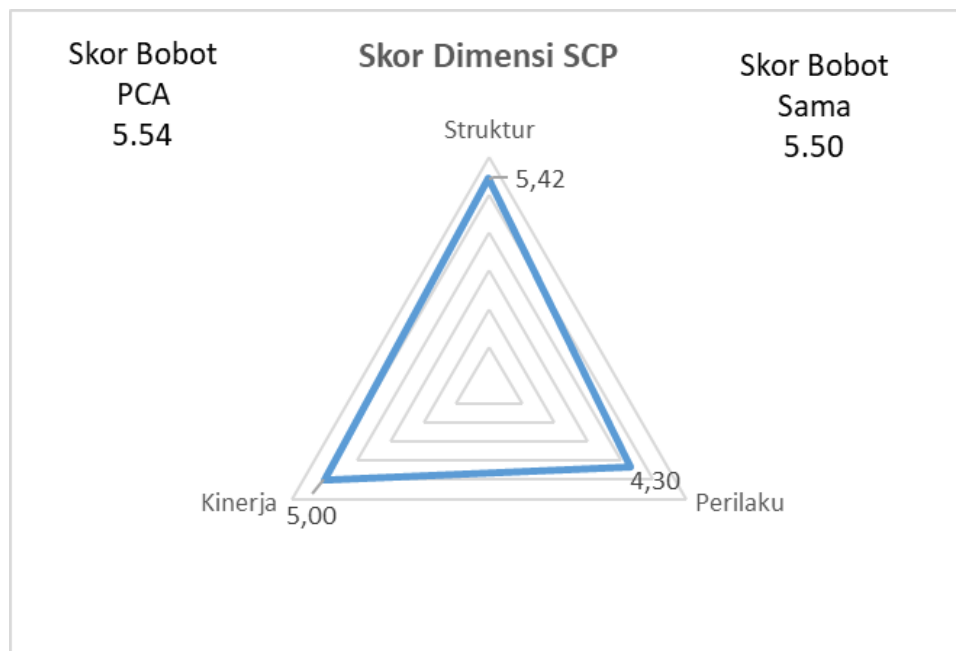


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.34 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 ini sebesar 5,54 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,50 dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.34 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,42. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata

terendah sebesar 4,30. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki stuktur yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.34. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dimensi SCP



4.2.15. Provinsi Jawa Timur

4.2.15.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.18 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang. Kemudian tidak terdapat sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat. Sedangkan 13 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan; 9) Jasa Pendidikan; dan 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 11) Pertambangan dan Penggalan; 12) Konstruksi; 13) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, 25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya peraturan ijin dengan memakai aplikasi OSS yang masih tumpang tindih antara daerah dan nasional. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, utamanya produk-produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan dipasok dari daerah sendiri.

Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Jawa Timur. Sementara responden lainnya menyatakan bahwa masih adanya hambatan dalam melakukan investasi dikarenakan masih adanya hambatan pada peraturan OSS, resistensi masyarakat, serta turunan undang-undang yang tidak jelas.

100% responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena industri ini sangat diminati pasar ekspor dan terjadi kenaikan permintaan domestik selama pandemi Covid-19. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian responden menjawab pernah ada kasus persaingan usaha khususnya pada bidang konstruksi, sedangkan sebagian responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha apapun. Sebagian

besar responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.18 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Jawa Timur tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri pengolahan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan listrik dan gas 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3) Pertambangan dan Peggalian 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi

Pertanyaan	Deskripsi	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
15	Konsentrasi Rendah	
Hambatan Berusaha	25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar, hal ini disebabkan adanya peraturan ijin dengan memakai aplikasi OSS yang masih tumpang tindih antara daerah dan nasional.	

Pertanyaan	Deskripsi
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti kesepakatan harga.
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	100% responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena industri ini sangat diminati pasar ekspor dan terjadi kenaikan permintaan domestic selama pandemic Covid-19.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah.
Hambatan investasi	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di Jawa Timur.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab pernah ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, 50% responden menjawab tidak ada.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Jawa Timur.

Pertanyaan	Deskripsi
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di komoditas kuliner.

4.2.16. Indeks Persaingan Usaha

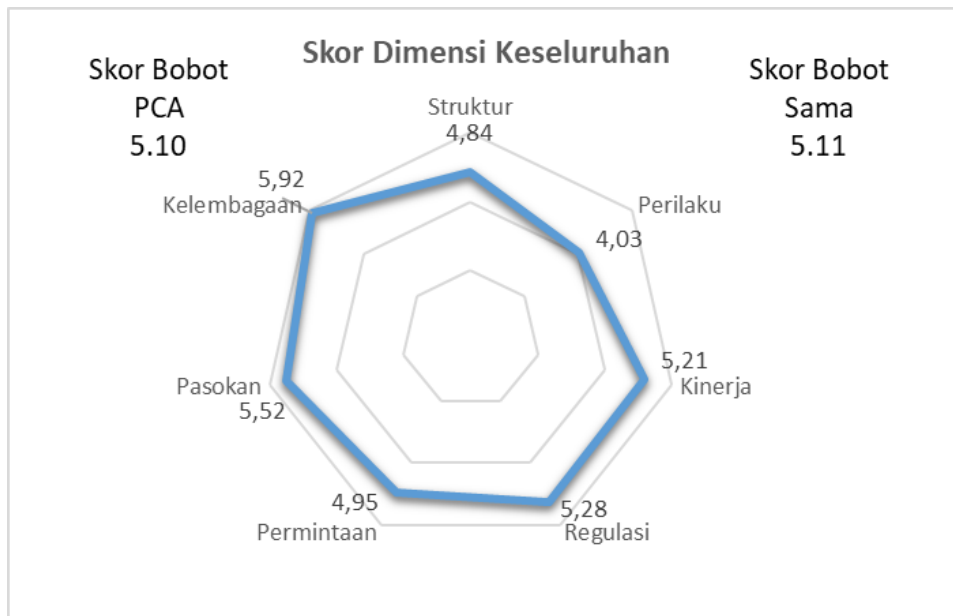
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,11 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,17. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, kinerja, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.35 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Jawa Timur tahun 2022 ini sebesar 5,10 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,11 dengan kategori yang sama. Grafik 4.35 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,92. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Timur masih relatif

berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.35. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur Dimensi Keseluruhan



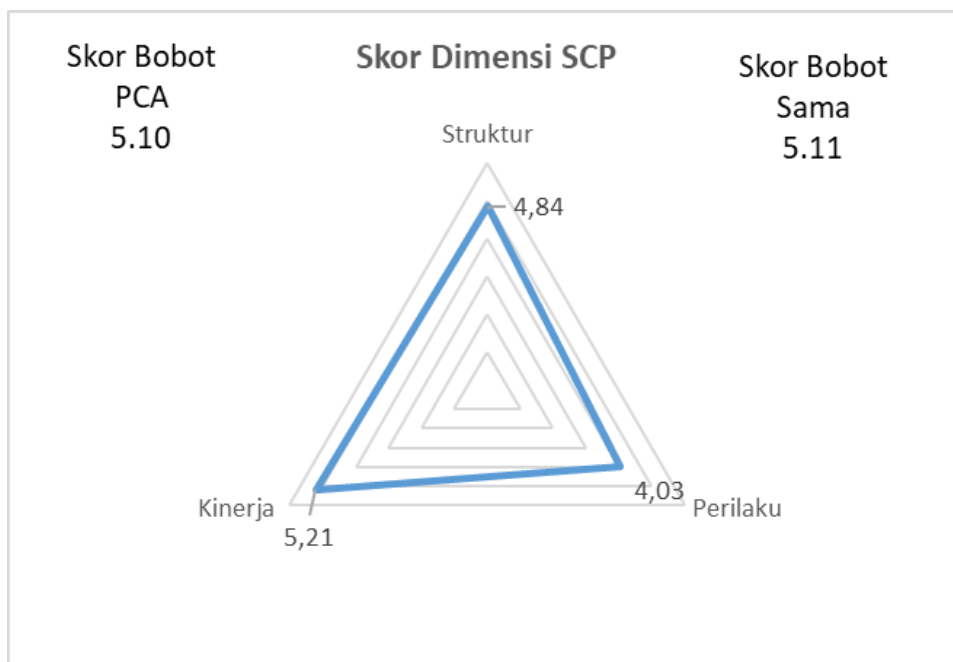
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.36 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Jawa Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Jawa Timur tahun 2022 ini sebesar 5,10 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,11 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.36 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,21. Sementara, dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,03. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Jawa Timur ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah

mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Jawa Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.36. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Jawa Timur Dimensi SCP



4.2.16. Provinsi Banten

4.2.16.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.19 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Banten berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Banten terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Transportasi dan Pergudangan; 3) Real Estate; dan 4) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan 10 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Konstruksi; 4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi; 6) Industri Pengolahan; 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8) Jasa Perusahaan; dan 9) Jasa Pendidikan; 10) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian kecil responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan adanya masalah perizinan dimana tidak sejalan antara provinsi dengan daerah serta banyaknya pungutan liar. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Banten relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian kecil responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Banten, dikarenakan masih adanya ketidakpastian dari pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan serta besarnya biaya tak terduga di semua sektor usaha.

Masing-masing responden menyatakan bahwa penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, dan real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut memiliki penawaran yang tinggi dan menyerap tenaga kerja yang banyak dan optimal. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha sementara responden lainnya menyatakan bahwa terdapat kasus persaingan usaha yaitu adanya kesepakatan yang terjadi pada tender. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Banten

dan sebagian responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.19 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Banten

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Banten tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan akomodasi dan makan minum 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik, Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Pertambangan dan Penggalan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
5	Konsentrasi Rendah	
Pertanyaan	Deskripsi	

Rata-rata Konsentrasi Industri*)	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
15	Konsentrasi Rendah	
Hambatan Berusaha	25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar, hal ini disebabkan adanya pungutan liar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, dan real estate merupakan	
Pertanyaan	Deskripsi	

	Sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	25% responden terdapat hambatan investasi di Banten, dikarenakan besarnya biaya tak terduga di semua sektor usaha.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Banten.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	50% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.17. Indeks Persaingan Usaha

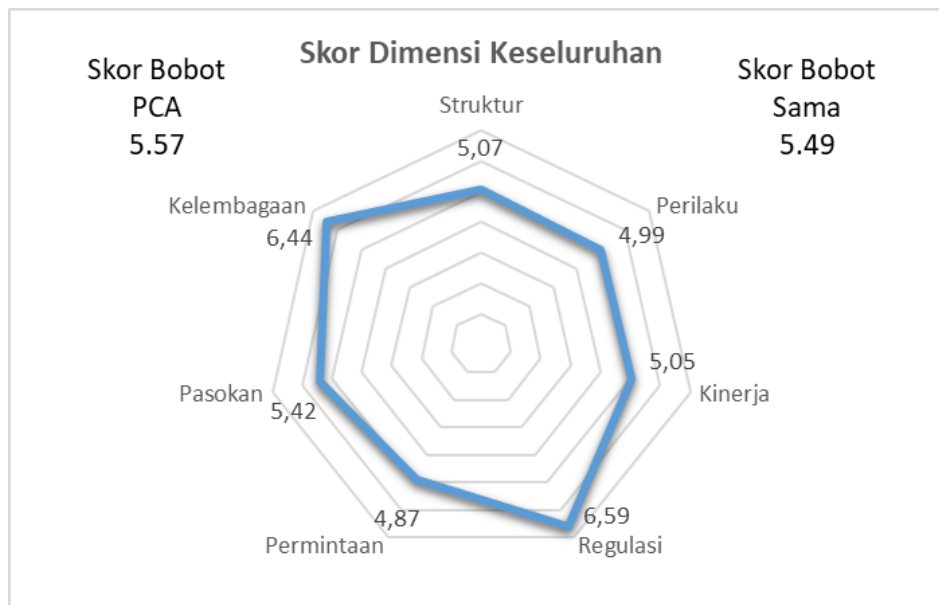
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Banten dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,49 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,81. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur,

perilaku, kinerja, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.37 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Banten dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Banten tahun 2022 ini sebesar 5,57 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,49 atau dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.37 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,59. Sementara dimensi permintaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi permintaan menunjukkan bahwa dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi Banten cenderung bersifat inelastis, relatif kurang memiliki varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif rendah.

Grafik 4.37. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Banten Dimensi Keseluruhan

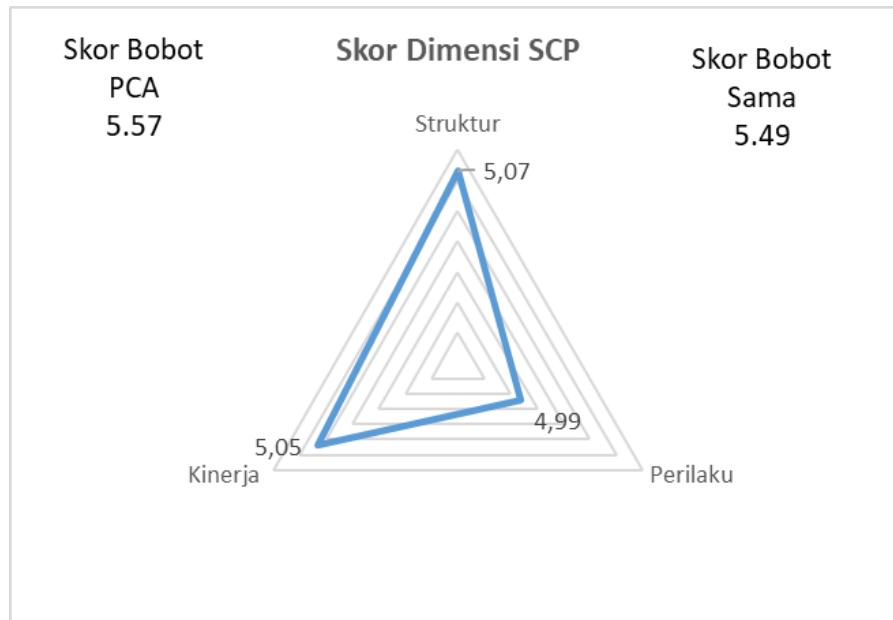


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.38 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Banten hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Banten tahun 2022 ini sebesar 5,57 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,49 atau dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.38 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,07. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,99. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meski memiliki struktur industri yang relatif bersaing.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki struktur yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usahayang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Banten masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.38. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Banten Dimensi SCP



4.2.17. Provinsi Bali

4.2.17.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.20 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Bali berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Bali terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Pertambangan dan Penggalan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; dan 3) Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan

terkonsentrasi moderat, 1) Industri Pengolahan; 2) Informasi dan Komunikasi; 3) Jasa Pendidikan; dan 4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; dan 9) Jasa Perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh masalah peraturan, perizinan, pajak yang tinggi bagi perusahaan baru, dan resistensi masyarakat terkait lingkungan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Bali relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Sebagian responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Bali, dikarenakan adanya peraturan daerah yang belum jelas dan resistensi masyarakat terhadap beberapa rencana pembangunan.

Masing-masing responden menyatakan bahwa Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Informasi dan Komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar karena sektor-sektor tersebut merupakan pasar yang memiliki permintaan yang tinggi serta memiliki selisih *cost of fund* dengan *cost of credit* yang cukup besar. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Seluruh responden juga menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Bali dan penggunaan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.20 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Bali

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Bali tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. 3) Pertambangan dan Penggalian 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi

Pertanyaan	Deskripsi	
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasukipasar, hal ini disebabkan oleh masalah peraturan, perizinan, pajak yang tinggi bagi perusahaan baru, dan resistensi masyarakat terkait lingkungan.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Informasi dan Komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di Bali, dikarenakan adanya peraturan daerah yang belum jelas dan resistensi masyarakat terhadap beberapa rencana pembangunan.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Bali.

Pertanyaan	Deskripsi
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.18. Indeks Persaingan Usaha

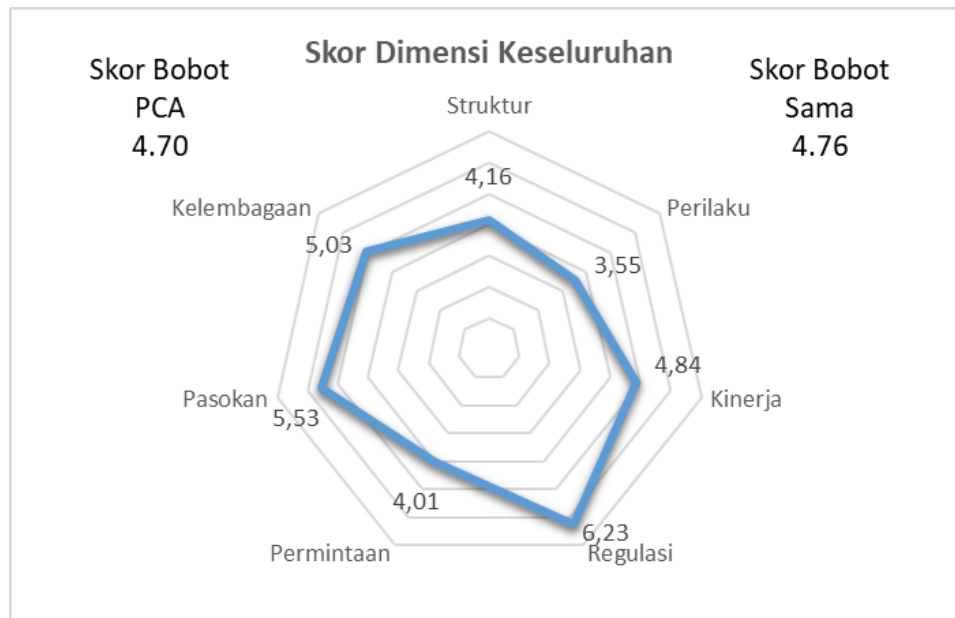
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Bali dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,76 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,16. Penurunan yang signifikan terjadi pada seluruh dimensi yaitu struktur, perilaku, kinerja, regulasi, penawaran, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.39 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bali dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Bali tahun 2022 ini sebesar 4,70 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,76 dengan kategori yang sama. Grafik 4.39 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,23. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bali masih

relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.39 Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bali Dimensi Keseluruhan



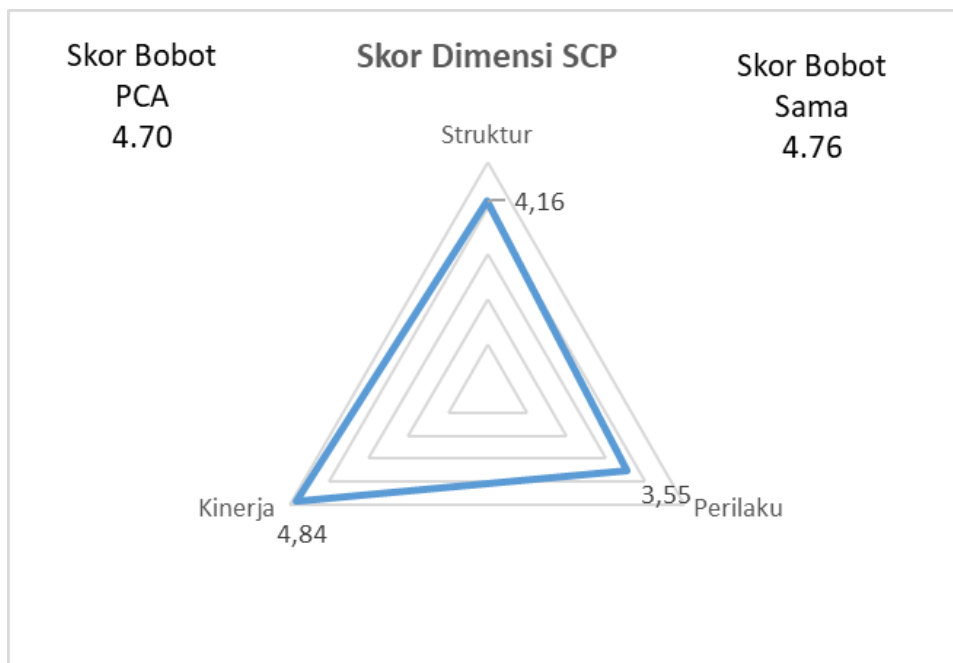
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.40 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Bali hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Bali tahun 2022 ini sebesar 4,70 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,76 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.40 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,84. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Bali ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu

beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Bali masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.40. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Bali Dimensi SCP



4.2.18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.18.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.21 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkategori rendah, di mana sebagian besar responden mempersepsikan tidak terdapat persaingan usaha yang tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Jasa Pendidikan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih. Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pertambangan dan Penggalian;

2) Informasi dan Komunikasi, dan 3) Jasa Pendidikan. Kemudian terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan, 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; 5) Informasi dan Komunikasi; 6) Konstruksi; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 2 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, khususnya harga komoditas pada sektor pertanian. Sebagian responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikarenakan adanya resistensi masyarakat.

Masing-masing responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalan, Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, dan Keuangan dan Asuransi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar dikarenakan sektor-sektor tersebut adalah sektor yang paling sering digunakan oleh masyarakat baik pada masa pandemi maupun saat sebelum pandemi sehingga menerima banyak keuntungan. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan

persaingan usaha.

Tabel 4.21 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	25% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di NTB tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Jasa Pendidikan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Rendah
	5	Konsentrasi Rendah
	6	Konsentrasi Moderat

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Tinggi
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Tinggi
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh masalah kurangnya modal.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, dan Keuangan dan Asuransi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di NTB, dikarenakan adanya resistensi masyarakat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di NTB.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor makanan.

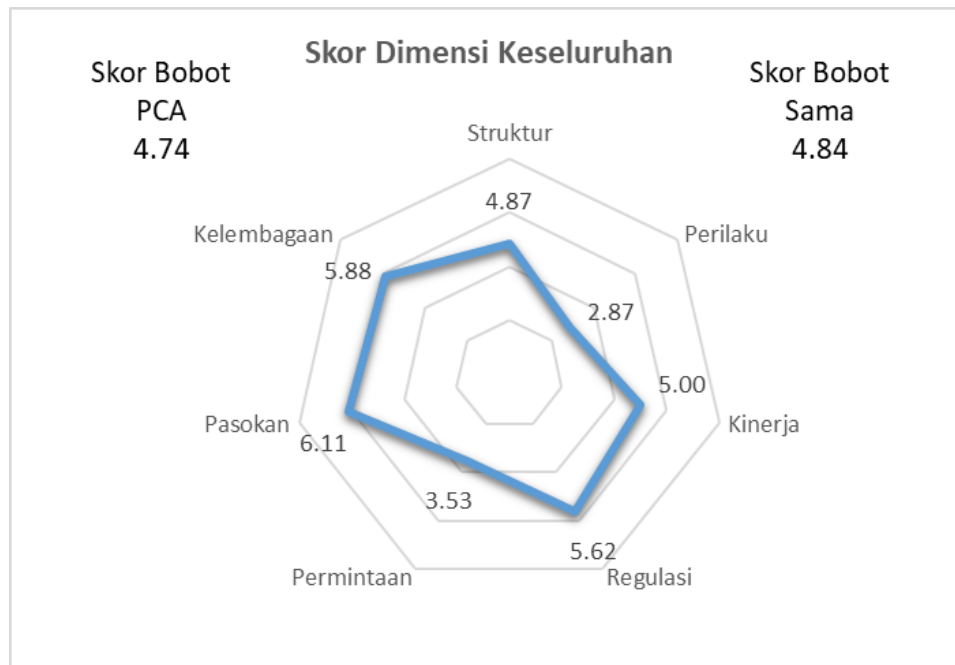
4.2.19. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,84 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,72. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, penawaran, dan kelembagaan.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.41 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini sebesar 4,74 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,84 dengan kategori yang sama. Grafik 4.41 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,11. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasokan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.41. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Dimensi Keseluruhan

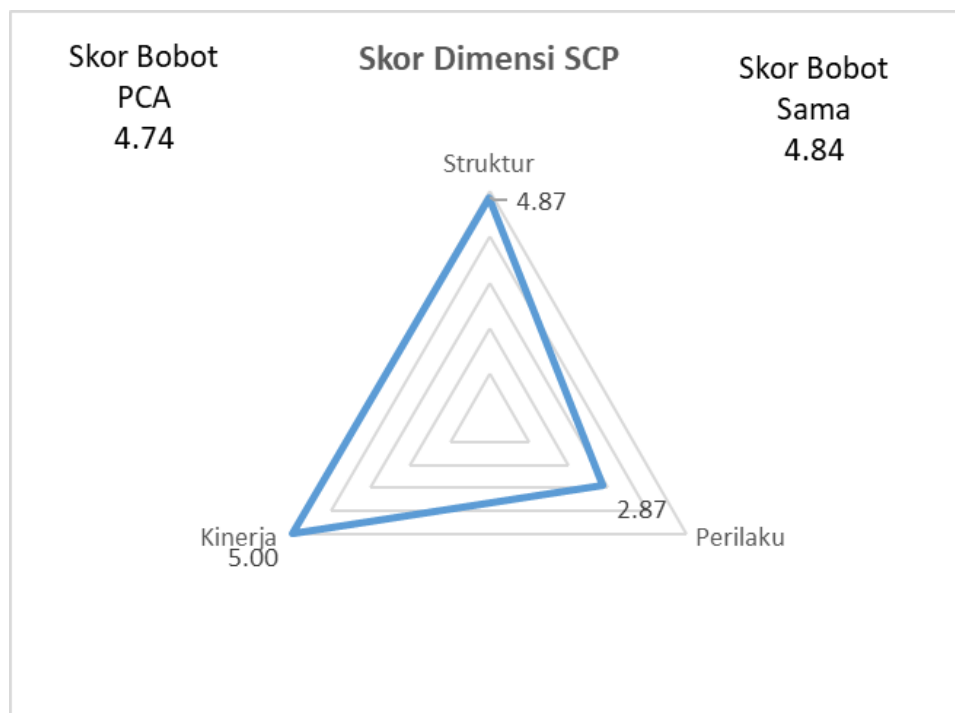


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.42 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini sebesar 4,74 atau sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,84 dalam kategori moderat. Grafik 4.42 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,00. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Nusa Tenggara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.42. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Dimensi SCP



4.2.19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.2.19.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.22 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Informasi dan Komunikasi, 2) Pertambangan dan Penggalan, dan 3) Pengadaan Listrik, Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Informasi dan Komunikasi. Kemudian terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Industri

Pengolahan; 3) Pengadaan Air; 4) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Jasa Keuangan dan Asuransi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan. Sedangkan 5 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah antara lain 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Jasa Pendidikan; 5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, 3 responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu responden menyatakan merasa terhambat karena sistem OSS PBG Perubahan IMB ke PBG belum sinkron dengan pemerintah kota. Sementara itu, dari sisi perilaku, 25% responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tindakan dalam berusaha mengatur harga dan jumlah produksi.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan distribusi dan produksi tidak sama antar daerah. Kemudian, sebanyak sebagian besar responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pengurusan IMB dan legalitas lahan, resistensi masyarakat, dan infrastruktur yang belum mendukung.

Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi penyediaan akomodasi dan makan minum; dan informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan

persaingan usaha.

Tabel 4.22 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di NTT tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	1) Informasi dan Komunikasi 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Pengadaan Listrik, Gas	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Moderat
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Moderat
9	Konsentrasi Rendah	

	10	Konsentrasi Tinggi
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar sementara 25% responden merasa terhambat karena sistem OSS PBG Perubahan IMB ke PBG belum sinkron dengan pemerintah kota.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya tindakan dalam berusaha mengatur harga dan jumlah produksi	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum; dan informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena distribusi dan produksi tidak sama antar daerah.
Hambatan investasi	75% responden terdapat hambatan investasi di NTT, dikarenakan adanya hambatan dalam pengurusan IMB dan legalitas lahan, resistensi masyarakat, dan infrastruktur yang belum mendukung.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di NTT.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.20. Indeks Persaingan Usaha

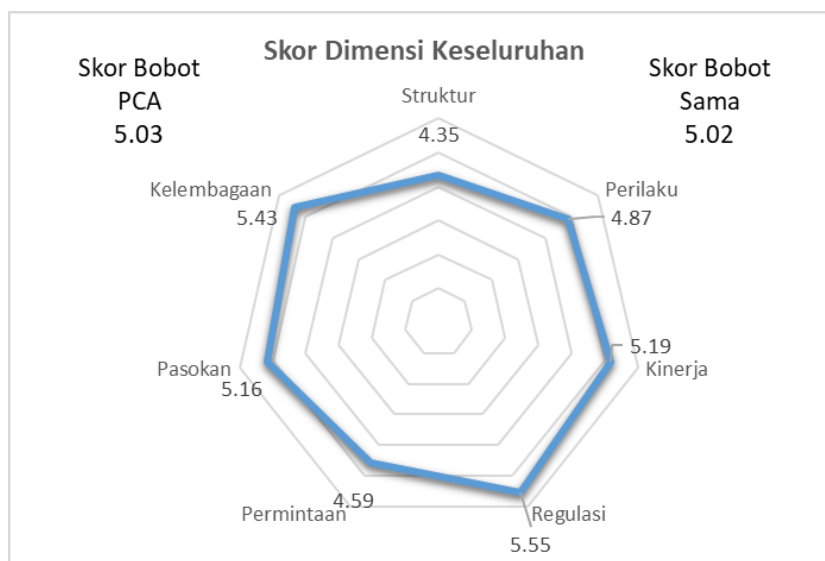
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,02 atau

meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,93. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.43 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ini sebesar 5,03 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,02 dengan kategori yang sama. Grafik 4.43 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,55. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,35. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usahayang tinggi. Sementara itu rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Nusa Tenggara Timur terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Grafik 4.43. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Dimensi Keseluruhan

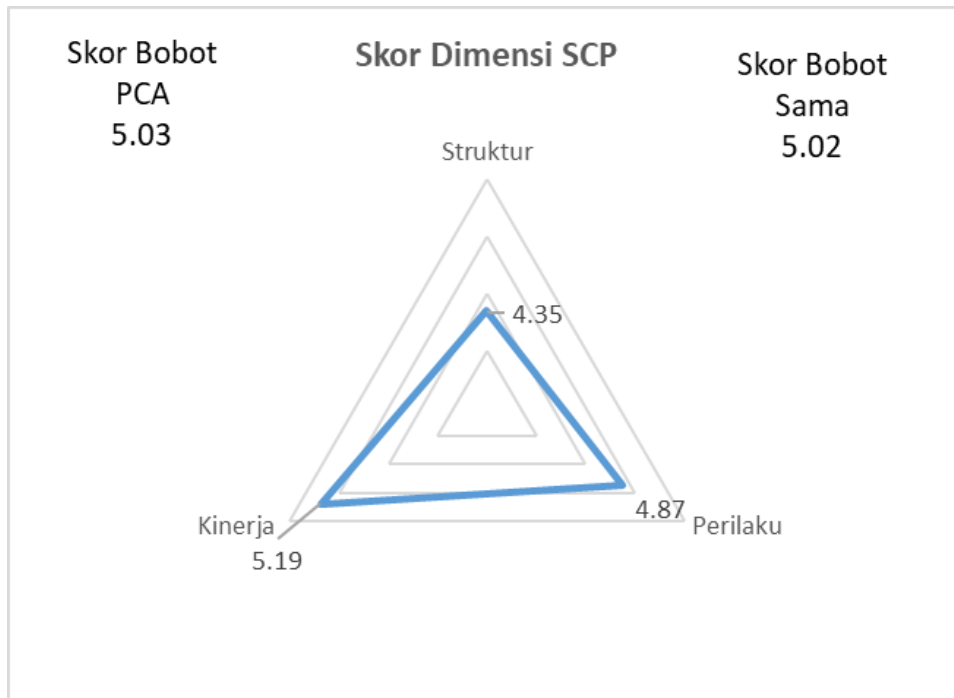


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.44 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ini sebesar 5,03 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antardimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,02 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.44 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besarskor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,19. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,35. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Nusa Tenggara Timur ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi struktur dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Nusa Tenggara Timur terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Dengan demikian, masih sulit untuk pengusaha baru untuk masuk kedalam industri pasar dan differensiasi produk juga masih kurang bervariasi.

Grafik 4.44. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Dimensi SCP



4.2.20. Provinsi Kalimantan Barat

4.2.20.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.23 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Barat terkategori tinggi, di mana tiga dari empat responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatanpermodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 2) Transportasi dan Pergudangan; dan 3) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan 11 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Pendidikan; 11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian kecil responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat di tingkat asosiasi bagi sebagian sektor (pertambangan, perdagangan besar).

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan produk yang disediakan dipasok dari daerah lain. Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Barat.

Masing-masing responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Untuk kasus persaingan usaha, responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian responden menjawab terdapat persaingan usaha di sektor konstruksi. Seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.23 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Barat tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. 2) Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman. 3) Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan Penggalian. 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3) Informasi dan Komunikasi 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha, sementara 25% lainnya menyatakan bahwa terjadi perilaku persaingan usaha di tingkat asosiasi bagi sebagian sektor (pertambangan, perdagangan besar).	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan investasi di KalimantanBarat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, sebagian responden menjawab terdapat persaingan usaha di sektor konstruksi
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Barat.

Pertanyaan	Deskripsi
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.21. Indeks Persaingan Usaha

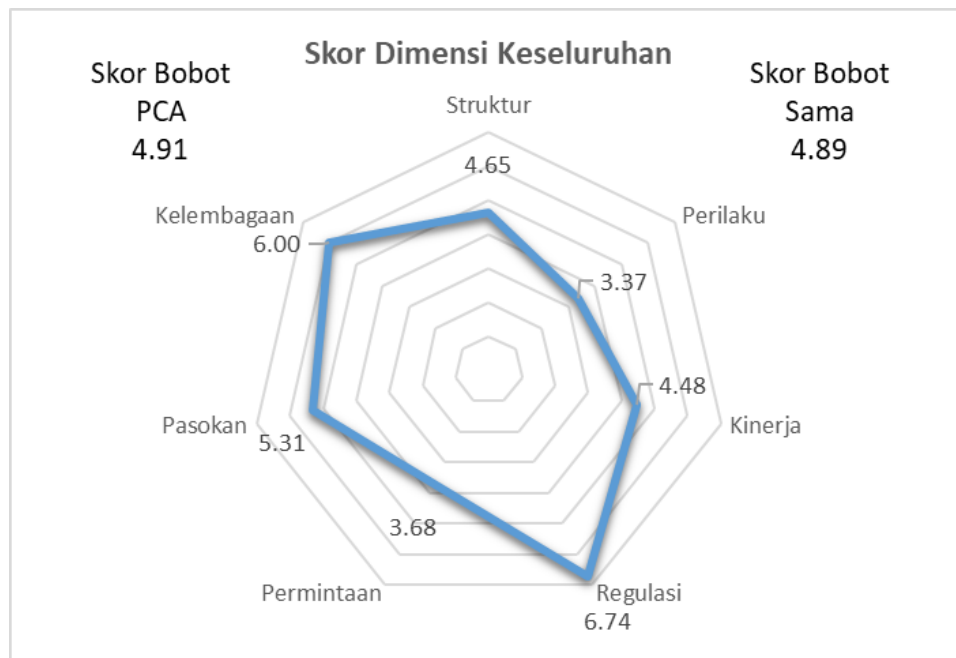
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,89 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,06. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, penawaran, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.45 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Barat tahun 2022 ini sebesar 4,91 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,89 dengan kategori yang sama. Grafik 4.45 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,74. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,37. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha

di Kalimantan Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.45. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dimensi Keseluruhan



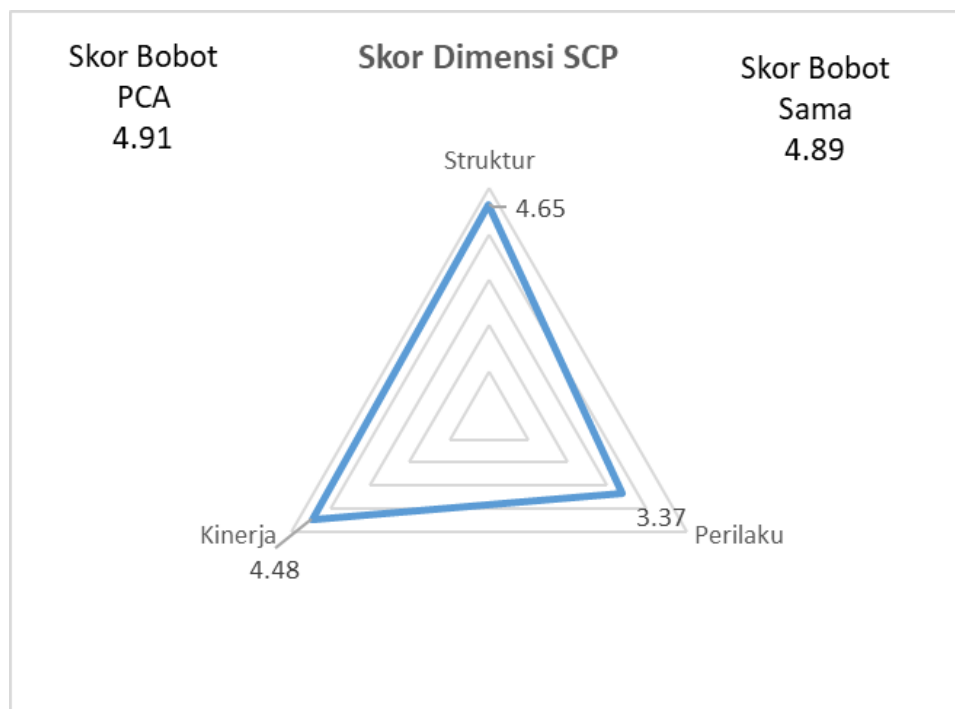
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.46 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Barat tahun 2022 ini sebesar 4,91 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,89 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.46 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,65. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,37. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Kalimantan Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.46. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dimensi SCP



4.2.21. Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.21.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.24 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Tengah terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Informasi dan Komunikasi; 2) Transportasi dan Pergudangan; dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalan; dan 3) Pengadaan Listrik, Gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik dan gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah yaitu 1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Selain itu terdapat 9 sektor

yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Industri Pengolahan; 3) Pengadaan Listrik, Gas; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Informasi dan Komunikasi; dan 9) Jasa Pendidikan. Sedangkan 5 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Jasa Keuangan dan Asuransi; 3) Real Estate; 4) Jasa Perusahaan; 5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang membatasi dan adanya kondisi geografi yang jauh di tengah pulau. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian kecil responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembuatan kesepakatan antar perusahaan dan asosiasi dalam penentuan harga dan produksi antara mereka.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Tengah relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya seperti Kalimantan Tengah. Satu dari empat responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Tengah, dikarenakan masih adanya kerja sama antara perusahaan dan asosiasi sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan investasi.

75% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan pertanian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Hal ini terjadi karena pada sektor ini produksi yang dilakukan tidak semakin bertambah sehingga harga dan keuntungan menjadi semakin tinggi. Untuk kasus persaingan usaha, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha di Provinsi

Kalimantan Tengah. Tiga dari empat responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh responden menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.24 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Tengah tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi dan Komunikasi 2) Transportasi dan Pergudangan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2) Pertambangan dan Penggalan 3) Pengadaan Listrik, Gas 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Moderat
	7	Konsentrasi Moderat

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, sisanya menyebutkan masih adanya hambatan yang disebabkan oleh peraturan yang membatasi dan adanya kondisi geografi yang jauh di tengah pulau.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	75% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan pertanian	

Pertanyaan	Deskripsi
	merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	75% responden tidak terdapat hambatan investasi di Kalimantan Tengah.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Tengah.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.22. Indeks Persaingan Usaha

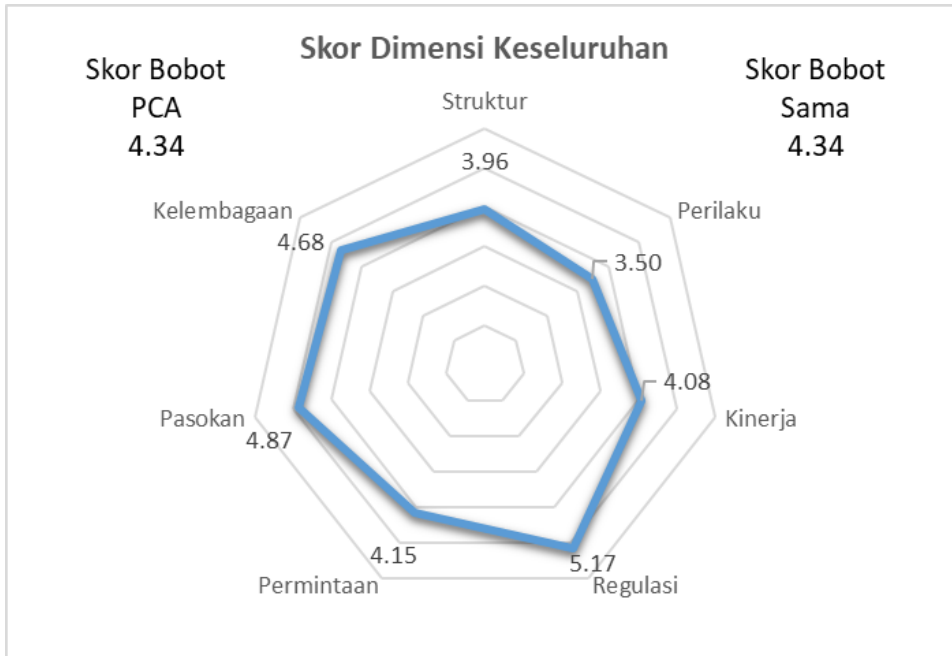
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun

pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,34 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,45. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.47 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Tengah tahun 2022 ini sebesar 4,34 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,34 dengan kategori yang sama. Grafik 4.47 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,17. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,50. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.47. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Dimensi Keseluruhan

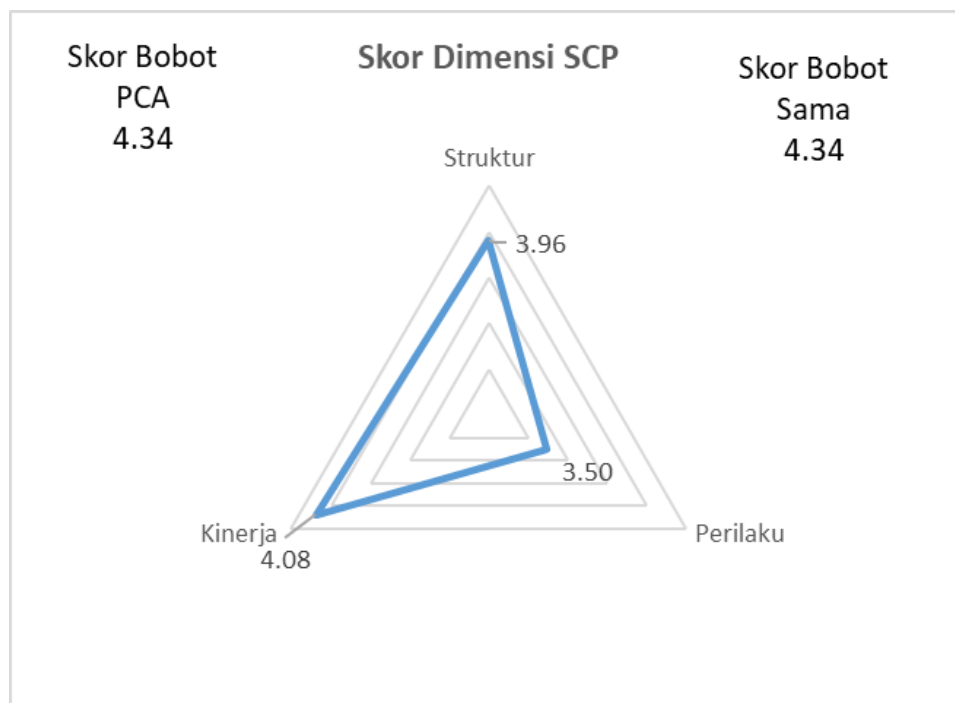


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.48 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Tengah tahun 2022 ini sebesar 4,34 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini 4,34 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.48 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,08. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,50. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kalimantan Tengah ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.48. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Dimensi SCP



4.2.22. Provinsi Kalimantan Selatan

4.2.22.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.25 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Selatan terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Real Estate; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan 3) Industri Pengolahan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Informasi dan Komunikasi; 7) Real Estate; 8) Jasa Perusahaan; 9) Jasa Pendidikan; 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 3 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Konstruksi; 2) Transportasi dan Pergudangan; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan adanya masalah dimana terdapat hambatan karena regulasi/peraturan yang sulit untuk perusahaan yang baru masuk. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yaitu harga antar pasar yang tidak jauh berbeda.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Selatan relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar, utamanya produk-produk pangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya. Seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kalimantan Selatan.

100% responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian dan pengadaan listrik, gas merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Karena usaha bentuk monopoli ini memiliki nilai ekspor yang besar sehingga keuntungan yang dimiliki juga akan semakin besar. Untuk kasus persaingan usaha, tiga dari empat responden menyatakan bahwa tidak terdapat kasus persaingan usaha. Tiga dari empat responden menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian besar responden

menyatakan bahwa dengan menggunakan platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.25 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Selatan tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real Estate 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Industri Pengolahan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Rendah
7	Konsentrasi Moderat	

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Moderat
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, satu responden menyatakan terdapat hambatan karena regulasi/peraturan yang sulit untuk perusahaan yang baru masuk.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	50% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dan 50% lainnya menjawab bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	100% responden menyatakan bahwa industri pertambangan dan penggalian dan pengadaan listrik, gas merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Kalimantan Selatan.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Selatan.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

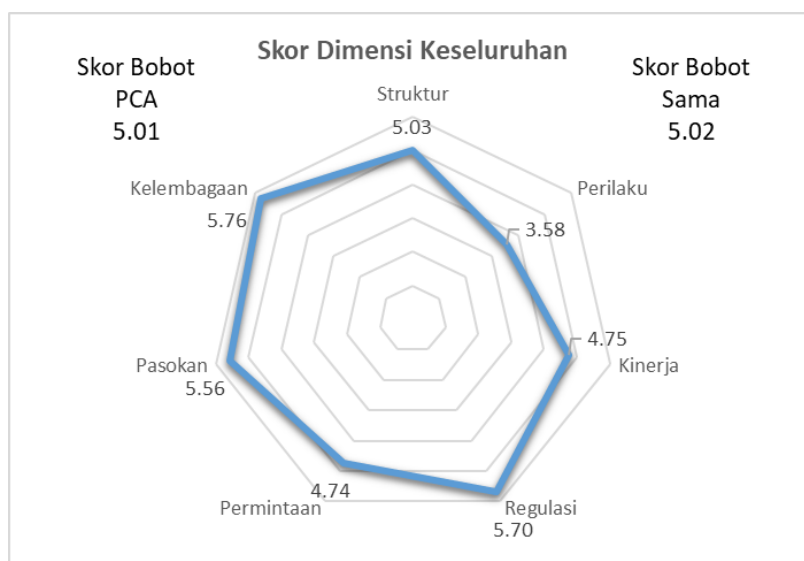
4.2.23. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,02 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,39. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, penawaran, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.49 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Selatan tahun 2022 ini sebesar 5,01 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobotsama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,02 dengan kategori yang sama. Grafik 4.49 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,76. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,58. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.49. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan Dimensi Keseluruhan

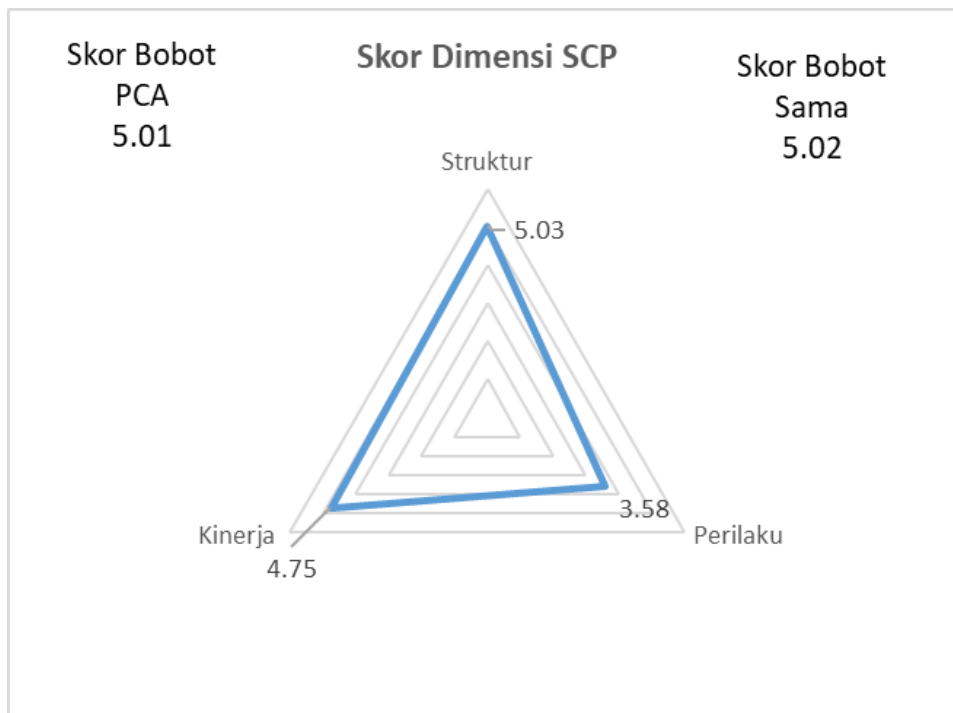


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.50 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Selatan tahun 2022 ini sebesar 5,01 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobotsama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,02 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.50 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,03. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,58. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Kalimantan Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Kalimantan Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.50. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan Dimensi SCP



4.2.23. Provinsi Kalimantan Timur

4.2.23.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.26 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Kalimantan Timur berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Timur terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan 3) Informasi dan Komunikasi. Sedangkan, 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2)

Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 6) Transportasi dan pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) Jasa Keuangan dan Asuransi; 9) Real estate; 10) Jasa perusahaan; 11) Jasa pendidikan; dan 12) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, darisisi perilaku, satu responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kerjasama perdagangan. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur relatif lebih murah dibanding daerah sekitar.

Sebagian responden juga menyatakan terdapat tidak adanya hambatan investasi di Kalimantan Timur. Dilihat dari platform belanja digital, Sebagian responden menyatakan bahwa platform belanja digital dapat meningkatkan persaingan usaha.

Tabel 4.26 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur

Pertanyaan	Deskripsi
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Timur tinggi.

3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kerjasama perdagangan.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, 25% perdagangan	

Pertanyaan	Deskripsi
	besar dan eceran, dan 25% pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	25% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di Kalimantan Timur dikarenakan adanya hambatan informal (ormas pungli) dan resistensi masyarakat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Timur.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

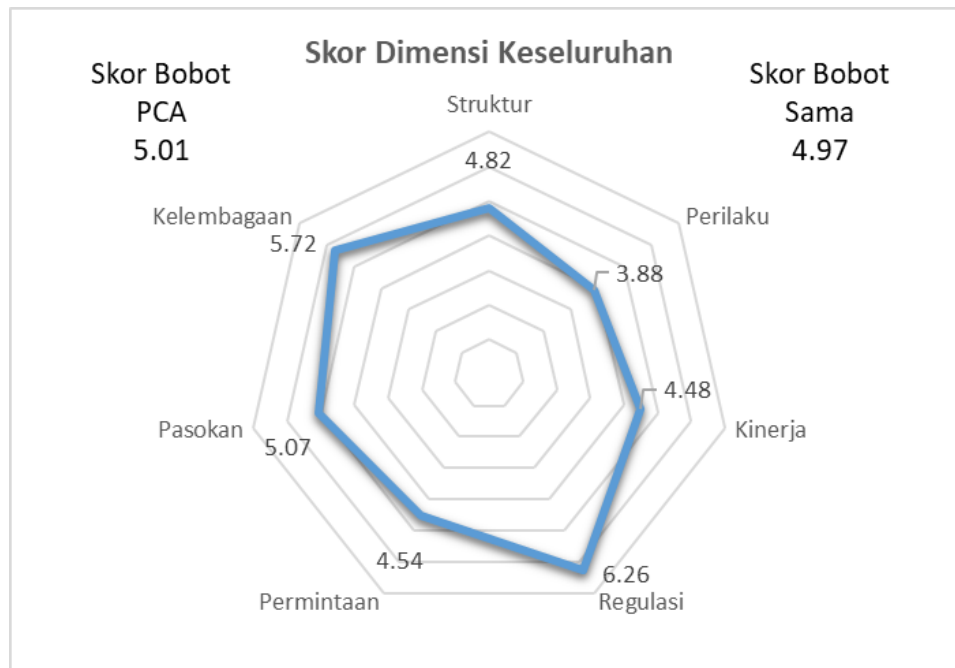
4.2.24. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,97 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,57. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, regulasi, penawaran, permintaan, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.51 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Timur tahun 2022 ini sebesar 5,01 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,97 dengan kategori yang sama. Grafik 4.51 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,26. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,88. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.51. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Dimensi Keseluruhan

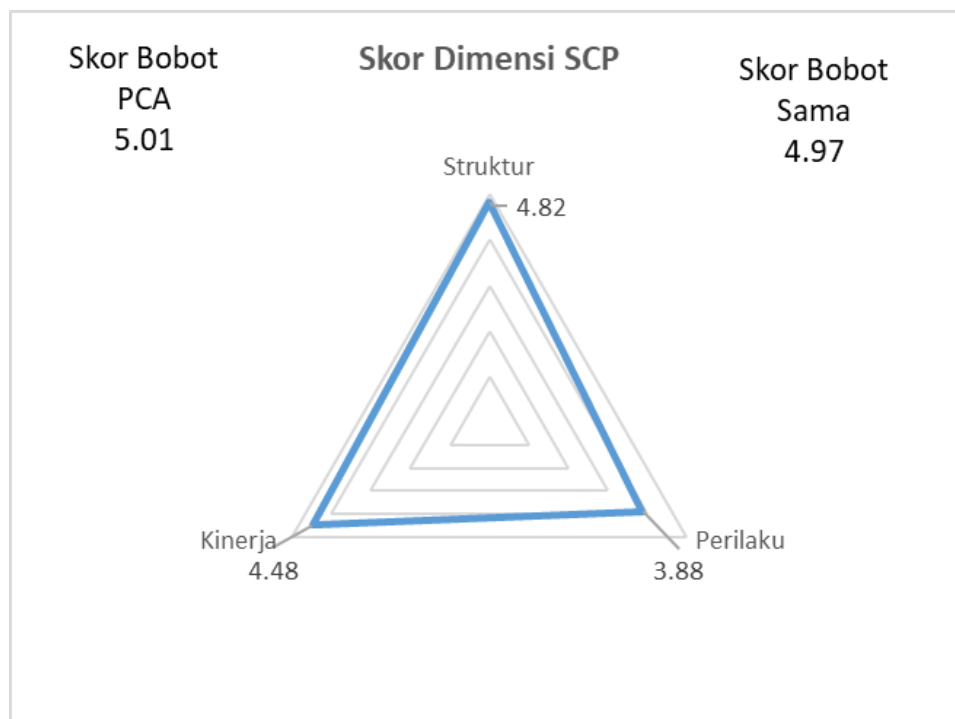


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.52 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Timur hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Timur tahun 2022 ini sebesar 5,01 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,97 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.52 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,82. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,88. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Kalimantan Timur ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Timur masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.52. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Dimensi SCP



4.2.24. Provinsi Kalimantan Utara

4.2.24.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.27 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Kalimantan Utara terkategori moderat, di mana sebagian responden mempersepsikan rendah dan tinggi.. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besardan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan 3) Real Estate. Halini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Transportasi dan Pergudangan, dan 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 1 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Informasi dan Komunikasi. Kemudian terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; dan 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Jasa Pendidikan; 5) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan, 9 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; 8) Real Estate; dan 9) Jasa Perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan seperti kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.

Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasokan merupakan dipasok dari daerah lain sekitarnya.

Sebagian responden juga menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Kalimantan Utara, dikarenakan masih adanya hambatan dari regulasi dan masyarakat. Mengenai kasus persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara, sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender.

Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Utara.

Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor kuliner dan tekstil.

Tabel 4.27 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Kalimantan Utara tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Real Estate 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Informasi dan Komunikasi 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat

	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Tinggi
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar Pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan real estate merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di Kalimantan Utara karena adanya hambatan dari regulasi dan masyarakat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Kalimantan Utara.

Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor kuliner dan tekstil.
--	--

4.2.25. Indeks Persaingan Usaha

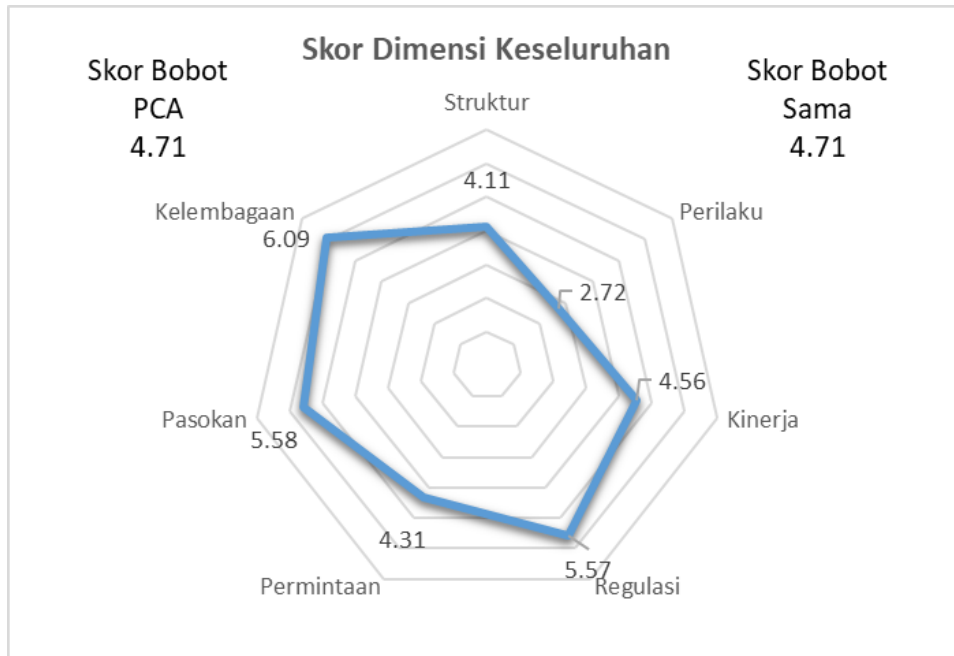
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,71 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,78. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, dan kinerja.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.53 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Kalimantan Utara tahun 2022 ini sebesar 4,71 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,71 dengan kategori yang sama. Grafik 4.53 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kelembagaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 6,09. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Utara masih relatif berperilaku yang

mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.53. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Dimensi Keseluruhan



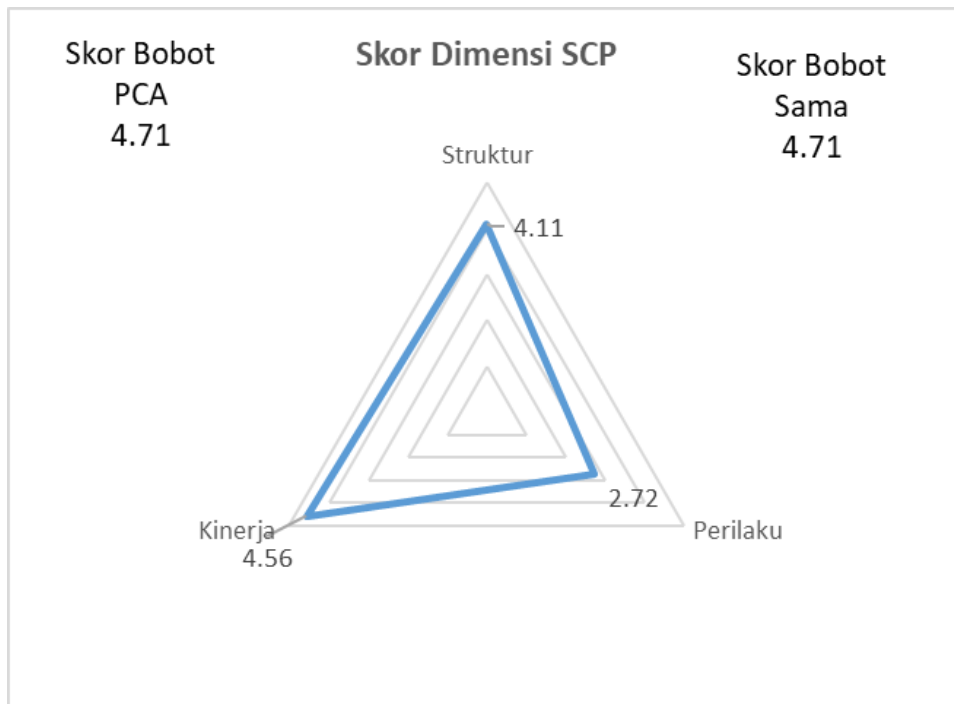
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.54 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Kalimantan Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Kalimantan Utara tahun 2022 ini sebesar 4,71 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobotsama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,71 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.54 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,56. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Kalimantan Utara ini telah mendorong

terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kalimantan Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.54. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Dimensi SCP



4.2.25. Provinsi Sulawesi Utara

4.2.25.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.28 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Utara terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Real Estate; 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 3 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi yaitu 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Informasi dan Komunikasi; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi; dan 4) Real Estate. Sedangkan, 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi

yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Jasa Perusahaan; 7) Jasa Pendidikan; dan 8) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, dari sisi perilaku, satu responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti adanya asosiasi yang mengatur harga. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, Masing-masing responden menyatakan bahwa jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain karena produk seperti sayuran berasal dari dataran tinggi. Seluruh responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Utara. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Utara. Dari sisi kebijakan, Sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Utara. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh Sebagian besar responden.

Tabel 4.28 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Utara tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real Estate 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah

	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti adanya asosiasi yang mengatur harga.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain karena produk seperti sayuran berasal dari dataran tinggi.
Hambatan investasi	100% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Sulawesi Utara.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Utara.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

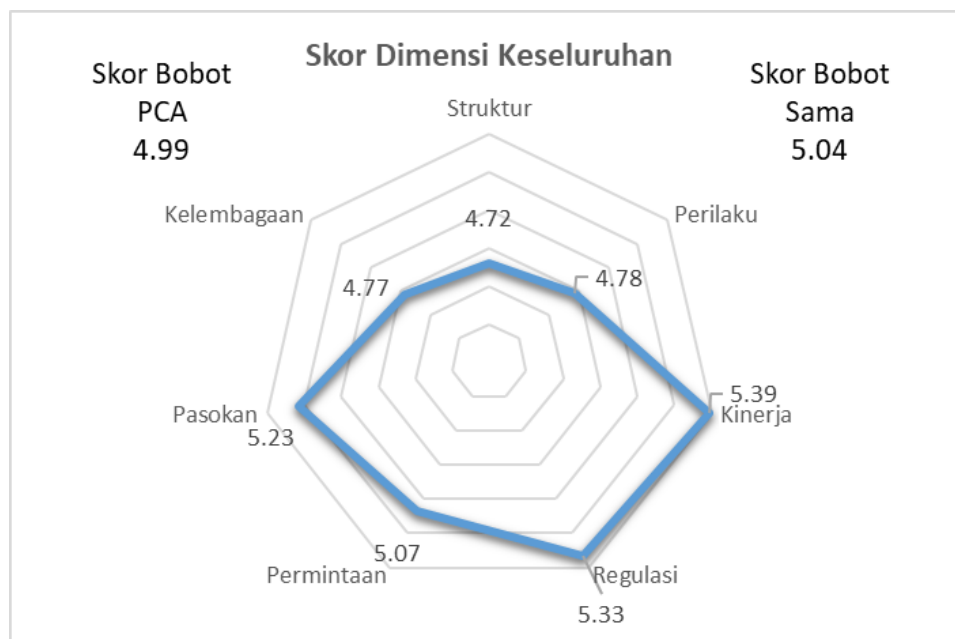
4.2.26. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,04 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,68. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, penawaran, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.55 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Utara tahun 2022 ini sebesar 4,99 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,04 dengan kategori yang sama. Grafik 4.55 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,39. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Sulawesi Utara terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Grafik 4.55. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara Dimensi Keseluruhan

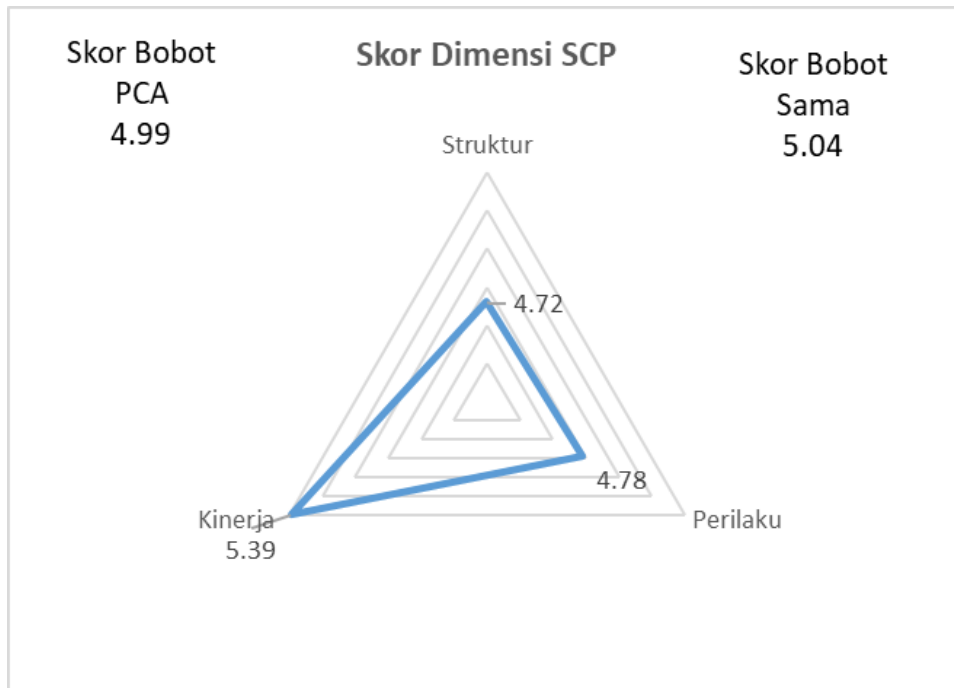


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.56 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Utara tahun 2022 ini sebesar 4,99 atau terkategori sedikit tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,04 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.56 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,39. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sulawesi Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi struktur menunjukkan bahwa struktur pasar di Sulawesi Utara terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.56. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Utara Dimensi SCP



4.2.26. Provinsi Sulawesi Tengah

4.2.26.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.29 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Tengah terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa keuangan dan asuransi; 2) Jasa pendidikan, dan 3) Transportasi dan pergudangan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 13 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; dan 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Informasi dan

Komunikasi; 9) Jasa Keuangan dan Asuransi; 10) Real Estate; 11) Jasa Perusahaan; 12) Jasa Pendidikan; 13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa industri pengolahan memiliki keuntungan terbesar. Sedangkan, sebagian responden lainnya menyatakan pertambangan dan penggalan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Satu responden menyatakan terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan adanya resistensi masyarakat dan juga ada oknum tertentu berperan di luar sistem yang menjadi penghambat dan menjadikan biaya investasi tinggi.

Sebagian responden menyatakan ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Tengah karena ada pihak yang mengatur tender. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tengah. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sector pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan kuliner.

Tabel 4.29 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Tengah tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian 2. Industri pengolahan 3. Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa keuangan dan asuransi 2. Jasa pendidikan 3. Transportasi dan pergudangan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi rendah
	2	Konsentrasi rendah
	3	Konsentrasi rendah
	4	Konsentrasi moderat
	5	Konsentrasi moderat
	6	Konsentrasi rendah
	7	Konsentrasi rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi rendah
	9	Konsentrasi rendah
	10	Konsentrasi rendah
	11	Konsentrasi rendah
	12	Konsentrasi rendah
	13	Konsentrasi rendah
	14	Konsentrasi rendah
	15	Konsentrasi rendah
Hambatan Berusaha	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa industri pengolahan, sedangkan 50% responden lainnya menyatakan pertambangan dan peenggalian adalah sektor dengan keuntungan terbesar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	25% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	25% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Tengah, dikarenakan adanya resistensi masyarakat dan juga ada oknum tertentu berperan di luar sistem yang menjadi penghambat dan menjadikan biaya investasi tinggi.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab terdapat kasus persaingan usaha karena ada pihak yang mengatur tender.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tengah.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan kuliner.

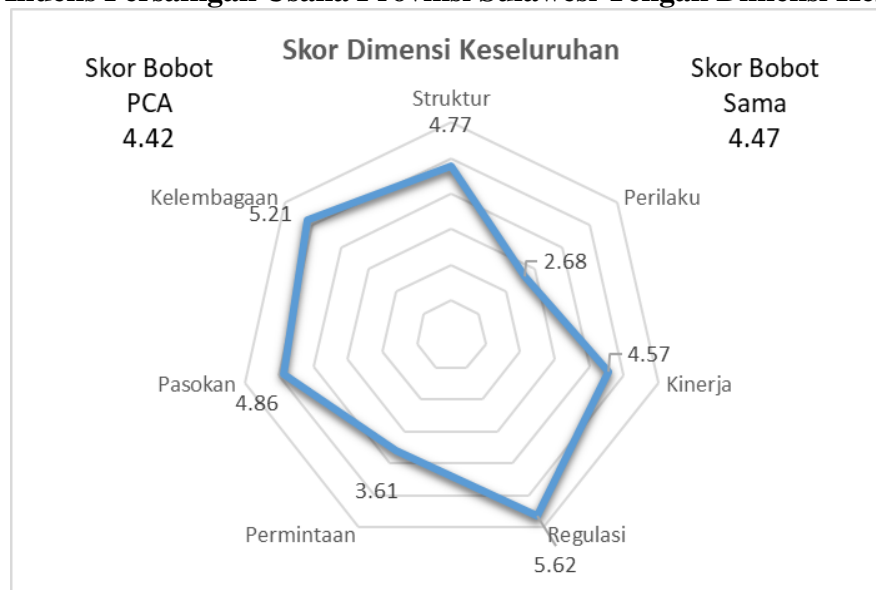
4.2.27. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,47 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,02. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi perilaku, kinerja, regulasi, penawaran, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.57 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Tengah tahun 2022 ini sebesar 4,42 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,47 dengan kategori yang sama. Grafik 4.57 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,62. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,68. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Tengah masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

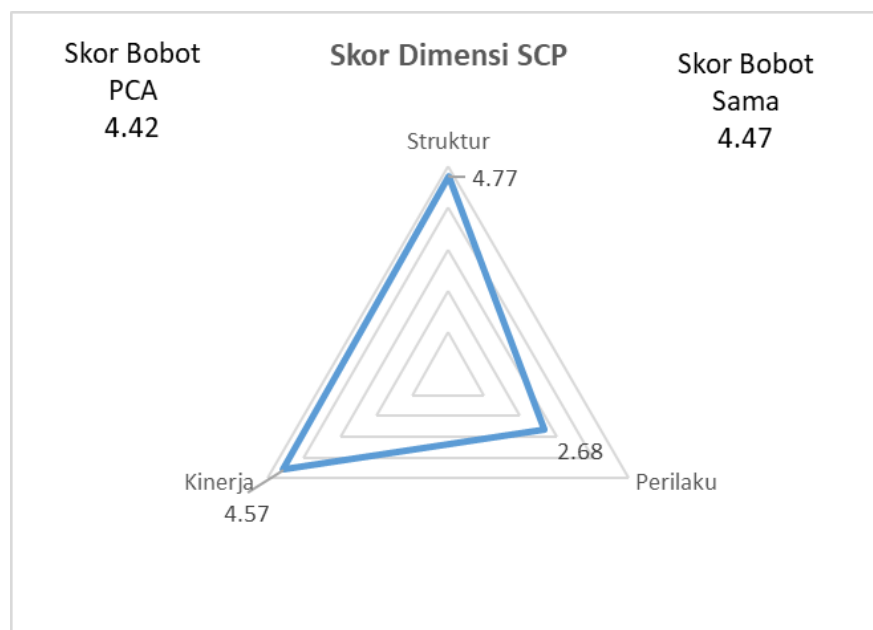
Grafik 4.57. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.58 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Tengah tahun 2022 ini sebesar 4,42 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,47 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.58 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,77. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,68. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar yang ada di Sulawesi Tengah ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.58. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Dimensi SCP



4.2.27. Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.27.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.30 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Selatan terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3) Jasa keuangan dan asuransi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Jasa keuangan dan asuransi; 2) Informasi dan komunikasi, dan 3) Industri pengolahan. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pengadaan Listrik, Gas; dan 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Konstruksi; 3) Transportasi dan Pergudangan; dan 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Real Estate. Sedangkan, 8 sektor dinilai oleh para responden memiliki

konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan 5) Jasa Keuangan dan Asuransi; 6) Jasa Perusahaan; 7) Jasa Pendidikan; dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh masalah permodalan dan perizinan. Sementara itu, dari sisi perilaku, satu responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kesepakatan atau diatur oleh negara. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan terbesar, masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, dan penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Selatan. Hal ini, dikarenakan adanya resistensi masyarakat. Satu responden menyatakan ada kasus persaingan usaha di Sulawesi Selatan. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya di sektor makanan.

Tabel 4.30 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Selatan tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 3. Jasa keuangan dan asuransi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian 2. Informasi dan komunikasi 3. Industri pengolahan 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Moderat

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh masalah permodalan dan perizinan.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti kesepakatan atau diatur oleh negara.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	Masing-masing responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, dan penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor dengan keuntungan terbesar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden terdapat hambatan investasi di Sulawesi Selatan, dikarenakan adanya resistensi masyarakat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	25% responden menjawab ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Selatan.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya di sektor makanan.

4.2.28. Indeks Persaingan Usaha

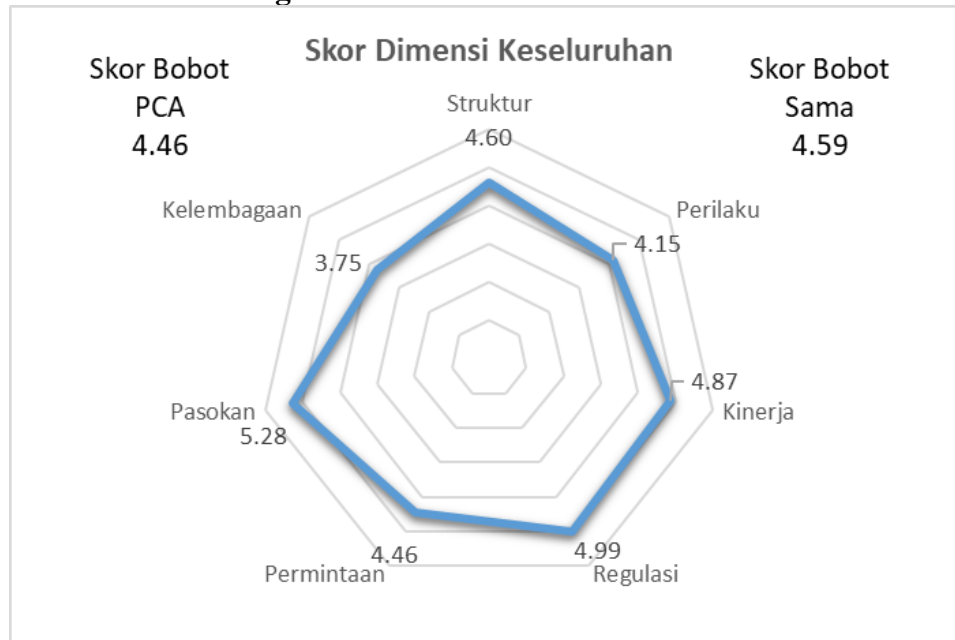
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dengan

menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,59 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,60. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, regulasi dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.59 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Selatan tahun 2022 ini sebesar 4,46 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,59 dengan kategori yang sama. Grafik 4.59 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,28. Sementara, dimensi kelembagaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,75. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasokan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengaruh keutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.59. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Dimensi Keseluruhan



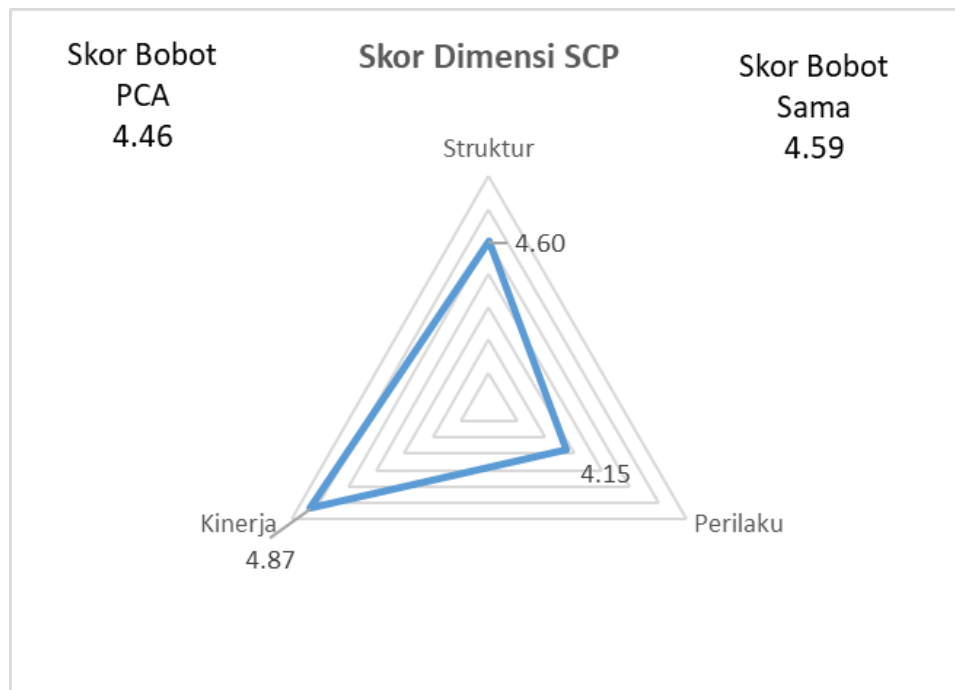
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.60 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Selatan tahun 2022 ini sebesar 4,46 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,59 atau dalam kategori sedikit tinggi. Grafik 4.60 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,87. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,15. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sulawesi Selatan ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologitinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski

memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Selatan masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.60. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Dimensi SCP



4.2.28. Provinsi Sulawesi Tenggara

4.2.28.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.31 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan persepsi responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian responden menyatakan bahwa persaingan usaha di Sulawesi Tenggara terkategori tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Akomodasi dan Makan Minum; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Jasa Perusahaan. Hal ini wajar jika sektor- sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Konstruksi; 3) Real Estate. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti sektor pertambangan dan penggalan cenderung memiliki hambatan masuk industri yang tinggi antara lain hambatan permodalan, dan regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yakni 1) Pengadaan Listrik, Gas; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Kemudian terdapat 6 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Informasi dan

Komunikasi; 5) Jasa Pendidikan; 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 7 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi yang rendah, antara lain 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Transportasi dan Pergudangan; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Jasa Keuangan dan Asuransi; 5) Real Estate; 6) Jasa Perusahaan dan 7) Kegiatan Sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan sebagian responden menyatakan terdapat hambatan akibat adanya masalah permodalan. Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif sama dibanding daerah sekitar. Seluruh responden juga menyatakan tidak terdapat adanya hambatan investasi di Sulawesi Tenggara. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian responden.

Tabel 4.31 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Tenggara tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi dan Makan Minum 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3. Jasa Perusahaan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalan 2. Konstruksi 3. Real Estate 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Tinggi
	6	Konsentrasi Moderat

Pertanyaan	Deskripsi	
	7	Konsentrasi Rendah
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan sebagian menyatakan terdapat adanya hambatan permodalan.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	

Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	100% responden menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih murah (relatif sama) dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	50% responden menyatakan tidak terdapat hambatan investasi di Sulawesi Tenggara. Sebagian responden menyatakan hambatan investasi terjadi akibat resistensi masyarakat regulasi yang sulit.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, satu responden menjawab ada pihak yang mengatur tender.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Tenggara
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	50% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

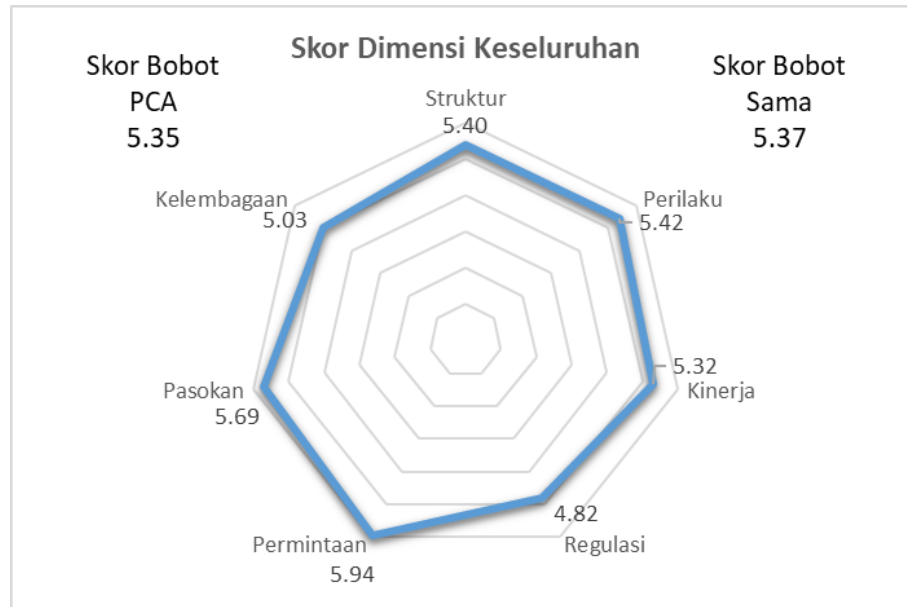
4.2.29. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 5,37 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,01. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, kinerja, dan permintaan.

- **Indeks Dimensi Keseluruhan**

Grafik 4.61 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Tenggara tahun 2022 ini sebesar 5,35 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobotsama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,37 dengan kategori yang sama. Grafik 4.61 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi permintaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,94. Sementara dimensi regulasi merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 4,82. Hal tersebut mengindikasikan dari sisi permintaan, produk-produk barang dan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung bersifat elastis, relatif memiliki banyak varian sehingga menghasilkan pertumbuhan pasar yang relatif tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi regulasi menunjukkan bahwa aspek regulasi bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini belum mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

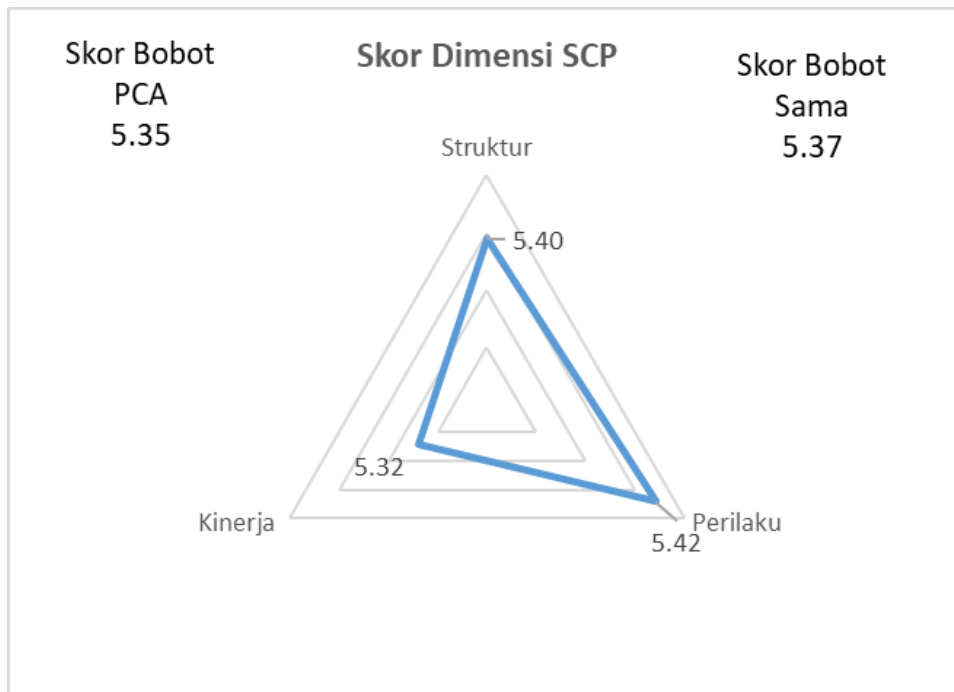
Grafik 4.61. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.62 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Tenggara tahun 2022 ini sebesar 5,35 atau terkategori cukup tinggi. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 5,37 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.62 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi perilaku memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,42. Sementara dimensi kinerja merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 5,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perilaku industri mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Sementara, dimensi kinerja dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada tidak mampu beroperasi secara efisien, memiliki produktifitas yang relatif kurang baik, tidak mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan belum mampu menghasilkan profitabilitas yang wajar.

Grafik 4.61. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Dimensi SCP



4.2.29. Provinsi Gorontalo

4.2.29.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.32 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Gorontalo berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Gorontalo terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Real estate; 2) Pertambangan dan penggalian, dan 3) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 8 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6) Informasi dan komunikasi; 7) Real estate; dan 8) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian terdapat 6 sektor yang dipersepsikan

terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Transportasi dan pergudangan; 5) Jasa perusahaan; dan 6) Jasa pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti asosiasi. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan 50% responden lainnya menyatakan bahwa real estate dan pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Gorontalo relatif lebih murah dibanding daerah sekitar. Seluruh responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Gorontalo, seperti resistensi masyarakat dan regulasi perizinan. Sebagian besar responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Gorontalo. Dari sisi kebijakan, sebagian responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Gorontalo. Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian responden.

Tabel 4.32 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Gorontalo tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real estate 2. Pertambangan dan penggalian 3. Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah

	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan 75% responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi, seperti asosiasi.	

<p>Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar</p>	<p>50% responden menyatakan bahwa industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan 50% responden lainnya menyatakan bahwa real estate dan pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.</p>
<p>Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain</p>	<p>50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar.</p>
<p>Hambatan investasi</p>	<p>100% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Gorontalo, seperti resistensi masyarakat dan regulasi perizinan.</p>
<p>Kasus persaingan usaha yang pernah ada</p>	<p>75% responden menjawab ada kasus persaingan usaha.</p>

Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	50% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Gorontalo.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	50% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

4.2.30. Indeks Persaingan Usaha

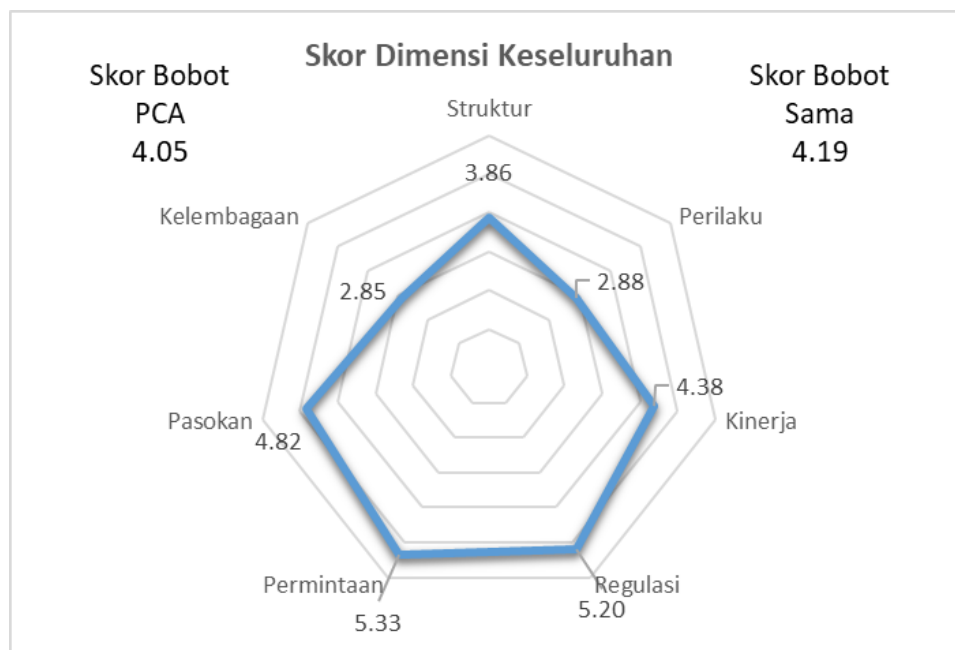
Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,19 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,25. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.63 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Gorontalo tahun 2022 ini sebesar 4,05 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,19 dengan kategori yang sama. Grafik 4.63 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau

besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi permintaan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,33. Sementara dimensi kelembagaan merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,85. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan padadaerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan yang ada di Provinsi seperti pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha, diketahuinya keberadaan KPPU dan pengaruh keutamaan aspek persaingan usaha dalam perencanaan daerah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi.

Grafik 4.63. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo Dimensi Keseluruhan



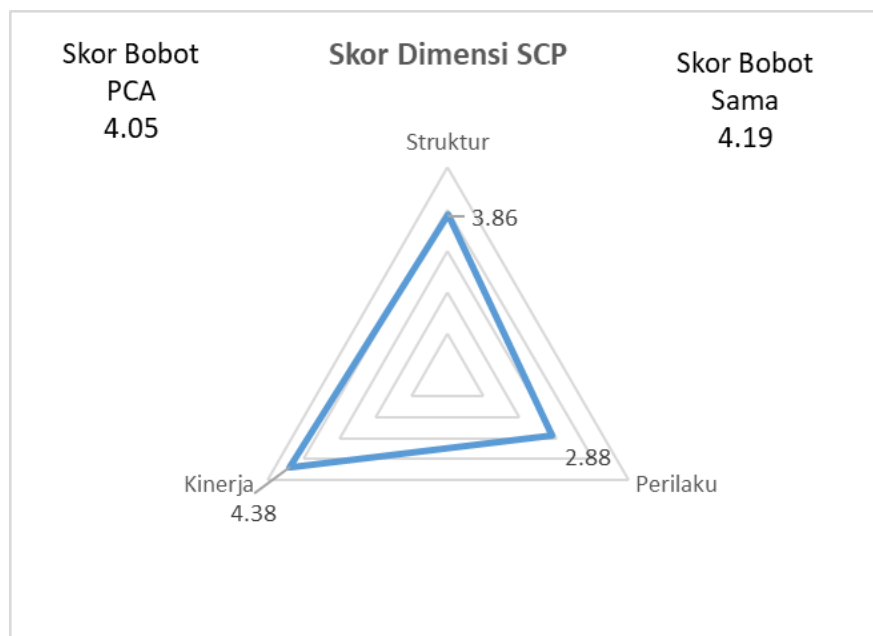
- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.64 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Gorontalo hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Gorontalo tahun 2022 ini sebesar 4,05 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,19 atau masih dalam kategori yang

sama. Grafik 4.64 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,38. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 2,88. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Gorontalo ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Gorontalo masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.64. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Gorontalo Dimensi SCP



4.2.30. Provinsi Sulawesi Barat

4.2.30.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.33 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Sulawesi Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Sulawesi Barat terkategori moderat, di mana sebagian responden mempersepsikan rendah dan tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Konstruksi. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Transportasi dan pergudangan, dan 3) Pengadaan listrik dan gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 11 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pengadaan listrik, gas; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Informasi dan komunikasi; dan 8) Jasa keuangan dan asuransi; 9) Real estate; 10) Jasa pendidikan; dan 11) Jasa

kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian terdapat 4 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan; dan 4) Jasa perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Masing-masing responden lainnya menyatakan informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat relatif lebih murah dibanding daerah sekitar, khususnya pada bahan-bahan pokok. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Barat, khususnya terkait regulasi dan resistensi masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Sulawesi Barat. Dari sisi kebijakan, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Barat. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.33 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Sulawesi Barat tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Konstruksi 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Moderat
7	Konsentrasi Moderat	

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Moderat
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sector dengan keuntungan terbesar. Masing-masing responden lainnya menyatakan informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Pertanyaan	Deskripsi
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan harga produk barang/jasa yang sama lebih murah dibandingkan dengan daerah sekitar, khususnya pada bahan-bahan pokok.
Hambatan investasi	50% responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulawesi Barat, khususnya terkait regulasi dan resistensi masyarakat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	75% responden menjawab ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Sulawesi Barat.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

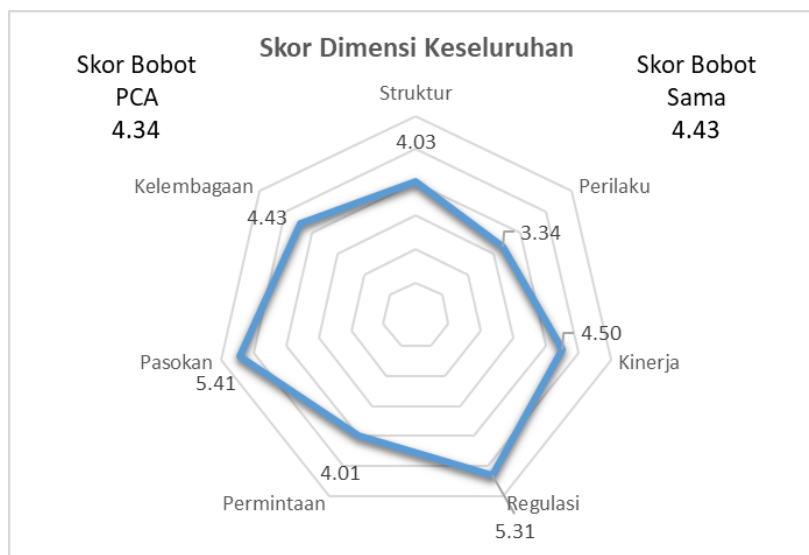
4.2.31. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,43 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,93. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, kinerja, regulasi, penawaran, dan kelembagaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.65 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Sulawesi Barat tahun 2022 ini sebesar 4,34 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,43 dengan kategori cukup tinggi. Grafik 4.65 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi pasokan memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,41. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,34. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasokan pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

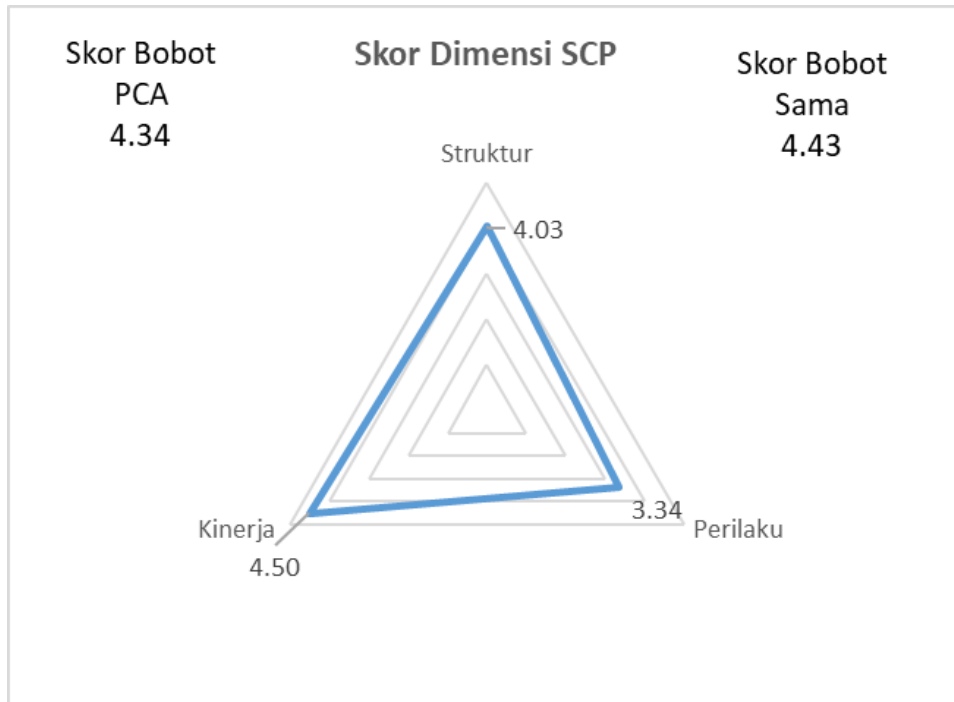
Grafik 4.65. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.66 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Sulawesi Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Sulawesi Barat tahun 2022 ini sebesar 4,34 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,43 dengan kategori yang sama. Grafik 4.66 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,50. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,34. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Sulawesi Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Sulawesi Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.66. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Dimensi SCP



4.2.31. Provinsi Maluku

4.2.31.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.34 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Maluku berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Maluku terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Industri Pengolahan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik dan gas; 2) Real estate, dan 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) Informasi dan komunikasi; 5) Real estate; dan 6) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian terdapat 9 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi

rendah, yakni 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Industri pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 7) Jasa keuangan dan asuransi; 8) Jasa perusahaan; dan 9) Jasa pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Maluku. Sedangkan satu responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh administrasi. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Masing-masing satu responden lainnya menyatakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri pengolahan yang memiliki keuntungan besar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa seluruh responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Maluku relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Maluku, dikarenakan adanya kasus resistensi masyarakat, dan perizinan. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Maluku, seperti dalam proses tender. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku. Sedangkan satu responden menyatakan terdapat kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha, seperti peraturan investasi, kebijakan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan

persaingan usaha oleh seluruh responden.

Tabel 4.34 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Maluku

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Maluku tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Industri Pengolahan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Listrik dan Gas 2) Real Estate 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Rendah

Pertanyaan	Deskripsi	
	8	Konsentrasi Rendah
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	25% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar, hal ini disebabkan oleh administrasi. Sedangkan, 75% responden menyatakan tidak adanya hambatan di provinsi ini.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	75% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan.	

Pertanyaan	Deskripsi
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Masing-masing satu responden lainnya menyatakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri pengolahan yang memiliki keuntungan besar.
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	100% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Maluku, dikarenakan adanya kasus resistensi masyarakat, dan perizinan.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, 50% responden menjawab adanya kasus persaingan usaha seperti dalam proses tender.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku. Sedangkan satu responden menyatakan terdapat kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha, seperti peraturan investasi, kebijakan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah.

Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.
--	---

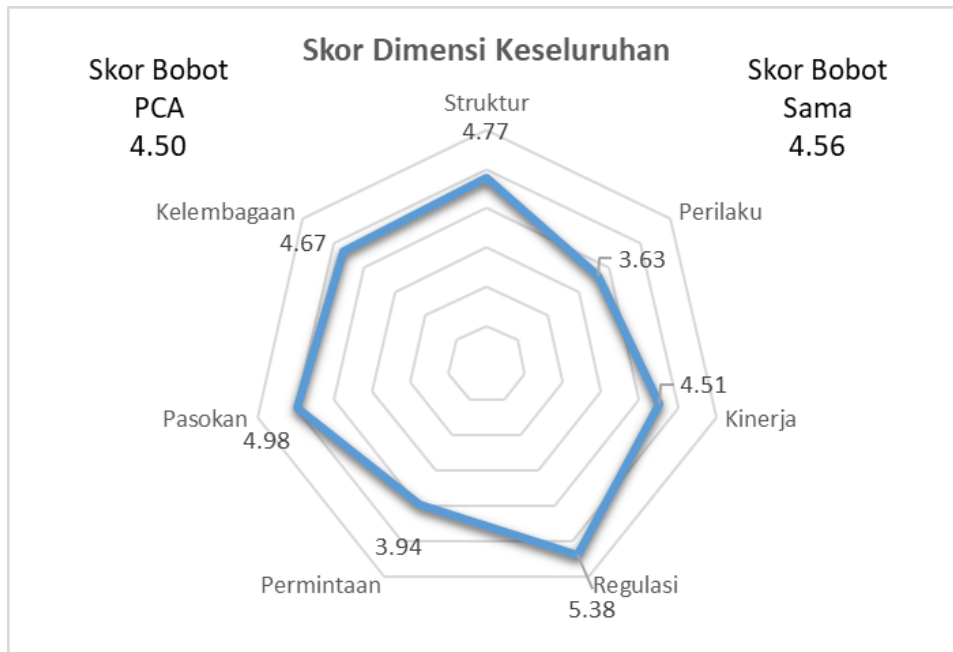
4.2.32. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,56 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,68. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi penawaran.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.67 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Maluku tahun 2022 ini sebesar 4,50 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,56 dengan kategori sedikit tinggi. Grafik 4.67 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,38. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,63. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Maluku masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.67. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Dimensi Keseluruhan

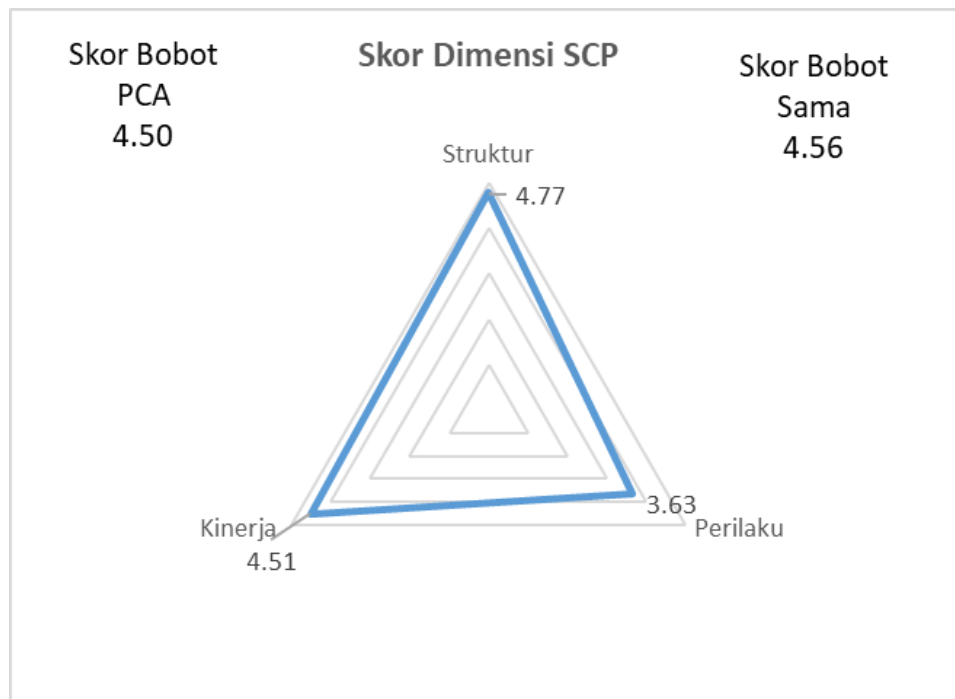


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.68 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Maluku tahun 2022 ini sebesar 4,50 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,56 atau dalam kategori yang cukup tinggi. Grafik 4.68 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,77. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,63. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Maluku ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Maluku masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.68. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara Dimensi SCP



4.2.32. Provinsi Maluku Utara

4.2.32.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.35 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Maluku Utara berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Maluku Utara terkategori moderat, di mana sebagian responden mempersepsikan rendah dan tinggi. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pertambangan dan Penggalan; 2) Informasi dan komunikasi, dan 3) Pengadaan listrik dan gas. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan listrik, gas; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan 5) Real estate. Kemudian terdapat 10 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi rendah, yakni

1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan; 4) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 5) Konstruksi; 5) Transportasi dan pergudangan; 6) Informasi dan komunikasi; 7) Jasa Keuangan dan asuransi 8) Jasa perusahaan; dan 9) Jasa pendidikan; dan 10) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan, 50% responden lainnya menyatakan masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Sebagian besar responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Maluku Utara, dikarenakan adanya resistensi masyarakat, isu lingkungan, institusi dan klasifikasi SDM. Sebagian responden menyatakan terdapat kasus persaingan usaha di Maluku Utara, seperti dalam proses tender. Sedangkan, sebagian lain menjawab sering kali antara pemegang proyek, seperti lobi-lobi atau kesepakatan dibelakang meja, dan pemerintah yang tidak konsisten dalam kebijakan. Dari sisi kebijakan, sebagian besar responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku Utara. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.35 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	50% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Maluku Utara tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan dan Penggalian 2) Informasi dan Komunikasi 3) Pengadaan Listrik dan Gas 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Moderat
	2	Konsentrasi Rendah
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Rendah
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Rendah

	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Moderat
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Rendah
	15	Konsentrasi Rendah
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Sedangkan, 50% responden lainnya menyatakan masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	25% responden menyatakan bahwa terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antar perusahaan dalam penentuan harga dan distribusi.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, sisanya menyatakan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena produk yang disediakan dipasok dari daerah lain.
Hambatan investasi	75% responden terdapat hambatan investasi di Maluku Utara, dikarenakan adanya resistensi masyarakat, isu lingkungan, institusi dan klasifikasi SDM.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha. Sedangkan, 50% lainnya menjawab sering kali antara pemegang proyek, seperti lobi-lobi atau kesepakatan dibelakang meja, dan pemerintah yang tidak konsisten dalam kebijakan.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	75% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Maluku Utara.
Platform belanja digital (marketplace, e-commerce) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.

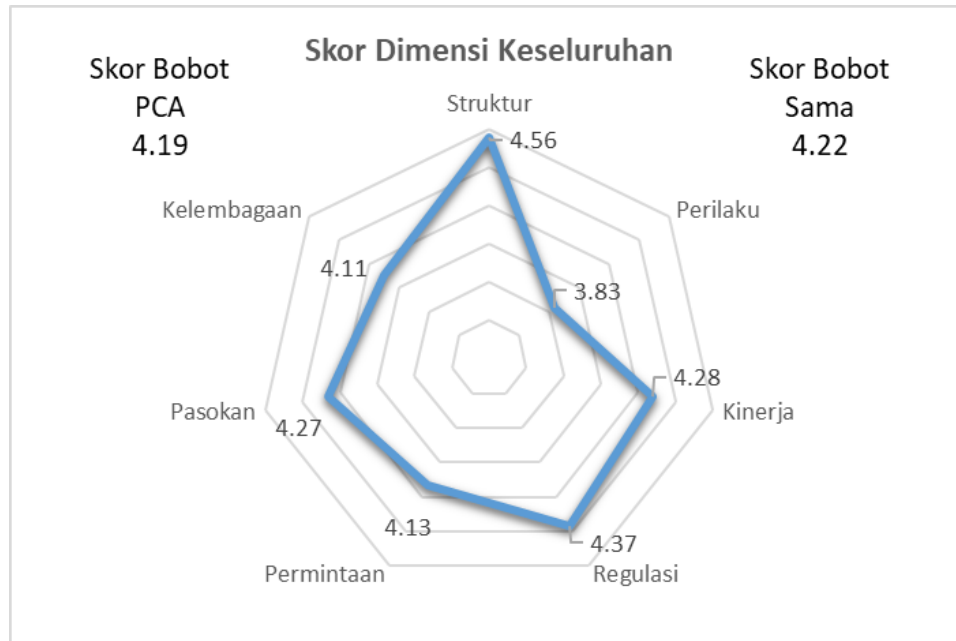
4.2.33. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,22 atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,51. Penurunan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku, dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.69 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Maluku Utara tahun 2022 ini sebesar 4,19 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,22 dengan kategori yang sama. Grafik 4.69 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,56. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,83. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Maluku Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.69. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara Dimensi Keseluruhan

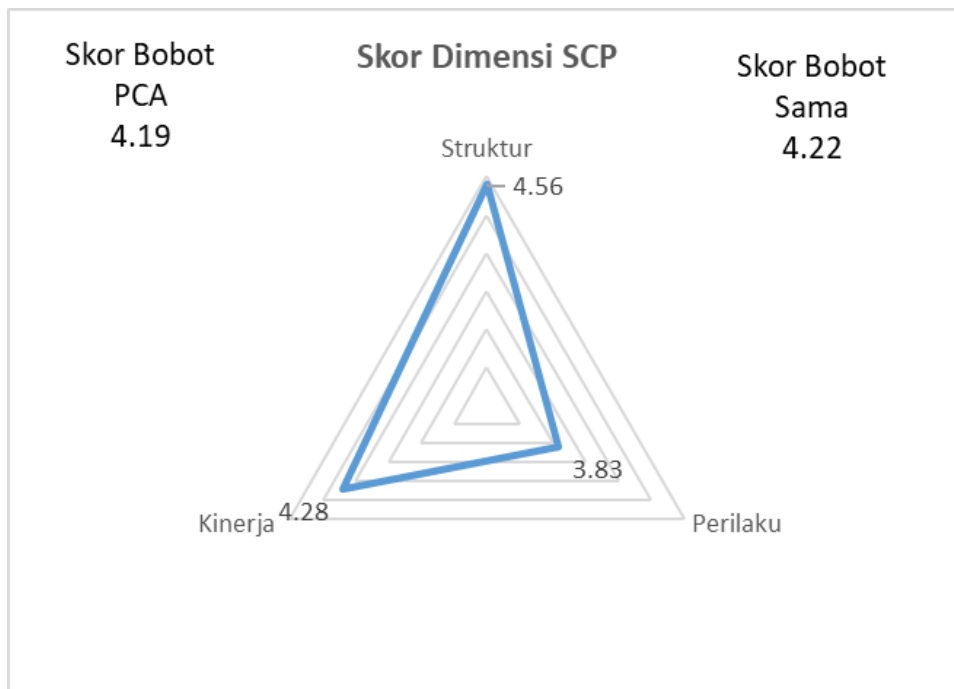


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.70 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Maluku Utara hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Maluku Utara tahun 2022 ini sebesar 4,19 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,22 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.70 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi struktur memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,56. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,83. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur industri yang ada di Maluku Utara ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan disana relatif banyak, hambatan usaha relatif sedikit, konsentrasi industri yang rendah, dan terdapat banyak diferensiasi produk.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Maluku Utara masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.70. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Maluku Utara Dimensi SCP



4.2.33. Provinsi Papua Barat

4.2.33.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.36 menunjukkan kondisi persaingan usaha di Provinsi Papua Barat berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Provinsi Papua Barat terkategori tinggi, di mana sebagian besar responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, 2) Konstruksi, dan 3) Transportasi dan Pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian, responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, dan 3) Informasi dan Komunikasi. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif, seperti pengadaan listrik, gas yang memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 5 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yakni 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Jasa Keuangan dan Asuransi; 3) Real Estate; 4) Jasa Perusahaan; dan 5) Jasa Pendidikan. Kemudian, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 3) Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5) Transportasi dan Pergudangan; 6) Informasi dan Komunikasi; 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan 3 sektor dinilai oleh para responden memiliki konsentrasi rendah, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Konstruksi; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan adanya masalah perizinan, permodalan, dan konektivitas yang terhambat. Mengenai sektor dengan keuntungan terbesar, sebagian responden menyatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Sementara itu, dari sisi perilaku, seluruh responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Papua Barat relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Seluruh responden juga menyatakan bahwa terdapat adanya hambatan investasi di Papua Barat, khususnya masalah resistensi masyarakat. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh sebagian besar responden.

Tabel 4.36 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat

Pertanyaan	Deskripsi
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	75% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Papua Barat tinggi.

3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2) Konstruksi 3) Transportasi dan Pergudangan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Pengadaam Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 3. Informasi dan Komunikasi 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Rendah
	2	Konsentrasi Tinggi
	3	Konsentrasi Moderat
	4	Konsentrasi Moderat
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Moderat
	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Rendah
	10	Konsentrasi Moderat

	11	Konsentrasi Tinggi
	12	Konsentrasi Tinggi
	13	Konsentrasi Tinggi
	14	Konsentrasi Tinggi
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	75% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar akibat mahalannya permodalan, konektivitas yang terhambat, dan perizinan.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	
Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	50% responden harga produk barang/jasa yang sama lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar karena dipasok dari daerah lain.	
Hambatan investasi	50% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Papua Barat, khususnya terkait resistensi masyarakat.	
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	100% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.	
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	100% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi Papua Barat.	
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	75% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha.	

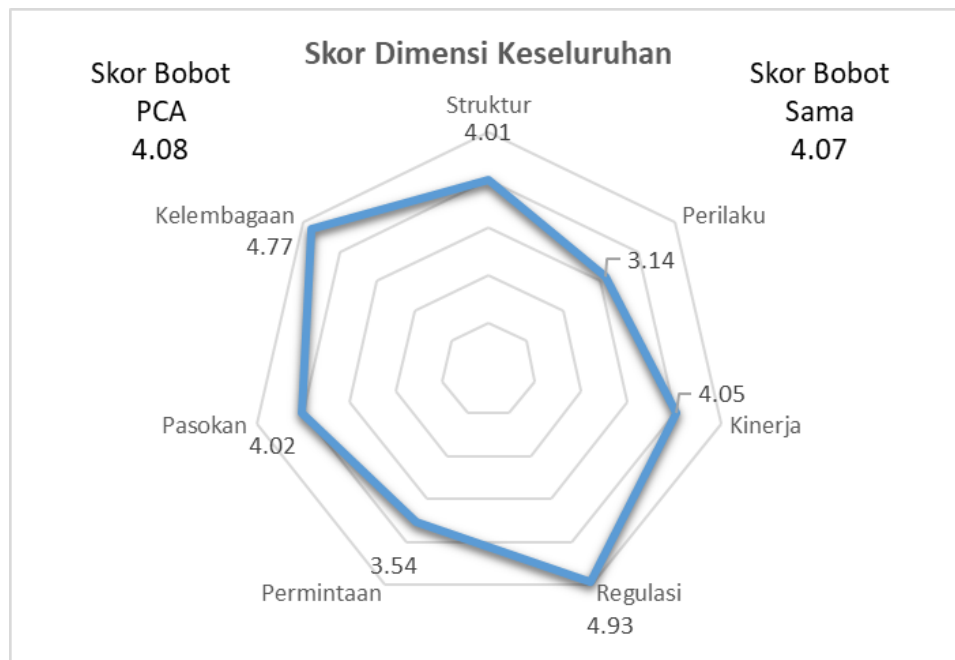
4.2.34. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,07 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,95. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.71 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Papua Barat tahun 2022 ini sebesar 4,08 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,07 dengan kategori yang sama. Grafik 4.71 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,93. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,14. Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi pada daerah yang ada di Provinsi ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Sementara itu, rendahnya skor dimensi perilaku menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.71. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat Dimensi Keseluruhan

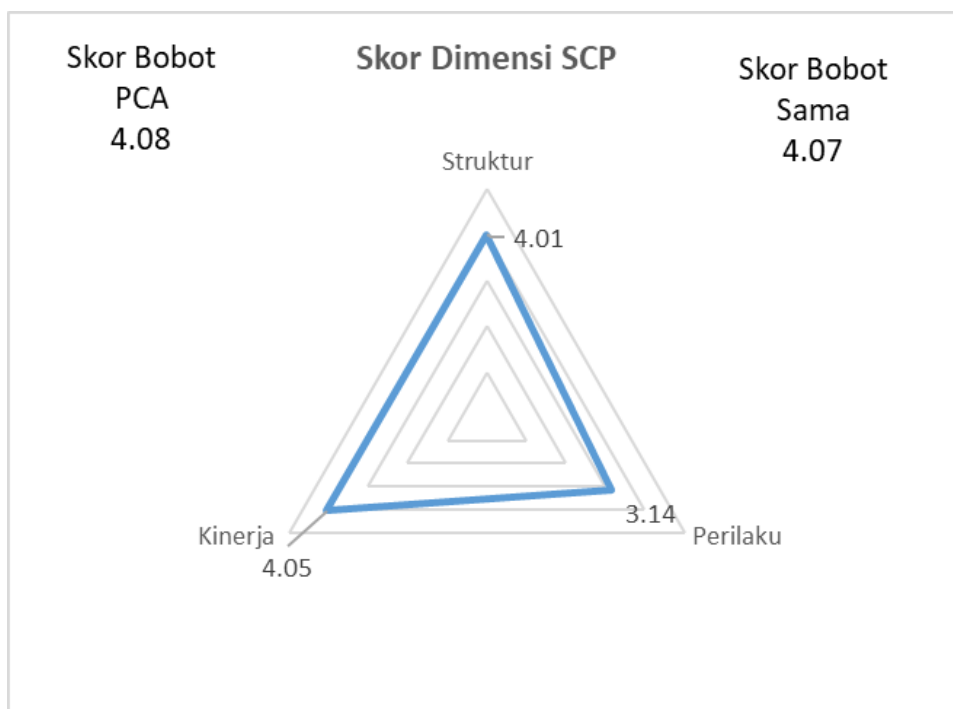


- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.72 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua Barat hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Papua Barat tahun 2022 ini sebesar 4,08 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,07 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.72 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,05. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,14. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Papua Barat ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktifitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar.

Sementara, dengan dimensi perilaku dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa meski memiliki kinerja yang baik, namun perilaku industri belum mampu mendorong persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua Barat masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

Grafik 4.72. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Barat Dimensi SCP



4.2.34. Provinsi Papua

4.2.34.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.37 menunjukkan kondisi persaingan usaha di provinsi Papua berdasarkan persepsi 4 responden yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum persaingan usaha di Papua terkategori tinggi, di mana seluruh responden mempersepsikan demikian. Kemudian, jika dilihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, diketahui bahwa sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah 1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) Penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 3) Transportasi dan pergudangan. Hal ini wajar jika sektor-sektor tersebut dipersepsikan oleh para responden memiliki persaingan yang tinggi mengingat karakteristik sektor-sektor tersebut memang mendekati struktur pasar yang kompetitif antara lain jumlah pelaku usaha (pemasok) banyak, relatif rendahnya hambatan masuk industri/pasar, relatif rendahnya konsentrasi pasar dan banyaknya varian produk dalam sektor tersebut. Dengan demikian, karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku industri yang sehat dan menghasilkan kinerja pasar yang baik, antara lain peningkatan efisiensi, produktivitas serta profitabilitas yang wajar.

Kemudian responden juga mempersepsikan sektor-sektor berikut memiliki tingkat persaingan yang rendah yakni 1) Pengadaan listrik dan gas; 2) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Dari 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, 3 sektor yang dipersepsikan rendah tersebut, memang mencerminkan struktur pasar yang tidak atau kurang kompetitif.

Dilihat dari konsentrasi industri, terdapat 2 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi tinggi, yaitu 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan 2) Pengadaan listrik, gas. Kemudian, terdapat 7 sektor yang dipersepsikan terkonsentrasi moderat, yakni 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor 4) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 5) Transportasi dan pergudangan; 5) Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6) Jasa pendidikan; dan 7) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal tersebut dimungkinkan adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, meski dari sisi pelaku usaha relatif banyak serta tidak adanya hambatan masuk.

Secara umum, sebagian responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Papua. Sementara itu, dari sisi perilaku, sebagian responden menyatakan tidak terdapat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga. Mengenai sektor yang memiliki keuntungan besar, 50% responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, 50% lainnya menyatakan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.

Dari sisi kinerja pasar, berdasarkan indikator harga diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan harga barang dan jasa di Provinsi Papua relatif lebih mahal dibanding daerah sekitar. Seluruh responden menyatakan terdapat hambatan investasi di Papua, dikarenakan adanya hak ulayat dan adat. Sebagian responden menyatakan tidak terdapat kasus persaingan usaha di Papua. Dari sisi kebijakan, sebagian responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Papua. Platform belanja digital (*marketplace, e-commerce*) dianggap dapat meningkatkan persaingan usaha oleh seluruh responden, khususnya dalam kebutuhan rumah tangga.

Tabel 4.37 Deskripsi Kondisi Persaingan Usaha Provinsi Papua

Pertanyaan	Deskripsi	
Kondisi Persaingan Usaha di Daerah	100% responden menyatakan bahwa kondisi persaingan usaha di Papua tinggi.	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Penyediaan akomodasi dan makan minum 3. Transportasi dan Pergudangan 	
3 (tiga) sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas 2. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 	
Rata-rata Konsentrasi Industri*)	Sektor	Rata-rata
	1	Konsentrasi Tinggi
	2	Konsentrasi Moderat
	3	Konsentrasi Rendah
	4	Konsentrasi Tinggi
	5	Konsentrasi Moderat
	6	Konsentrasi Rendah
	7	Konsentrasi Moderat

	8	Konsentrasi Moderat
	9	Konsentrasi Moderat
	10	Konsentrasi Rendah
	11	Konsentrasi Rendah
	12	Konsentrasi Rendah
	13	Konsentrasi Rendah
	14	Konsentrasi Moderat
	15	Konsentrasi Moderat
Hambatan Berusaha	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan bagi perusahaan untuk memasuki pasar.	
Ada atau tidaknya perilaku persaingan tidak sehat	50% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antar perusahaan dalam menentukan kesepakatan harga.	
Sektor dengan keuntungan atau mark-up terbesar	50% responden menyatakan bahwa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor dengan keuntungan terbesar. Sedangkan, 50% lainnya menyatakan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan keuntungan terbesar.	

Harga produk/barang dan jasa dibandingkan dengan daerah lain	75% responden menyatakan bahwa harga produk barang/jasa lebih mahal dibandingkan dengan daerah sekitar.
Hambatan investasi	100% responden menyatakan bahwa terdapat hambatan investasi di Papua, dikarenakan adanya hak ulayat dan adat.
Kasus persaingan usaha yang pernah ada	50% responden menjawab tidak ada kasus persaingan usaha.
Kebijakan daerah yang dapat menghambat persaingan usaha sehat	50% responden menyatakan tidak ada peraturan yang memberatkan persaingan usaha di Papua.
Platform belanja digital (<i>marketplace, e-commerce</i>) dapat meningkatkan persaingan usaha	100% responden menyatakan bahwa platform belanja digital meningkatkan persaingan usaha, khususnya dalam kebutuhan rumah tangga.

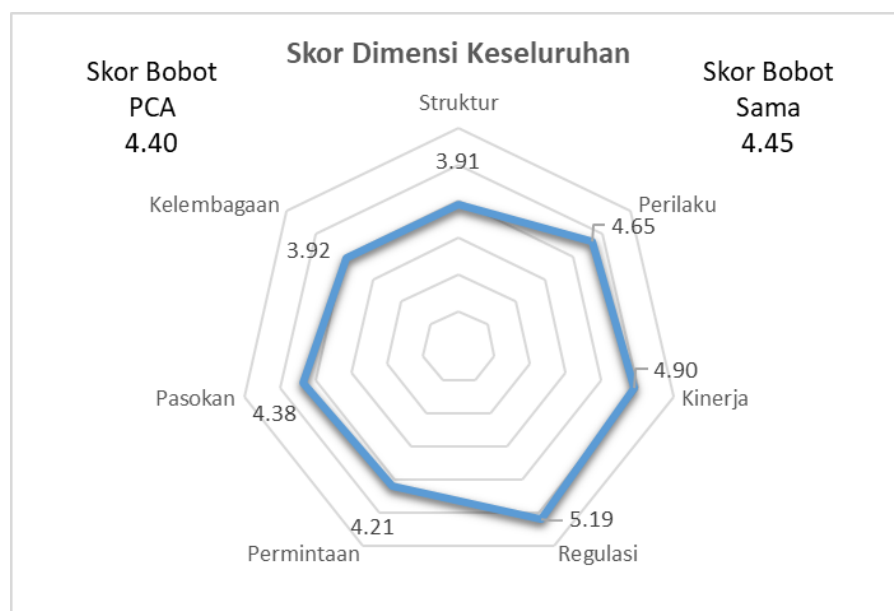
4.2.35. Indeks Persaingan Usaha

Terdapat 2 output indeks dalam perhitungan indeks persaingan usaha, yakni indeks persaingan usaha dengan dimensi keseluruhan dan dimensi SCP baik dengan pembobotan PCA maupun pembobotan sama. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha di Provinsi Papua dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama berada pada nilai sebesar 4,45 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.24. Peningkatan yang signifikan terjadi pada dimensi struktur, perilaku dan permintaan.

- Indeks Dimensi Keseluruhan

Grafik 4.73 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua dengan menggunakan seluruh dimensi yang ada. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha Papua tahun 2022 ini sebesar 4,40 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,45 dengan kategori yang sama. Grafik 4.73 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi regulasi memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 5,19. Sementara dimensi struktur merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,91. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar di Papua terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Papua masih relatif berperilaku yang mengarah pada persaingan tidak sehat, seperti pemanfaatan kekuatan pasar dalam penentuan harga, melakukan koordinasi dalam penetapan output dan harga, relatif kurang melakukan iklan dan relatif kurang melakukan riset dan pengembangan.

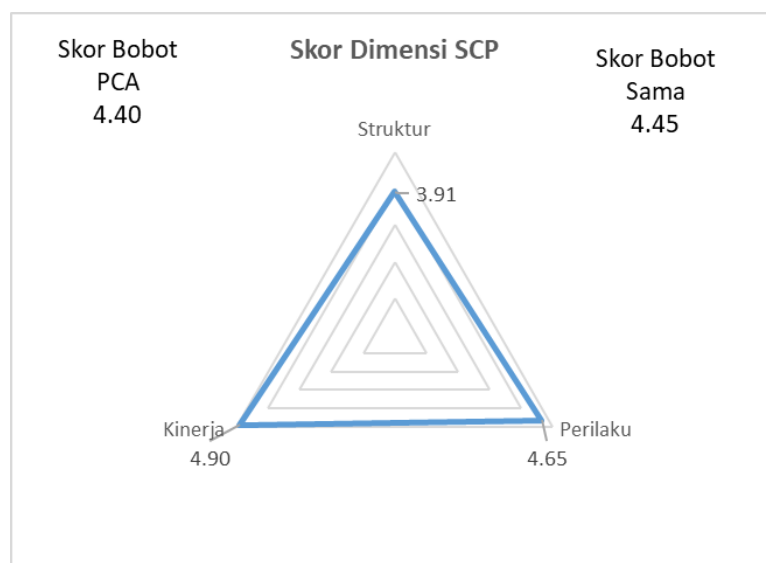
Grafik 4.73. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Dimensi Keseluruhan



- Indeks Dimensi SCP

Grafik 4.74 menunjukkan indeks persaingan usaha di Provinsi Papua hanya dengan menggunakan dimensi SCP. Dengan pembobotan PCA, skor indeks persaingan usaha di Papua tahun 2022 ini sebesar 4,40 atau terkategori moderat. Sementara dengan bobot sama antar dimensi, diketahui indeks persaingan usaha di Provinsi ini mencapai 4,45 atau masih dalam kategori yang sama. Grafik 4.74 juga menunjukkan rata-rata skor seluruh dimensi. Semakin besar skor menunjukkan kepentingan atau besar kontribusi terhadap indeks persaingan usaha sebelum dilakukan pembobotan. Dimensi kinerja memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 4,90. Sementara dimensi perilaku merupakan dimensi dengan rata-rata terendah sebesar 3,91. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pasar yang ada di Papua ini telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang tinggi. Atau dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah mampu beroperasi secara relatif efisien, memiliki produktivitas yang relatif baik, relatif mampu mengadopsi teknologi tinggi, dan menghasilkan profitabilitas yang relatif wajar. Sementara, dengan dimensi struktur dengan rata-rata skor terendah dapat diartikan bahwa struktur pasar yang ada di Papua terindikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Grafik 4.83. Indeks Persaingan Usaha Provinsi Papua Dimensi SCP



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan survei dan analisis untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diintegrasikan melalui pengukuran persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di daerah yang dilakukan dengan menggunakan survei persepsi terhadap pelaku usaha, pengambil kebijakan dan akademisi dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Dimensi lainnya dari lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk penting untuk indeks persaingan usaha.

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

- Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk. Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan.
- Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas.
- Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar.
- Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input.
- Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi monopoli.

- Dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

Penelitian ini dilakukan melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden Kadin, Akademisi, BankIndonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan akhir untuk indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan pembobotan sama untuk seluruh indikator atau pembobotan menggunakan *principal component analysis*. Metode yang digunakan untuk penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan metode *Additive Aggregation Method (AAM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Kenaikan indeks persaingan usaha pada tahun 2022 melanjutkan kenaikan pada tahun tahun 2021 dimana hal ini diduga karena Pandemi Covid-19 diduga tidak lagi berpengaruh secara signifikan dan perekonomian Kembali normal. Dimensi kinerja dan perilaku tersebut memiliki kontribusi sekitar 25 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2022 menunjukkan adanya sedikit perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah pada tahun 2021. Sebagai contoh, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan pada tahun ini masuk menjadi 10 provinsi dengan persaingan usaha

yang paling tinggi. Provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur tetap konsisten berada pada 10 (sepuluh) besar provinsi dengan skor indeks persaingan usaha tertinggi. Daftar 10(sepuluh) provinsi dengan skor indeks persaingan usaha terendah juga tetap konsisten setiap tahunnya memasukan Papua Barat, Maluku Utara dan Gorontalo..

Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah masih tidak mengalami perubahan. Tahun 2022, sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minuman merupakan sektor yang tetap memiliki persaingan usaha paling tinggi diikuti oleh sektor dengan urutan kedua setelah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor-sektor yang memiliki persaingan usaha yang rendah merupakan sektor-sektor yang masih sedikit pelaku usaha yang beroperasi di sektor-sektor tersebut.

5.2 Implikasi Kebijakan

Dari hasil indeks persaingan usaha ini diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk memberikan implikasi kebijakan dan proses penindakan lebih lanjut.

1. Berdasarkan hasil survei persepsi tahun 2022, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Aceh, Jambi, Sulawesi Barat, Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang dapat menjadi perhatian utama KPPU untuk memberikan sosialisasi kebijakan persaingan usaha.
2. Kajian dan advokasi kebijakan maupun proses inisiatif penyelidikan sangat mungkin dilakukan pada wilayah Provinsi Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Kebijakan ini perlu dilakukan terutama kepada provinsi yang memiliki ranking indeks yang turun dari tahun 2021 seperti Aceh, Jambi, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah yang sebelumnya tidak berada diatas 10 (sepuluh) ranking terendah.

3. Diperlukan adanya advokasi dan investigasi kepada sektor-sektor yang memiliki nilai indeks yang rendah seperti Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan Pengadaan Listrik dan Gas karena sektor-sektor tersebut secara konsisten memiliki nilai ranking indeks yang rendah.

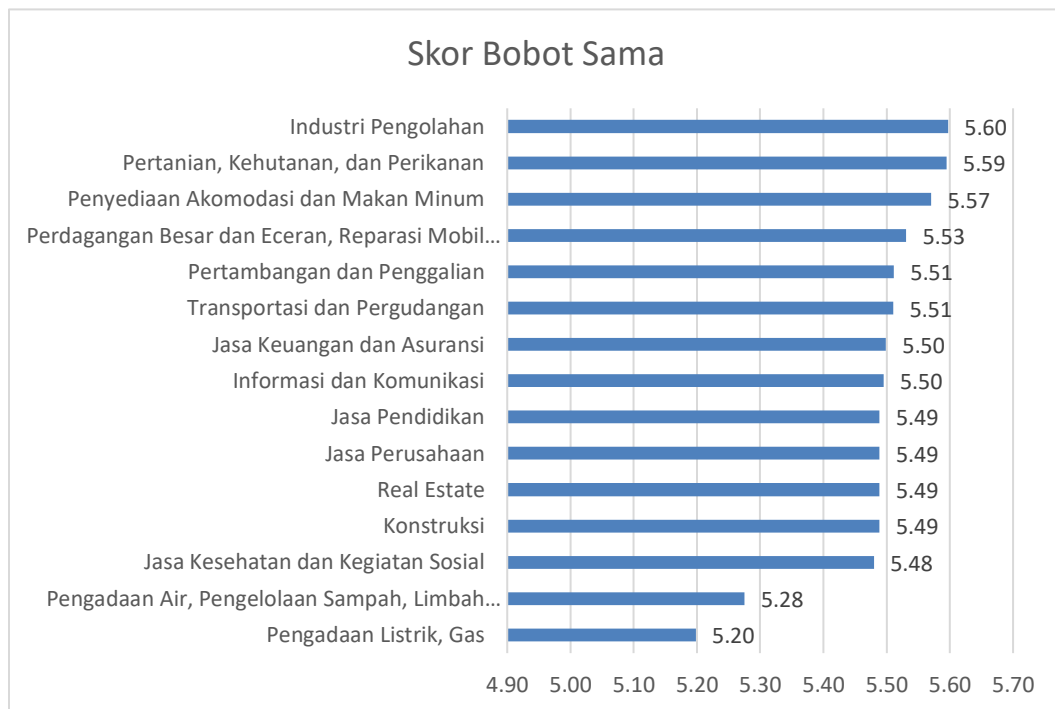
REFERENSI

- Azzam, A.M., 1997. Measuring Market Power and Cost-Efficiency Effects on Industrial Concentration, *Journal of Industrial Economics*, XLV(4): 377-386.
- Bain, J.S., 1951. Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940, *Quarterly Journal of Economics*, 65:293-324
- Bain, J.S., 1956. *Barriers to New Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Bain, J.S., 1959. *Industrial Organization*. New York: John Wiley
- Bresnahan, T. F., 1982. The oligopoly solution is identified, *Economic Letters*, 10: 87-92.
- Clarke, R, & S.W. Davies, 1982. Market Structure and Price-cost Margins, *Economica*, New Series, 49 (195):277-287
- Cowling, K. & M. Waterson, 1976. Price-cost Margin and Market Structure, *Economica*, 43:267-274
- Demsetz, H., 1973. Industry, structure, market rivalry, and public policy. *Journal of Law and Economics*, 16:1-9
- Griffith, R., Boone, J., Harrison, R., 2005. Measuring Competition, AIM Research Working Paper Series, ISSN, 1744-0009
- LP3E FEB, 2001. Identifikasi faktor-faktor penentu serta pemeringkatan daya saing antar daerah propinsi indonesia, Kerjasama Bank Indonesia dengan LP3E FEB UNPAD.
- Lipczynski, J. & J. Wilson, 2001. *Industrial Organization: An Analysis of Competitive Markets*.
Prentice Hall
- Lopez, R.A, Azzam, A.M., and Liron-Espana, C., 2002. Market Power and/Or Efficiency: A Structural Approach, *Review of Industrial Organization*, 20:115-126
- Marsden, P., 2006. *Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust*. Edward Elgar Publishing
- Nickell, S.J., 1996. Competition and Firm Performance, *Journal of political economy*, 104(4): 724-746
- OECD, 2008. A Policy Framework for Investment: Competition Policy, OECD Conference Investment for Development, Europe
- Polder, M., E. Veldhuizen, D. van den Bergen, & E. van der Pijll, 2009. Micro and Macro Indicators of Competition: Comparison and Relation with Productivity Change, Discussion paper 09024, Statistics Netherland
- Porter, Michael E., "*The Competitive Advantage of Nations*", The Free Press, 1990.
- Porter, Michael E., Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, Peter K. Cornelius, Macha Levinson, and Klaus Schwab, "*The Global Competitiveness Report 2000*", Oxford University Press, 2000.
- Setiawan, M., Purnagunawan, R.M., Hermawan, W., Suara, Y.I., Heriyaldi, and Pradono, T.D., 2013.
Estimating the Effects of Competition on the Sectoral Performances of the Major Industries in Indonesia, Working Paper Faculty of Economics, University of Padjadjaran.

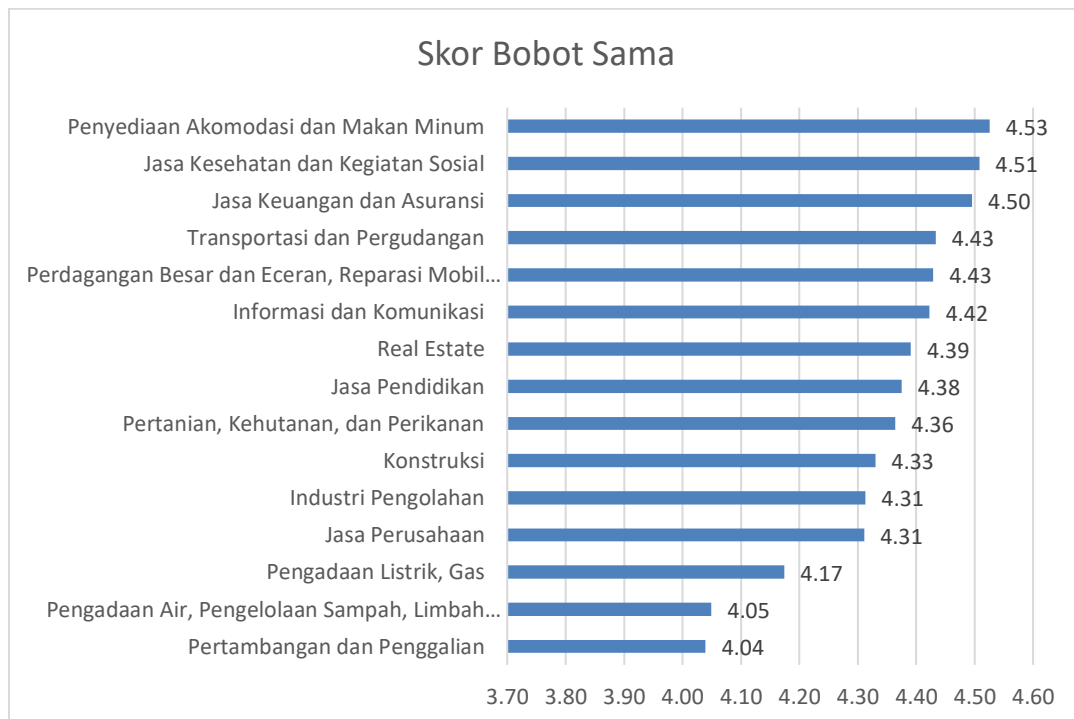
- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2012a) Industrial Concentration and Price Cost Margin in Indonesian Food and Beverages Industry, *Applied Economics*, 44:3805-3814
- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2012b) The Relationship Between Technical Efficiency and Industrial Concentration: Evidence from the Indonesian Food and Beverages Industry, *Journal of Asian Economics*, 23 (4):466-75
- Setiawan, M, Emvalomatis, G, Oude Lansink, A (2013) Market Structure, Conduct, and Performance: Evidence from the Indonesian Food and Beverages Industry, *Empirical Economics*, Vol 45 (3) pp 1149-1165
- Heise, D. R. (1970) The Semantic Differential and Attitude Research, Chapter 14 in Attitude Measurement edited by Gene F. Summers, Chicago
- Volkerink, B., P. de Bass, N. van Grop & N. Philipsen, 2007. Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies. *Ecorys Netherlands BV*
- World Economic Forum (WEF), 2011. The Global Competitiveness Report 2011/2012. World Economic Forum (WEF), 2012. The Global Competitiveness Report 2012/2013. World Economic Forum (WEF), 2013. The Global Competitiveness Report 2013/2014. World Bank, “*World Development Report 1997; Private Sector Survey*”, 1997.

LAMPIRAN

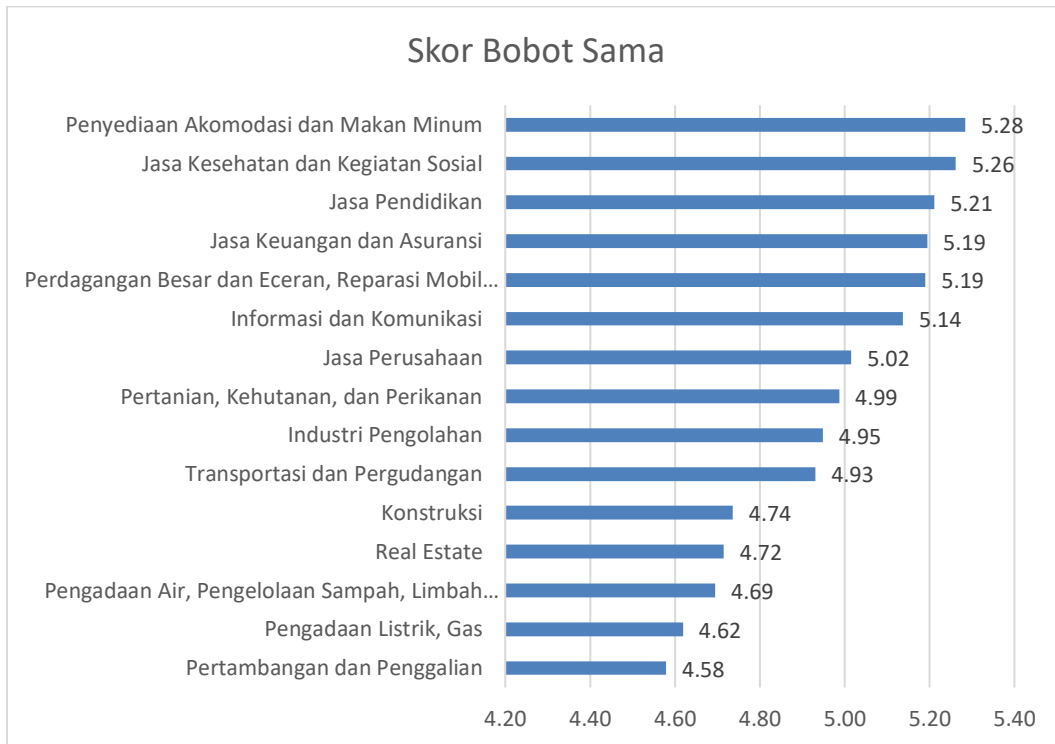
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Jawa Tengah



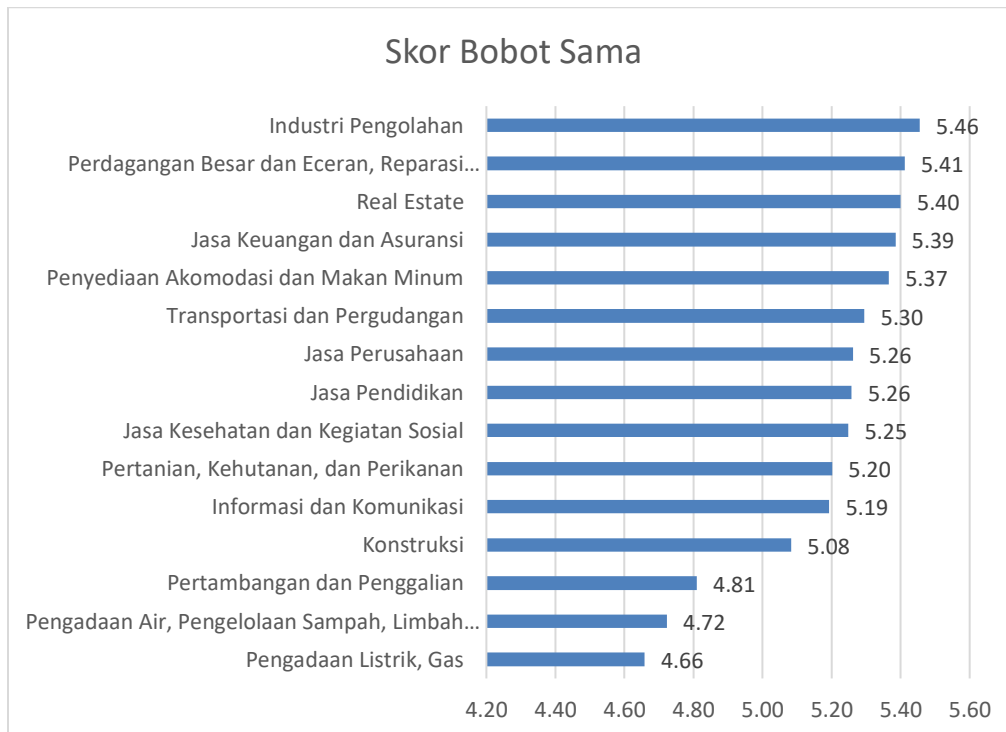
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah



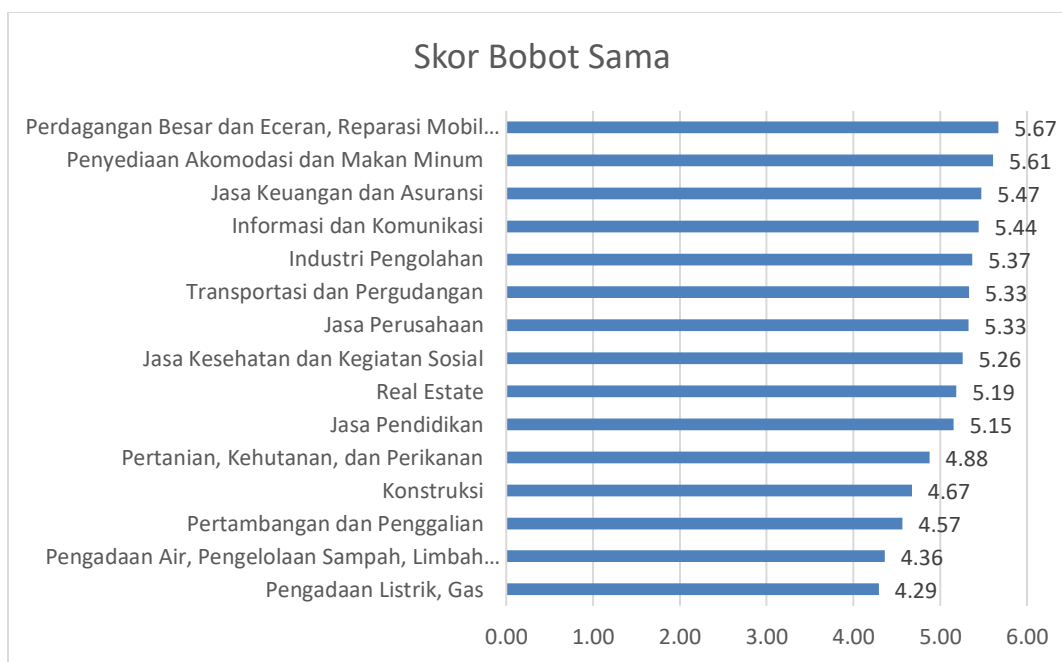
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kalimantan Timur



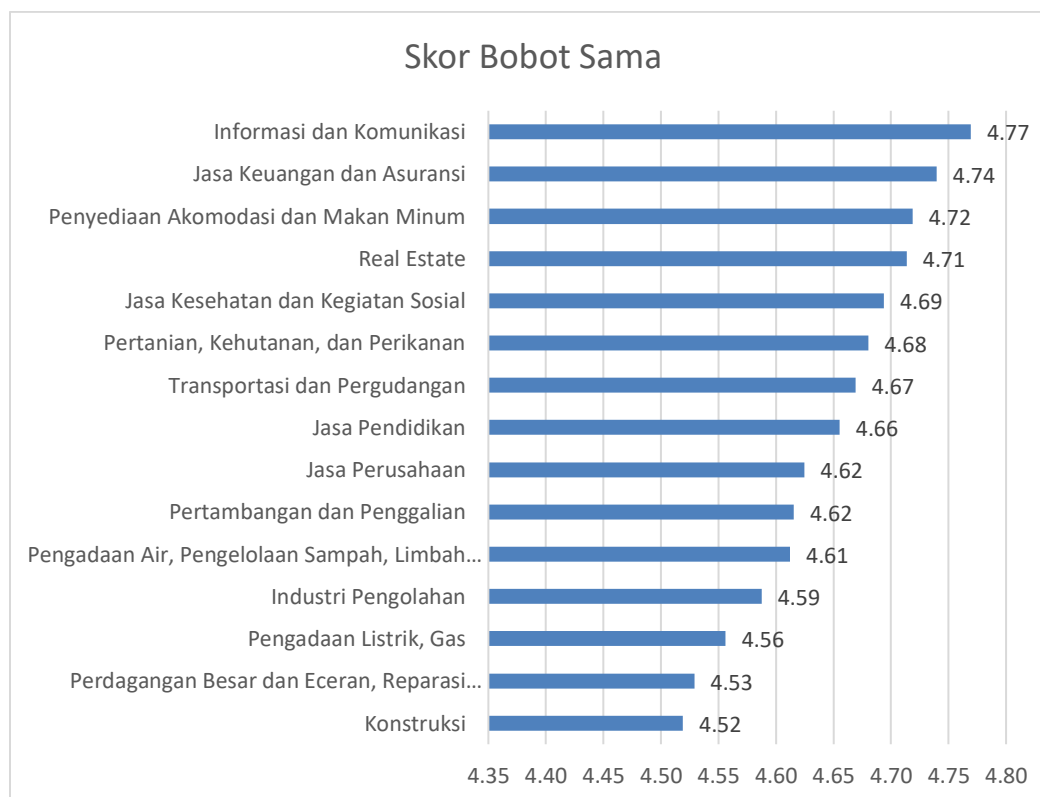
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sumatera Utara



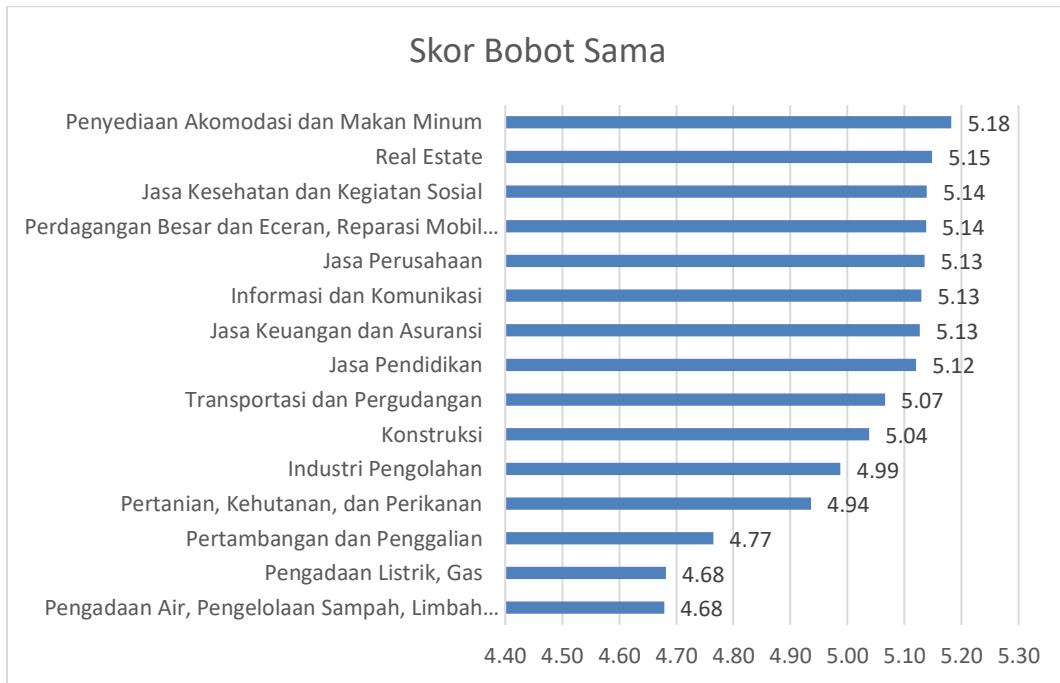
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Jawa Timur



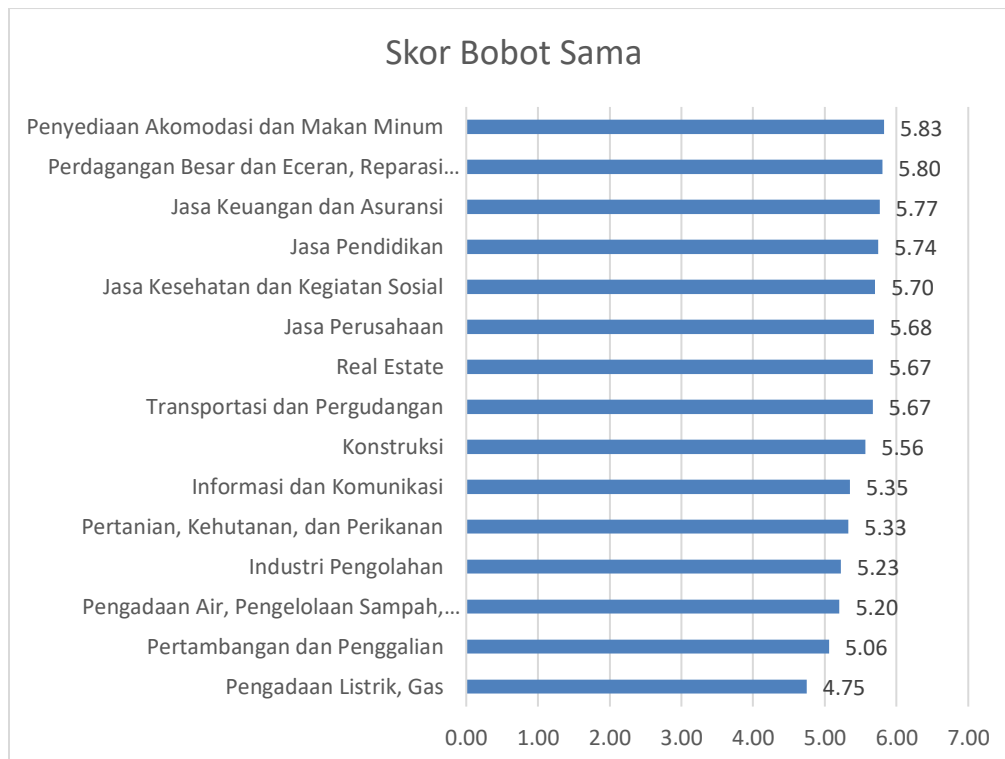
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Riau



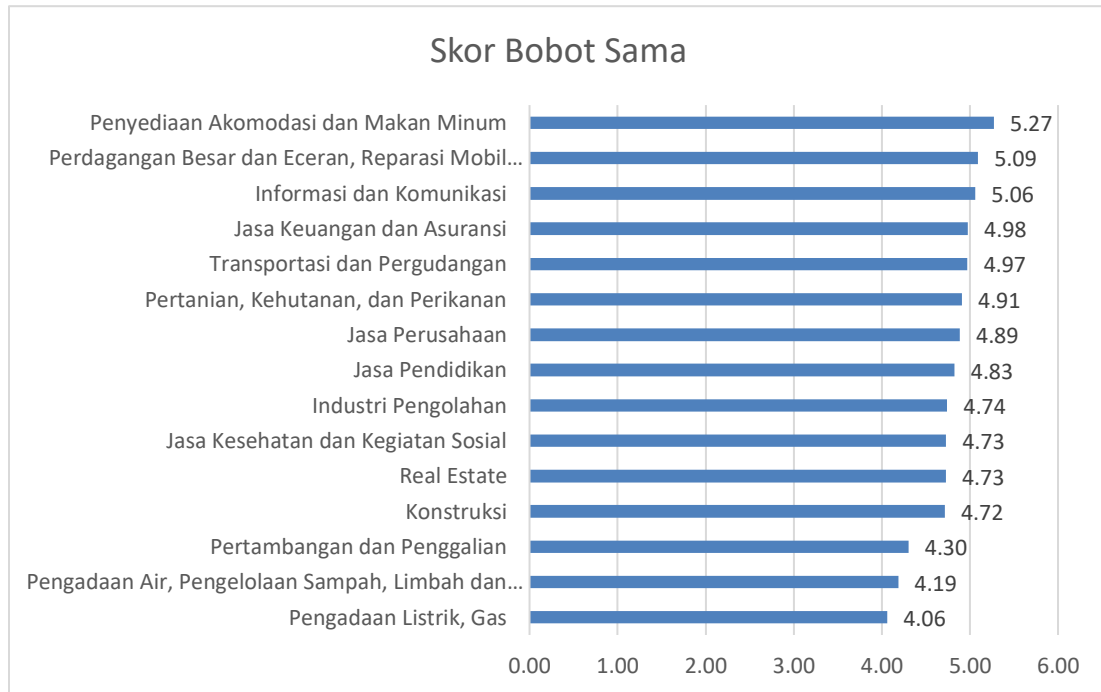
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan



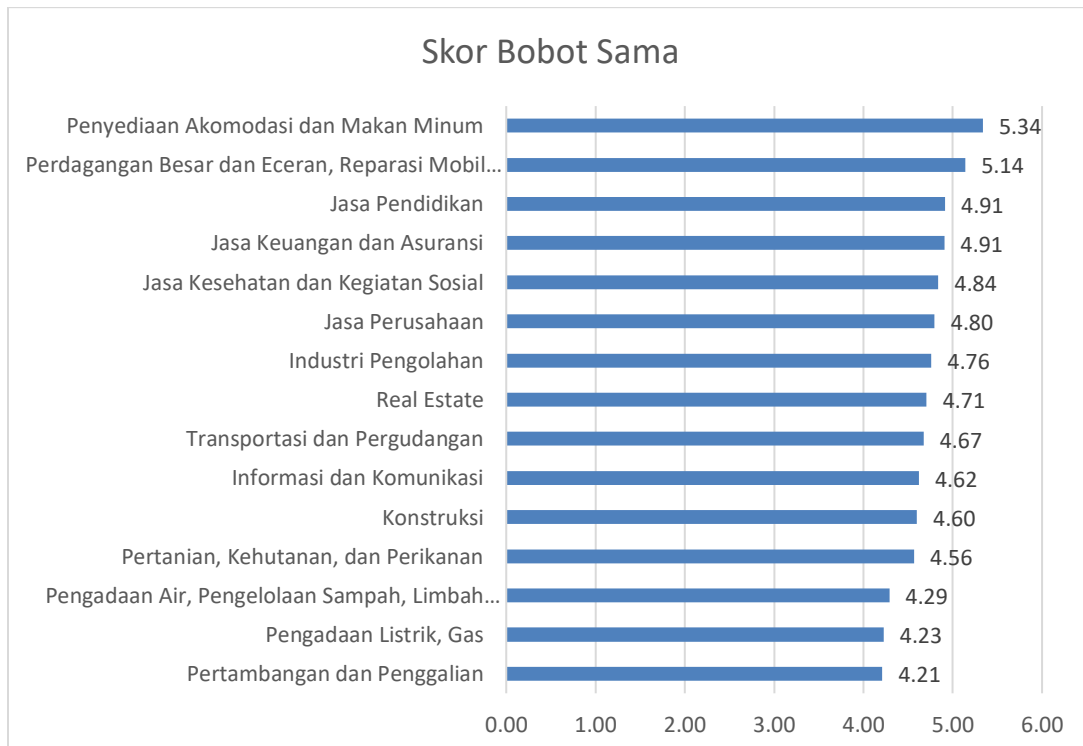
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Banten



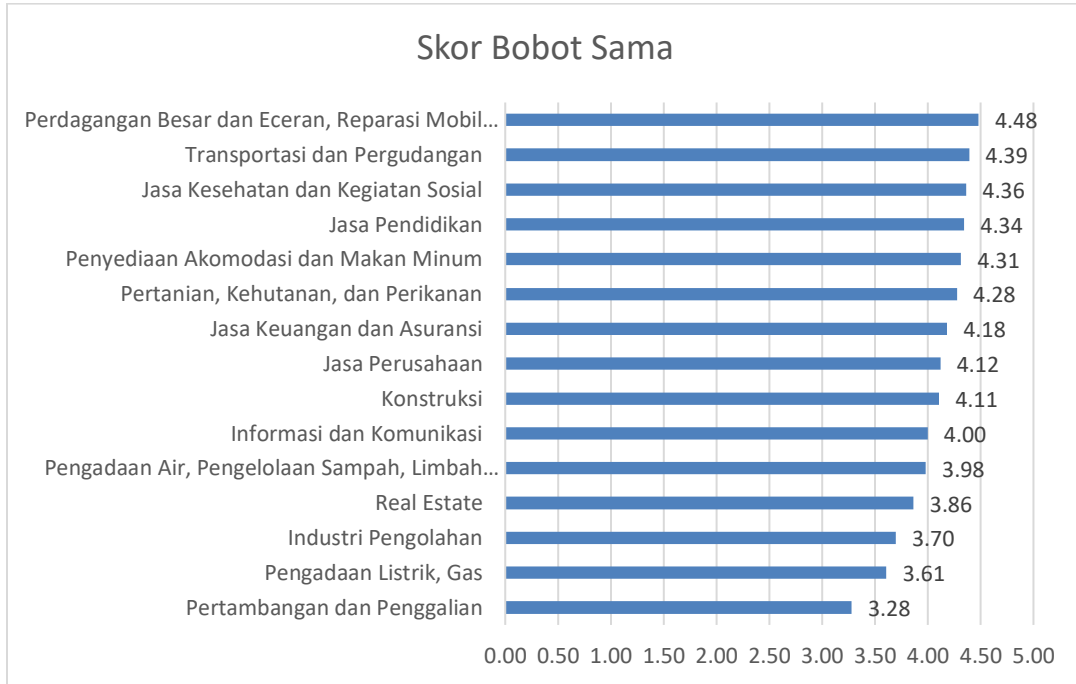
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Bali



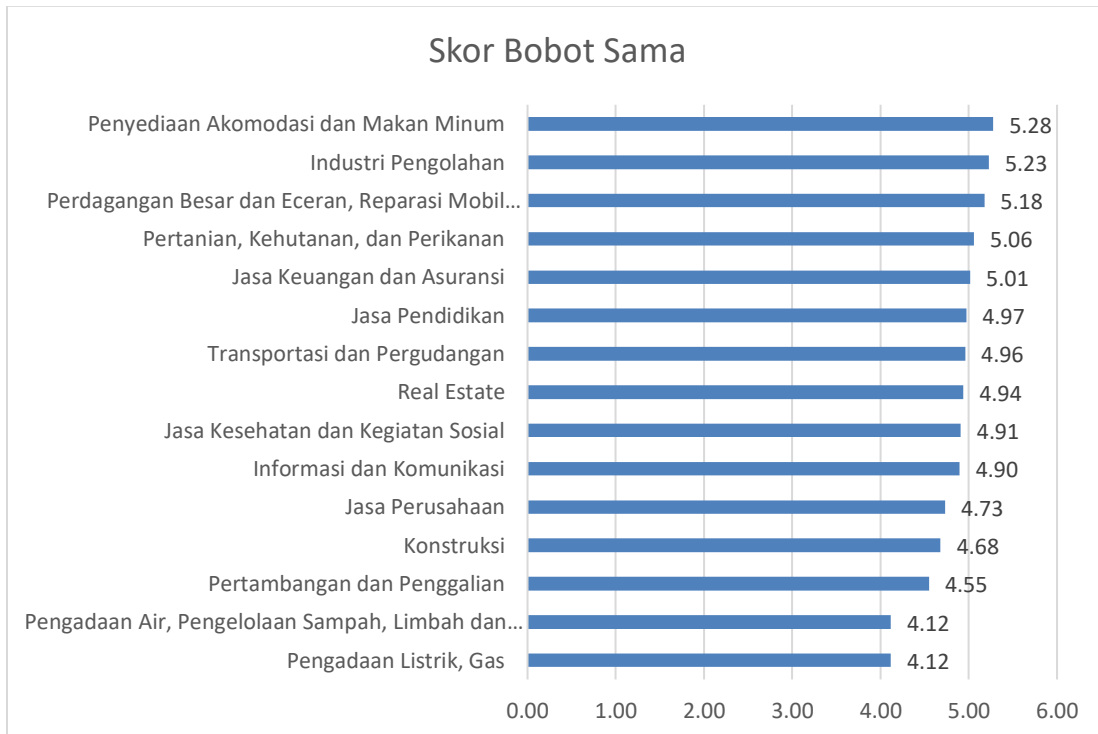
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kalimantan Utara



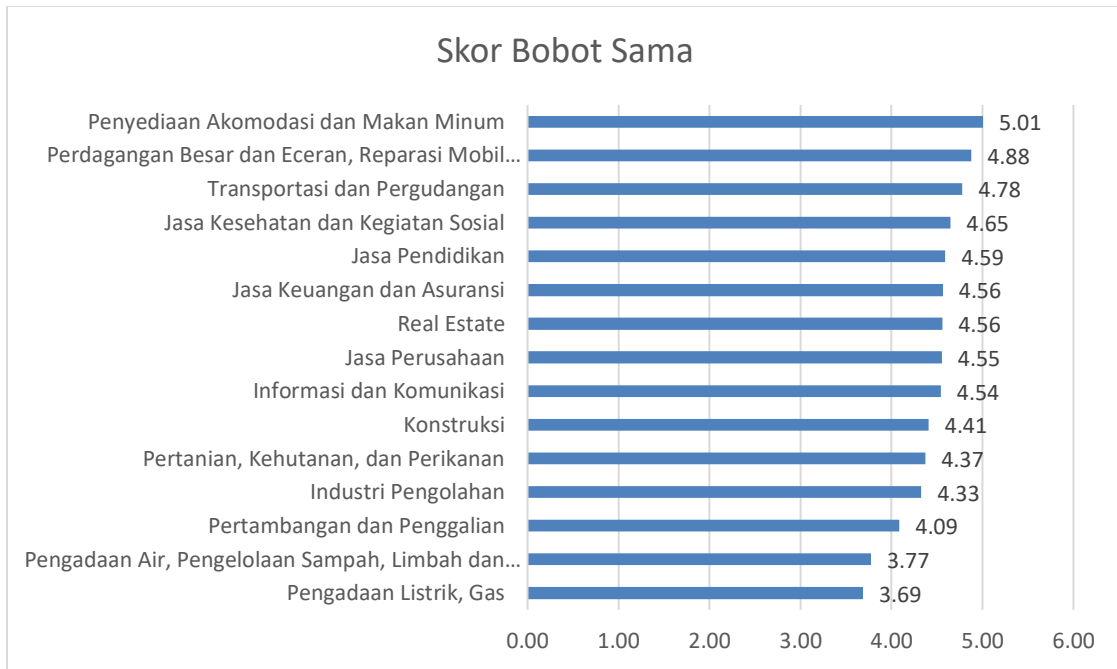
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Papua Barat



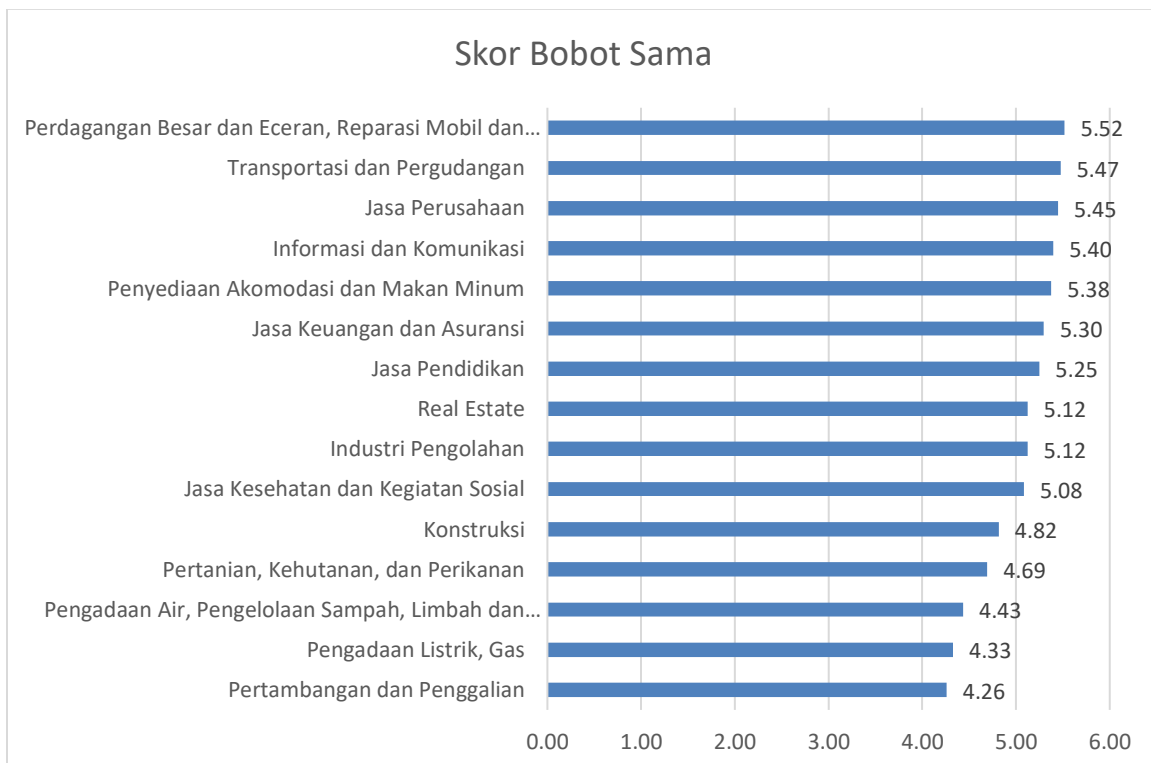
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat



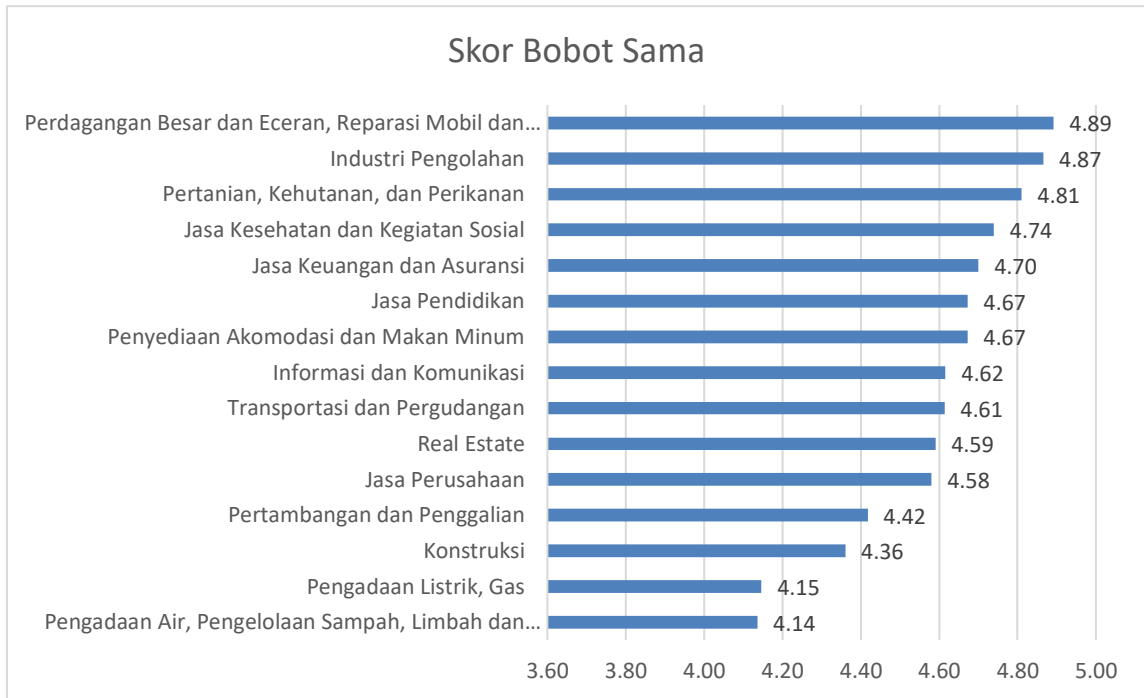
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Papua



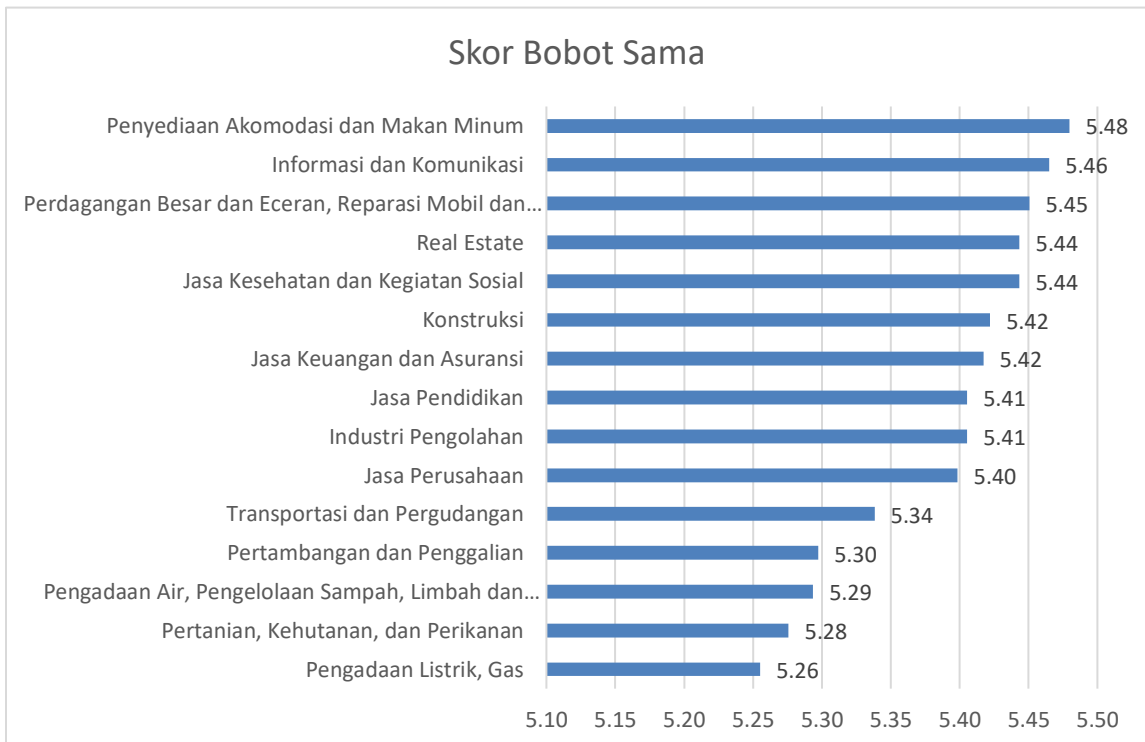
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sulawesi Utara



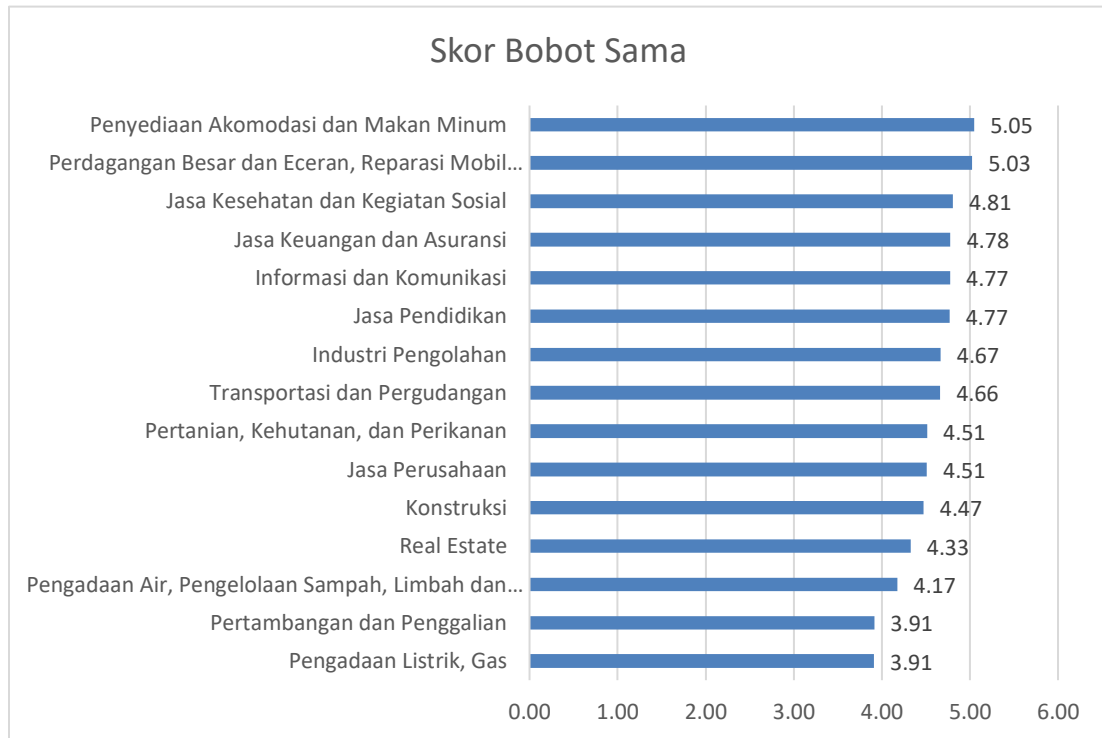
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan



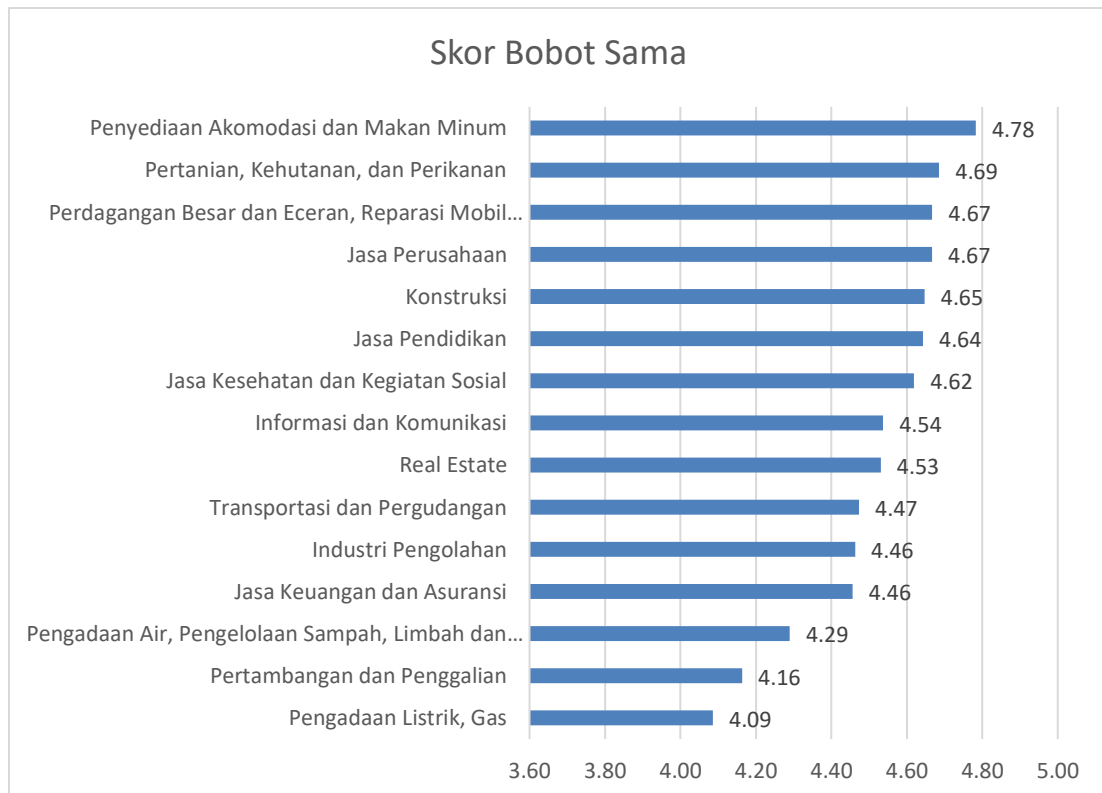
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sumatera Selatan



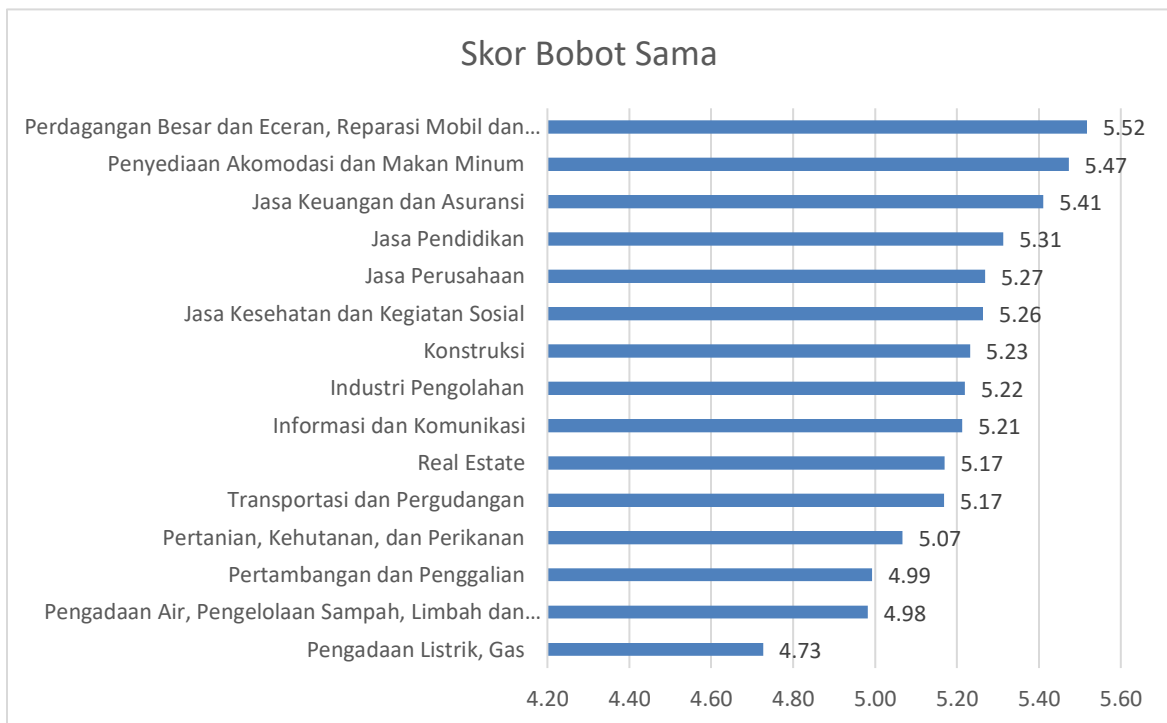
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Maluku



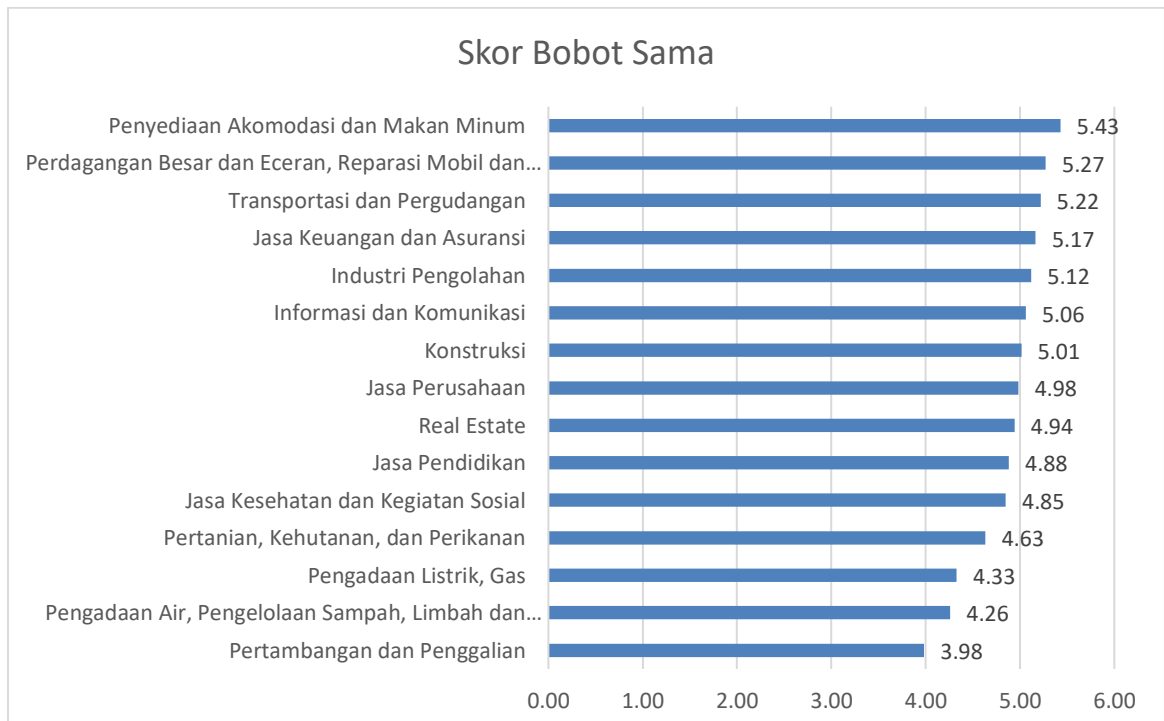
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Aceh



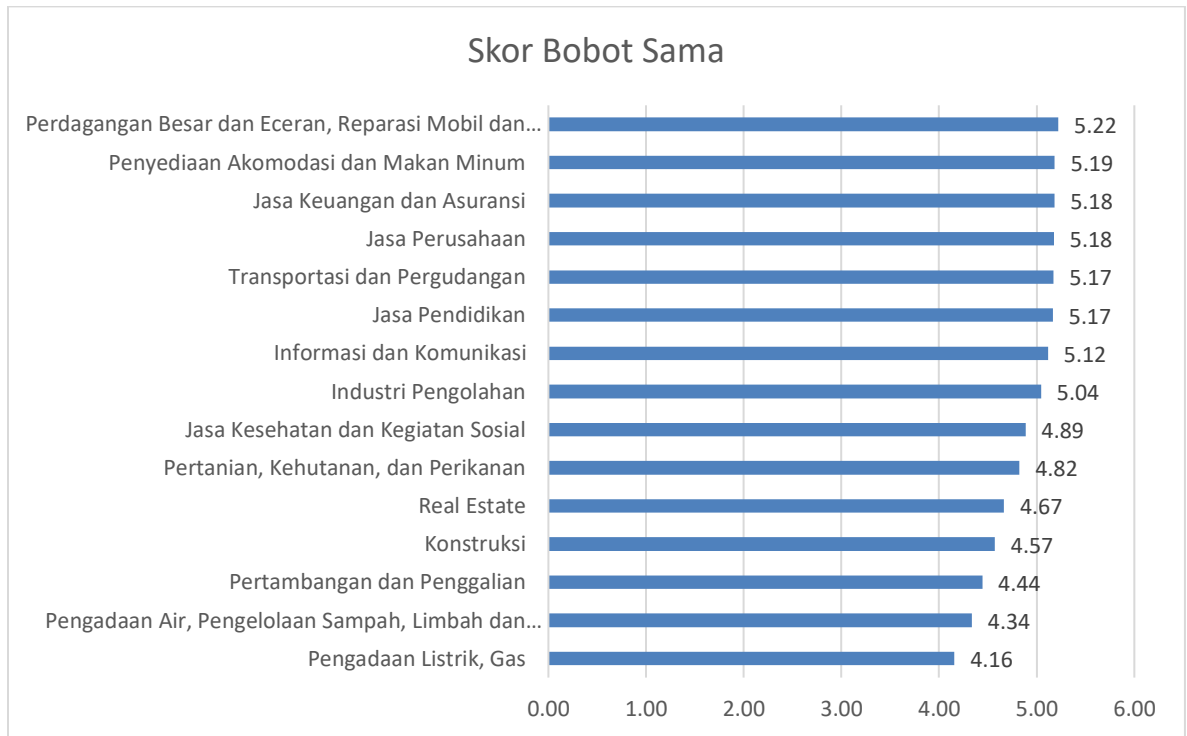
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sumatera Barat



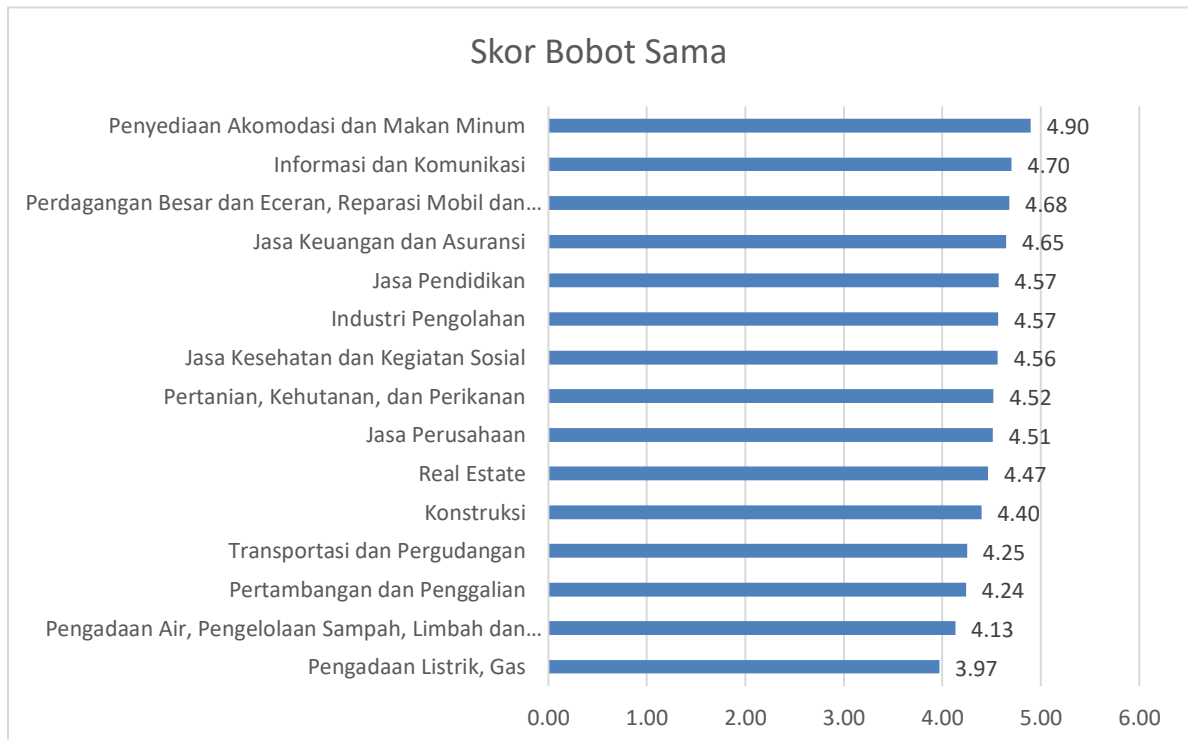
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kep. Riau



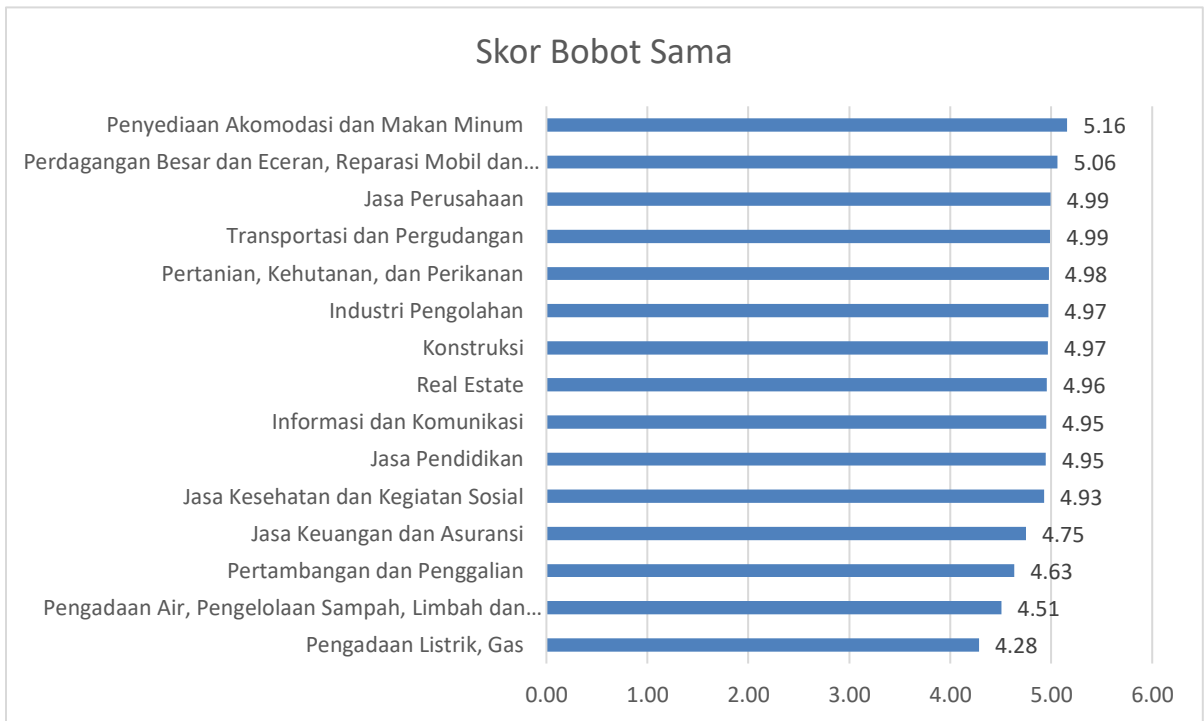
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Bengkulu



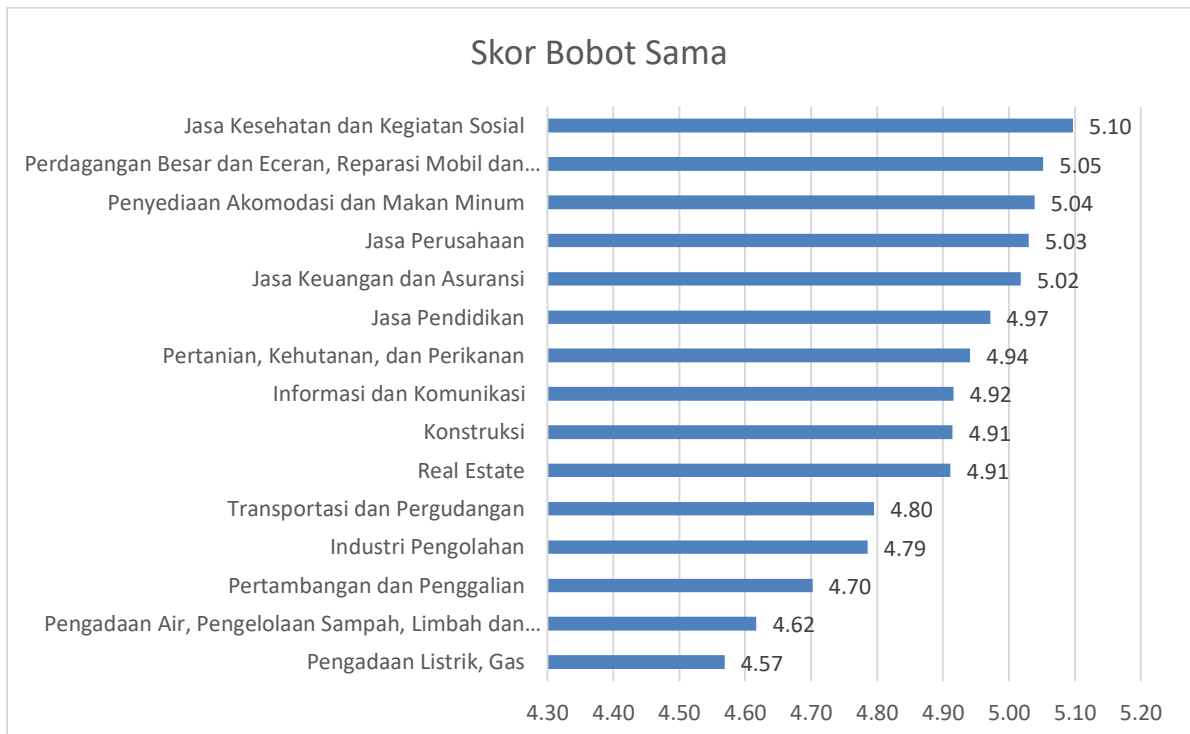
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah



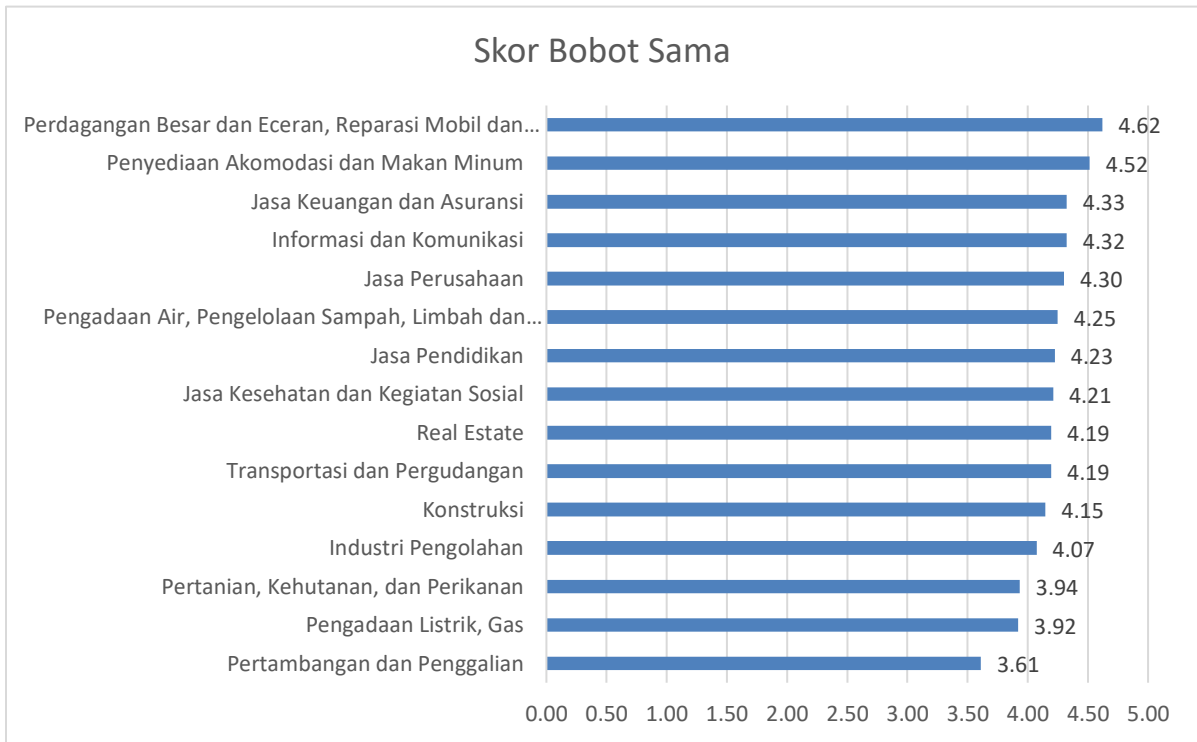
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Bangka Belitung



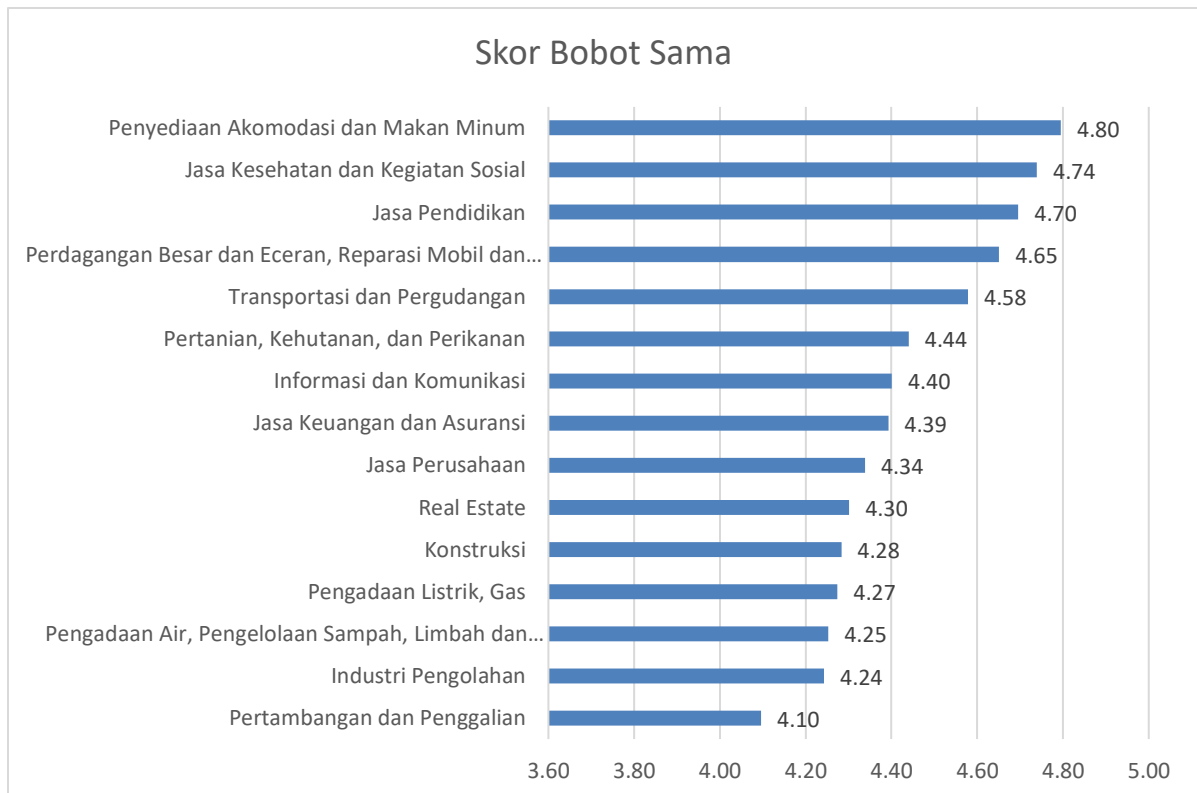
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Kalimantan Barat



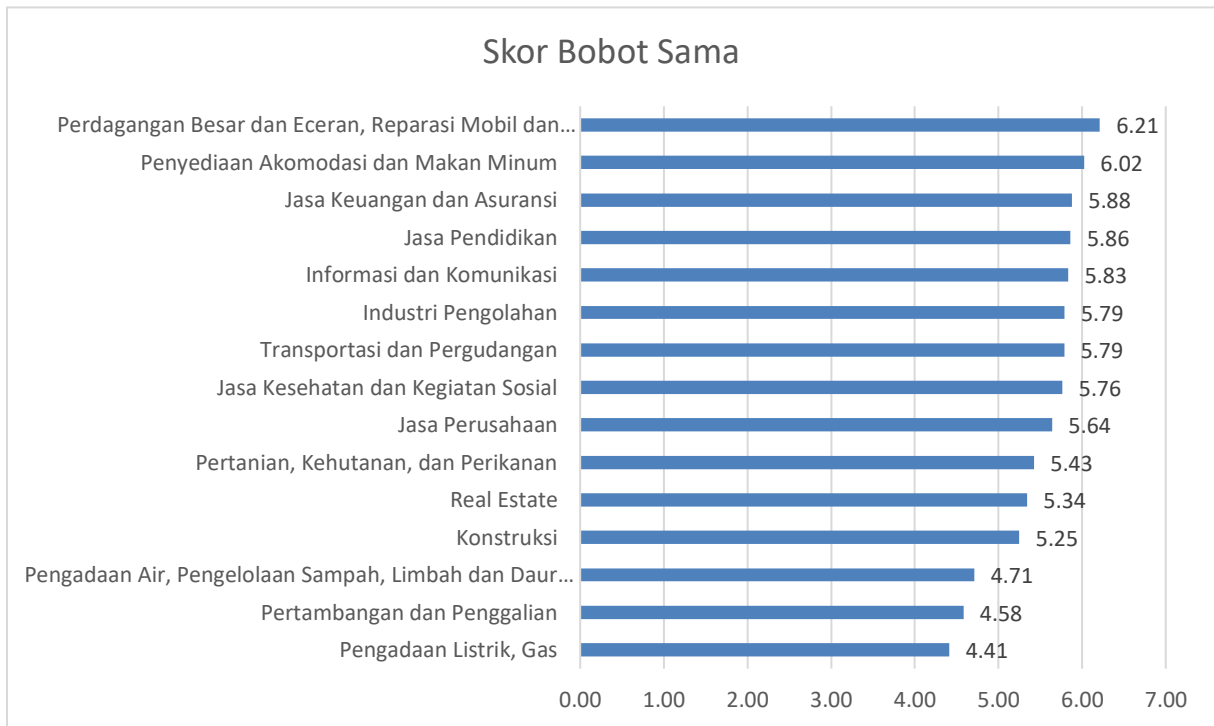
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Gorontalo



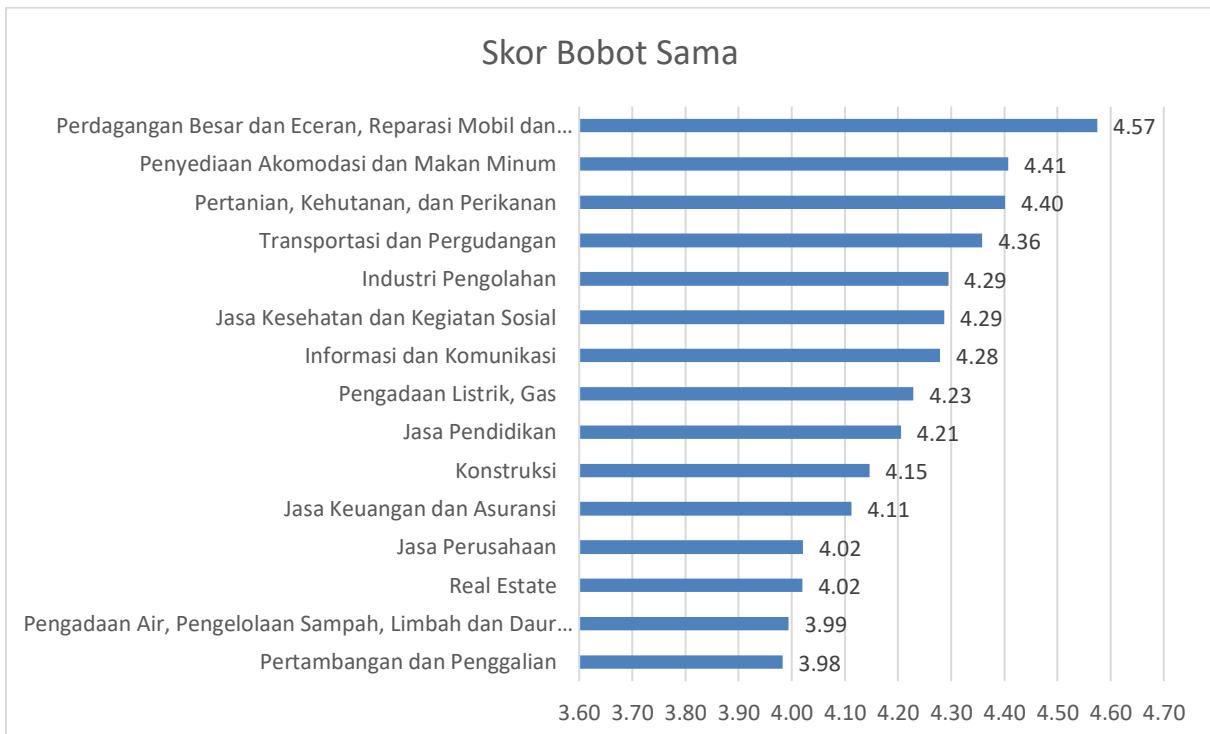
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sulawesi Barat



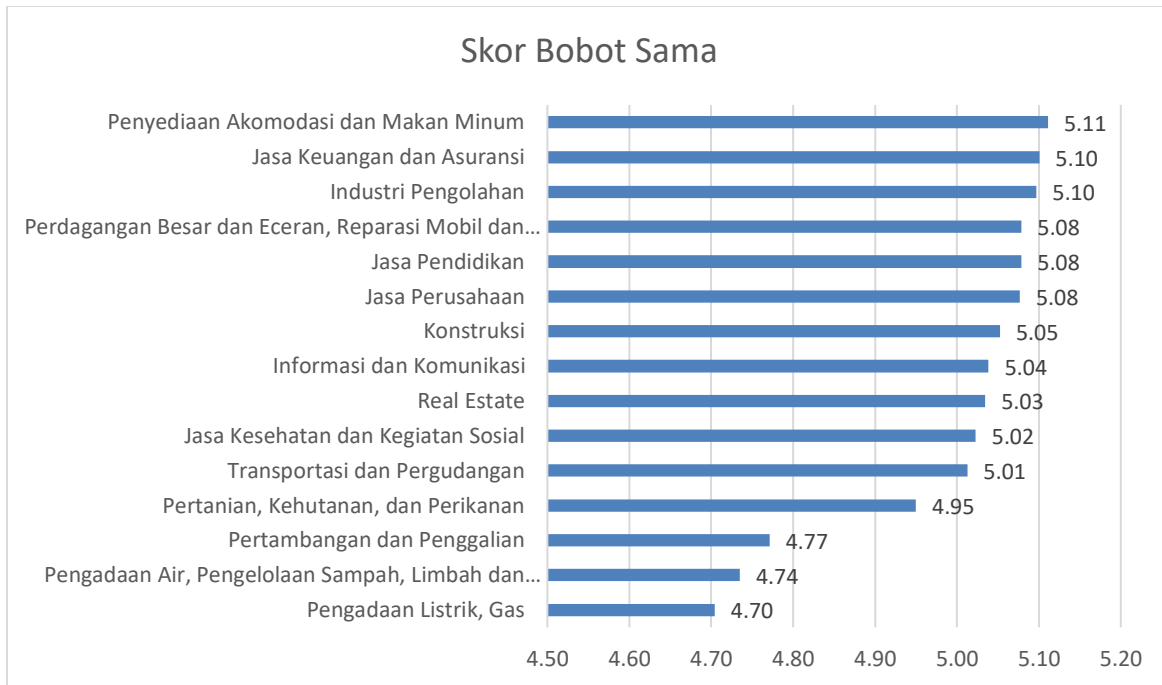
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Jawa Barat



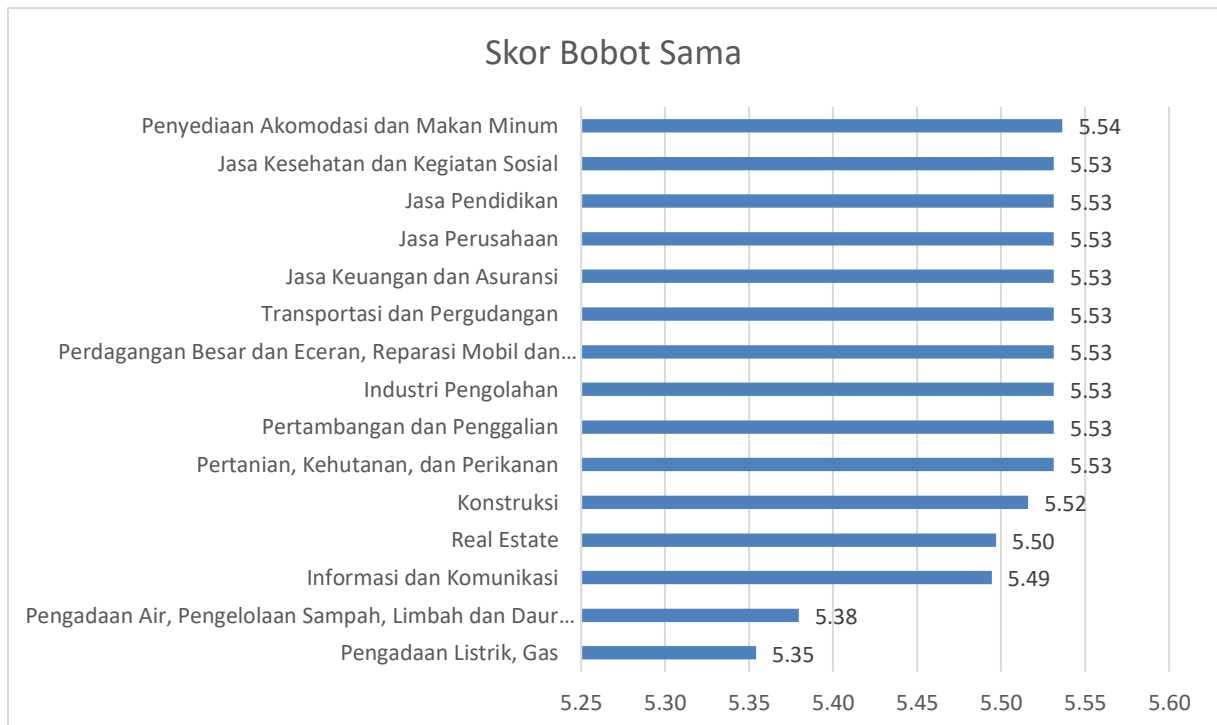
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Maluku Utara



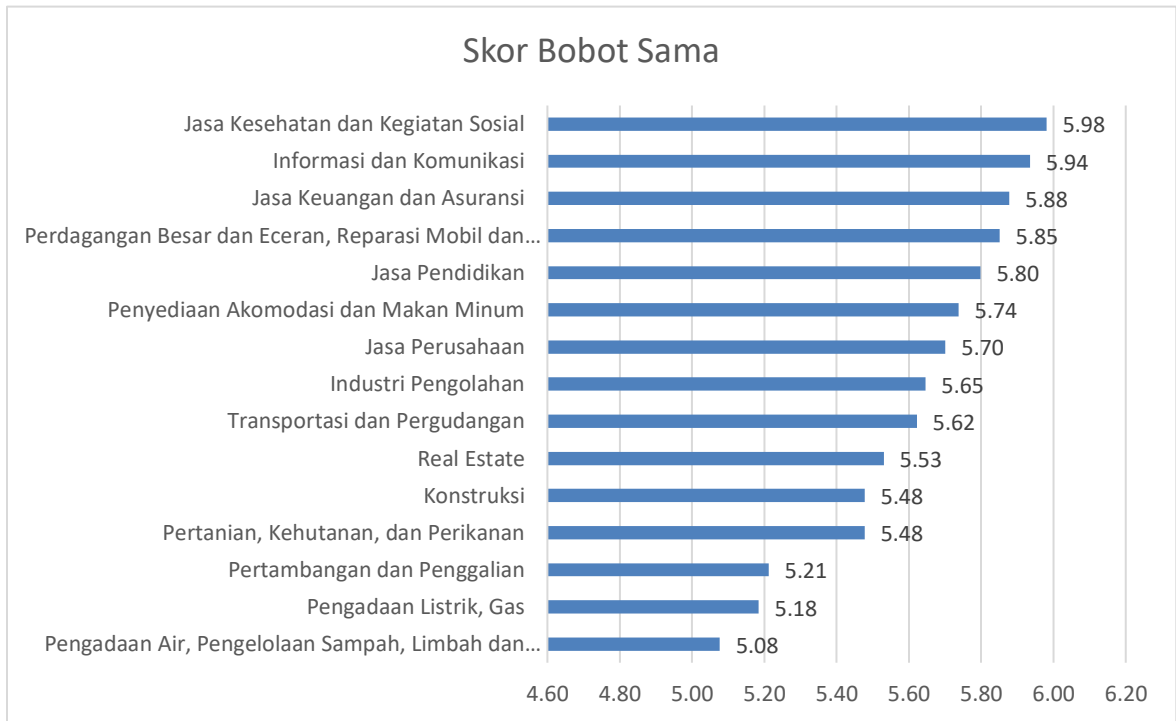
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Lampung



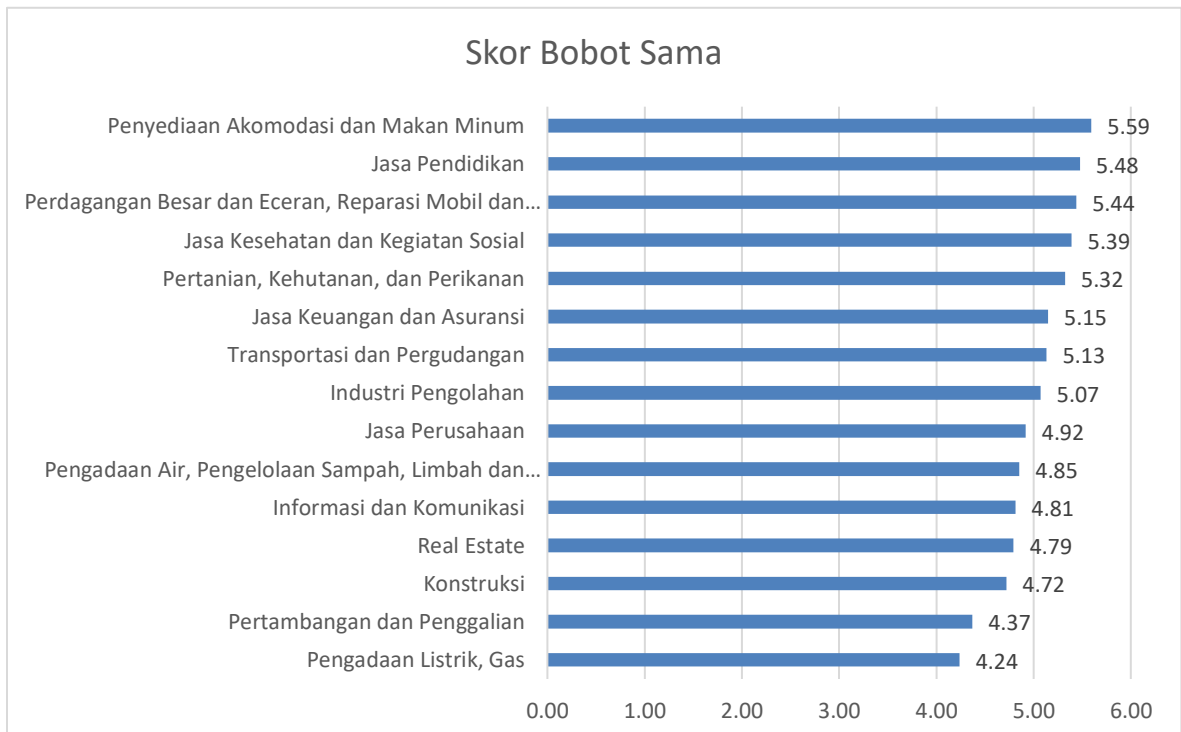
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta



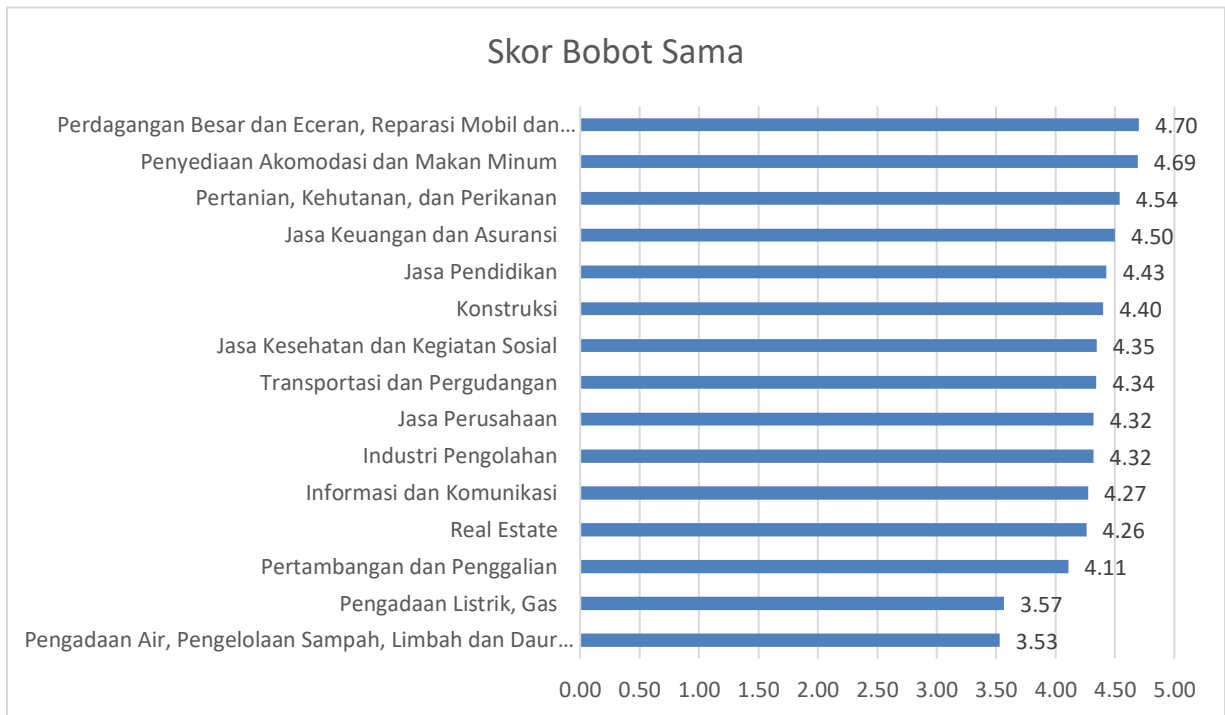
Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi DKI Jakarta



Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Timur



Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Jambi



Indeks Persaingan Usaha Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara

